

PENGLOLAAN SUMBER DAYA LAUT DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BUTON



DEVI ASIATI
LAILA NAGIB
ARY WAHYONO



LIPI

COREMAP-LIPI

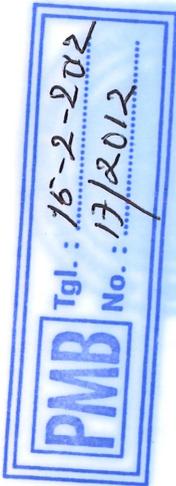
**PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN BUTON**

Penulis :
Devi Asiati
Laila Nagib
Ary Wahyono

Layout :
Puji Hartana

Desain Cover :
Puji Hartana

ISBN :
978-602-8942-52-2



PT. LEUSER CITA PUSTAKA (Anggota IKAPI)
Jln. Rawa Bambu I Blok A No. 16, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510
Telp. (021) 7810076, Fax: (021) 7810076

Bekerjasama dengan



LIPI



COREMAP-LIPI

Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI dan COREMAP-LIPI
Jln. Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta Utara 14430
Telp. 62-21-64713850, Fax: 62-21-64711948
Website: <http://oseanografi.lipi.go.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

COREMAP, bertujuan menciptakan pengelolaan ekosistem terumbu karang agar sumber daya laut ini dapat direhabilitasi, diproteksi dan dikelola secara berkesinambungan, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan masyarakat. Keberhasilan COREMAP dapat dikaji antara lain dari aspek biofisik dan sosial-ekonomi. Untuk lokasi World Bank, indikator keberhasilan untuk aspek biofisik adalah apabila pada akhir program terdapat sekitar 70 persen nelayan/penerima manfaat di masyarakat pesisir yang merasa bahwa COREMAP berdampak positif terhadap kesejahteraan dan status sosial ekonomi mereka. Sedangkan dari aspek sosial ekonomi, diharapkan terjadi peningkatan total pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk yang mempunyai kegiatan ekonomi berbasis sumber daya terumbu karang dan kegiatan alternatif lainnya sebesar 10 persen pada akhir program.

Studi Benefit Monitoring Evaluation (BME) sosial ekonomi pada tahun 2008 ini merupakan lanjutan dari Studi Data Dasar Sosial Ekonomi Terumbu Karang tahun 2006, yang dilakukan di wilayah wilayah pesisir dan pulau, yaitu di Desa Terapung dan Desa Wakambanguran, Kecamatan Mawasangka (pesisir) dan Desa Waon dan Kapoa, Kecamatan Kadatua (pulau). Namun demikian, publikasi ini hanya meliputi kawasan pesisir yaitu Kecamatan Mawasangka. Hal ini dilakukan karena adanya kendala teknis untuk mencakup kedua lokasi tersebut.

Kajian tahun 2008 memfokuskan pada evaluasi program COREMAP, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. Perbandingan kondisi sosial ekonomi pada kedua periode kajian, diharapkan dapat untuk mengetahui perubahan kehidupan masyarakat di wilayah kajian, terutama berkaitan dengan pendapatan responden serta peran COREMAP terhadap perubahan tersebut. Hasil evaluasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para *stakeholders* untuk perbaikan program selanjutnya, serta dapat dijadikan bahan evaluasi

bagi keberhasilan COREMAP di wilayah ini dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Tulisan dalam buku ini merupakan hasil kajian pengelolaan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Program COREMAP di wilayah Kabupaten Buton. Wilayah ini merupakan salah satu dari tujuh lokasi COREMAP di Indonesia bagian Timur (lokasi World Bank). Pelaksana studi ini terutama adalah tim peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI (PPK-LIPI) dan beberapa peneliti sosial dari Kedeputian IPSK - LIPI.

Kegiatan penulisan buku ini terlaksana berkat keterlibatan berbagai pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI yang telah memberikan dukungan kepada tim peneliti untuk melakukan kajian pelaksanaan Program COREMAP di Kabupaten Buton. Penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada semua narasumber dari berbagai unsur, diantaranya Pemerintah Kabupaten Buton, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton, Unit pelaksana COREMAP di Kabupaten Buton, serta berbagai pihak lain di daerah yang telah membantu memperlancar pelaksanaan studi dan memberikan data dan informasi yang diperlukan.

Ucapan terima kasih yang tulus juga kami sampaikan pada pemimpin formal dan informal dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa serta para tokoh masyarakat kedua lokasi kajian Desa Terapung dan Desa Mangumbangura di Kecamatan Mawasangka, yang telah banyak membantu kami baik dalam memperoleh data dan informasi maupun dalam membantu kenyamanan sehari-hari selama di lokasi kajian. Terakhir tidak lupa kami ucapkan penghargaan kami kepada para pewawancara dan masyarakat di kedua lokasi kecamatan yang telah banyak membantu tim peneliti dalam pelaksanaan survai.

Sebagai penutup, tiada gading yang tidak retak, meskipun tim peneliti bersama tim teknis di PPK-LIPI telah berusaha seoptimal mungkin untuk menyelesaikan buku ini, namun kami yakin masih

banyak kelemahan dan kekurangan dalam buku ini. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini.

Jakarta, November 2011

Penulis

RINGKASAN EKSEKUTIF

Implementasi program COREMAP Fase I yang telah dilaksanakan di Kabupaten Buton, telah memberikan fondasi yang cukup kuat untuk pelaksanaan Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM). Pendekatan PBM telah memberi pelajaran penting, bahwa keterlibatan seluruh *stakeholders* dalam pengelolaan terumbu karang sangat diperlukan terutama untuk membantu mencegah kerusakan karang lebih lanjut dan upaya pelestariannya. Pantai yang sangat panjang dan laut yang luas di wilayah ini dengan keterbatasan jumlah petugas dan sarana yang dimiliki, memerlukan keterlibatan dan partisipasi aktif seluruh *stakeholders*, khususnya masyarakat setempat dalam menjaga, mengelola dan melindungi sumber daya lautnya. Secara umum kajian tahun 2008 bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan COREMAP di Kabupaten Buton dan mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya tingkat pendapatan masyarakat di lokasi kajian yaitu Kecamatan Mawasangka, terutama untuk dapat memantau dampak Program COREMAP terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara rinci tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Mengidentifikasi permasalahan dan kendala pelaksanaan COREMAP di Kabupaten Buton.
- Mengkaji pemahaman masyarakat mengenai program COREMAP.
- Menggambarkan tingkat pendapatan masyarakat untuk memantau dampak program COREMAP terhadap kesejahteraan masyarakat.

Studi Benefit Monitoring dan Evaluasi (BME) tahun 2008 merupakan studi lanjutan tahun 2006 tentang Data Dasar Sosial Ekonomi, salah satunya di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton. Demikian pula lokasi penelitiannya, kembali ke desa binaan yaitu Desa Terapung dan Wakambangura di Kecamatan Mawasangka. Sasaran kajian yaitu 100 rumah tangga sampel untuk masing-masing kecamatan, merupakan responden yang sama dengan kajian

sebelumnya. Pada kajian tahun 2008, survei pendapatan juga mencakup anggota POKMAS UEP, sehingga jumlah rumah tangga sampel dapat ditambah sampai maksimal 30 rumah tangga, apabila dalam target 100 rumah tangga sampel belum mencakup variasi anggota POKMAS.

Temuan Pokok

Permasalahan dan kendala pelaksanaan COREMAP

Pelaksanaan COREMAP II diawali dengan pembentukan kelembagaan pengelola di tingkat desa seperti LPSTK, Pokmas, LKM dan MD yang mengikut sertakan masyarakat dalam proses pembentukannya. Kegiatan-kegiatan COREMAP juga direncanakan oleh masyarakat yang tertuang dalam RPTK masing-masing desa binaan. Di kedua lokasi, kelembagaan yang menjadi syarat formal pelaksanaan COREMAP di tingkat desa binaan sudah terbentuk dan sebagian sudah berjalan sesuai dengan RPTK masing-masing. Meskipun demikian ada kecenderungan pembentukan lembaga dan pemilihan pengurus lain (seperti LKM, Pokmas), dilakukan secara tergesa-gesa, bersifat formalitas yaitu sekedar memenuhi syarat turunnya dana bantuan COREMAP (UEP

Pemilihan pengurus kelembagaan (selain ketua) cenderung dipilih orang-orang dekat tim pengelola (LPSTK, kepala desa dan MD). Keterbatasan sumber daya manusia di lokasi binaan, juga menyulitkan seleksi pengurus untuk berbagai kelembagaan COREMAP. Dampaknya pengelolaan COREMAP cenderung didominasi beberapa pengurus, bahkan di satu lokasi binaan hanya didominasi ketua LPSTK dan orang-orang dekatnya. Kondisi ini berpotensi melemahkan peran pengurus Pokmas lainnya, dan cenderung menjadi tidak peduli dengan aktivitas COREMAP, karena kurang diikutsertakan dalam pengelolaan sesuai dengan fungsinya. Apabila kondisi ini berkelanjutan, partisipasi masyarakat yang menjadi sasaran penting COREMAP, kurang tercapai.

Sebelum dana bergulir turun (akhir tahun 2007), kegiatan COREMAP di kedua lokasi lebih menonjol pada penyadaran

masyarakat (*awareness*) terutama untuk konservasi terumbu karang, dengan pembentukan DPL. Hasil kegiatan sosialisasi yang dilakukan Pokmas konservasi dan Poswasmas, dirasakan oleh masyarakat setelah masyarakat menyadari arti penting konservasi terumbu karang untuk kehidupan yang lebih baik. Banyak pihak mengakui bahwa program COREMAP di desa binaan telah berdampak berkurangnya praktek penangkapan ikan yang merusak seperti pemakaian bom, dan alat tangkap yang merusak (*redy* dan pukot). Bahkan karena dana untuk konservasi minim, masyarakat nelayan rela berswadaya untuk 'menjaga' DPL dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kondisi ini berdampak pada makin banyak populasi ikan di sekitar karang dan DPL lebih terjaga.

Isu praktek merusak karang melalui pembiusan yang dianggap semakin marak setelah COREMAP, terutama dilakukan oleh beberapa orang lokal, namun sulit pembuktiannya. Pengurus COREMAP dan masyarakat tidak berdaya terhadap pelanggaran –pelanggaran yang dilakukan, terutama praktek pembiusan, meskipun dampaknya amat merugikan nelayan dan budidaya rumput laut. Hal ini disebabkan kurang seriusnya pihak yang berwajib dalam menindaklanjuti pelaku, meskipun dukungan untuk konservasi cukup kuat dari semua unsur masyarakat (Pemerintah, tua adat dan tokoh masyarakat). Dikuatirkan dapat menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan program konservasi, karena adanya pelaku yang diduga di *back up* pihak berwajib, sehingga tidak tersentuh hukum.

Pelaksanaan program COREMAP yang cenderung berorientasi proyek, menyulitkan upaya partisipasi masyarakat apabila memerlukan dana. Hal ini nampak pada kerusakan batas DPL yang dibiarkan tanpa batas karena masyarakat menggantungkan penggantian dari COREMAP. Akibatnya nelayan dari luar tidak mengetahui lagi batas-batas DPL, kecuali diingatkan sewaktu melintas. Apabila tanpa penjagaan, kemungkinan dapat terjadi pelanggaran di areal konservasi.

Antusias masyarakat dan pengurus Pokmas bertambah dengan mulai cairnya dana bergulir dari program COREMAP (UEP), meskipun realisasinya lambat dan belum memenuhi target. Dalam hal

pengelolaan dana bergulir, peran dominan LPSTK di suatu desa binaan, berpotensi 'jalan sendiri' terutama dalam mengambil kebijakan mengelola dana Pokmas (UEP). Tanpa transparansi dalam pengelolaan dana dengan pengurus kelembagaan terkait, berpotensi menimbulkan kecurigaan adanya benturan kepentingan dengan kegiatan ekonomi pengurus dan orang-orang dekatnya. Antusias masyarakat akan berkurang manakala penyaluran dana bergulir tidak menyentuh kepentingan langsung masyarakat yang menjadi sasaran.

Kesepakatan yang sudah dibuat antara PMU di tingkat kabupaten dengan Dinas Pendidikan dalam hal menambah mata pelajaran terumbu karang dalam Mulok, kurang mendapat dukungan di tingkat implementasi. Hal ini disebabkan adanya benturan COREMAP dengan kepentingan daerah yaitu memasukkan Bahasa Daerah sebagai salah satu pelajaran dalam UAS.

Dalam beberapa hal kelembagaan yang dibentuk lebih disebabkan oleh pemenuhan standar COREMAP daripada kebutuhan masyarakat. Akibatnya pembentukan lembaga seperti pondok informasi dilakukan sekedar memenuhi target, karena dana sudah turun, tanpa dilengkapi untuk memfungsikannya. Kondisi ini seringkali kurang dapat dimanfaatkan masyarakat karena lebih banyak tertutup daripada difungsikan sebagaimana mestinya.

Dasar pemberian insentif untuk pengurus COREMAP di tingkat desa binaan tidak jelas, sehingga sering menimbulkan perasaan tidak adil antarpengurus. Pengurus MD dapat insentif bulanan, sementara ketua LPSTK dan pengurus lain tidak memperolehnya, sehingga insentif diperoleh dari uang jasa pengelolaan dana bergulir. Dikuatirkan tanpa pengawasan yang intensif, potensial terjadi penyalahgunaan dana yang terkumpul, misal pengguliran tidak tepat sasaran, pengurus memanfaatkan lebih dulu untuk usahanya, sebelum digulirkan ke kelompok lain.

Kesejahteraan masyarakat dilihat dari pemilikan aset produksi dan non produksi cenderung meningkat dalam 2 tahun terakhir (2006-2008), baik karena pengaruh konservasi COREMAP maupun faktor lainnya. Beberapa peningkatan aset produksi dan non-produksi juga

dipengaruhi oleh kiriman dari perantau yang bisanya untuk modal (sarana penangkapan ikan), rumah maupun kendaraan bermotor. Sedangkan peningkatan kesejahteraan dilihat dari kondisi permukiman dan sanitasi lingkungan juga dipengaruhi oleh dukungan banyak program yang masuk ke lokasi desa binaan COREMAP, baik dari COREMAP maupun non-COREMAP.

Pemahaman masyarakat tentang COREMAP

Pengetahuan tentang COREMAP didasarkan pada beberapa pertanyaan dalam survei yang meliputi keberadaan proram COREMAP, kegiatan penyelamatan terumbu karang dan kegiatan-kegiatan lain terkait program COREMAP di kedua lokasi kajian. Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen responden di kedua lokasi kajian mengetahui tentang COREMAP dan program-programnya.

Pengetahuan dan keterlibatan responden dalam kelembagaan COREMAP dipengaruhi oleh tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus dan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam musyawarah pembentukan kelembagaan tersebut, Pada umumnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kelembagaan COREMAP seperti LPS-TK, UEP relatif tinggi meskipun proporsinya tidak setinggi pengetahuan tentang COREMAP. Namun keterlibatan masyarakat di kedua lokasi lebih rendah daripada tingkat pengetahuannya. Tingkat pengetahuan dan tingkat keterlibatan masyarakat di kelembagaan COREMAP tersebut untuk Desa Wakambangura pada umumnya lebih tinggi dari Desa Terapung. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi permukiman dan homogenitas penduduk yang lebih menguntungkan di Desa Wakambangura dibandingkan Desa Terapung yang relatif lebih tersebar dan heterogen. Dalam keterbatasan SDM dan dana yang dimiliki, tampaknya kondisi permukiman dan homogenitas penduduk seperti Wakambangura juga berpengaruh terhadap efektivitas penyuluhan dan informasi yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok masyarakat.

Pada umumnya informasi program yang berkaitan dengan bantuan dana langsung ke masyarakat, relatif cepat sampai ke masyarakat. Hasil survei menunjukkan lebih dari 60 persen responden mengetahui kegiatan pelatihan UEP, namun keterlibatan pada pelatihan tersebut relatif rendah, terutama di Terapung jauh lebih rendah dibandingkan Wakambangura. Hal ini dipengaruhi antara lain oleh Di Wakambangura jumlah anggota Pokmas yang menjadi responden lebih banyak daripada di Terapung. Sedangkan anggota Pokmas umumnya sudah mendapat pelatihan sebelum menerima dana bergulir.

Pendapatan masyarakat dan faktor yang berpengaruh

Selama kurun waktu 2006-2008 terjadi peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga dan pendapatan perkapita di Kecamatan Mawasangka. Pendapatan rumah tangga meningkat sebesar 4,4 persen, dari Rp. 1.440.522 menjadi Rp. 1.568.608 per bulan dan pendapatan perkapita meningkat sebesar 10,5 persen, dari Rp. 286.286 menjadi Rp. 349.259. Peningkatan ini berkaitan dengan kenaikan pendapatan masyarakat di sektor pertanian, baik pertanian pangan maupun tanaman keras. Selain itu, peningkatan pendapatan rumah tangga dari sektor perdagangan meningkat secara signifikan, karena semakin meningkatnya kegiatan perdagangan masyarakat, terutama perdagangan hasil ikan. Sementara pendapatan rumah tangga dari sektor perikanan mengalami penurunan karena menurunnya hasil tangkapan ikan.

Pendapatan rumah tangga nelayan mengalami penurunan, baik pendapatan perkapita maupun rata-rata pendapatan. Pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan turun sebesar 19 persen, dari Rp. 2.479.874 menjadi Rp. 1.625.806, sedang pendapatan rata-rata turun sebesar 7 persen, dari Rp. 4.12.902 menjadi Rp. 357.095. Penurunan ini disebabkan berkurangnya hasil tangkapan ikan oleh nelayan. Hal ini berkaitan dengan belum maksimalnya hasil tangkapan nelayan, terutama dari hasil ikan teri, karena baru pada tahap awal musim ikan. Hasil tangkapan ikan teri pada tahun ini diprediksi mengalami

peningkatan, diindikasikan oleh perolehan ikan teri yang lebih banyak pada awal Musim Timur dibandingkan dengan awal musim Timur pada tahun sebelumnya. Pada puncak musim Timur (September) ikan teri akan berlimpah dan biasanya Base Camp penuh sehingga tidak menampung lagi ikan teri dari nelayan. Di samping itu masih adanya praktek penangkapan ikan yang menggunakan obat bius oleh beberapa masyarakat lokal, sehingga berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan pancing.

Pendapatan nelayan bervariasi menurut musim, rata-rata pendapatan nelayan pada musim ombak lemah lebih tinggi dibandingkan musim pancaroba dan musim ombak kuat. Hal ini disebabkan sebagian besar nelayan tidak melaut pada musim gelombang kuat karena keterbatasan armada tangkap. Pada saat kajian, musim ikan baru saja dimulai, sehingga hasil teri belum maksimal. Sebagian besar pendapatan nelayan di Desa Terapung pada musim ikan berasal dari hasil teri.

Kegiatan COREMAP belum memperlihatkan dampak yang signifikan pada pendapatan masyarakat, karena program UEP baru dilaksanakan pada awal tahun 2008, dan jumlah yang menerima dana masih terbatas, sehingga belum memperlihatkan dampak pada kenaikan pendapatan masyarakat. Selain itu, relatif kecilnya dana yang digulirkan pada anggota pokmas (antara Rp. 500.000 sampai Rp. 2.500.000), menjadi kurang berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GRAFIK	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Terumbu Karang	1
1.2. Program Pengelolaan Terumbu Karang	3
BAB II KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT	7
2.1. Perkembangan Penduduk	7
2.2. Pendidikan dan Keterampilan	10
2.3. Pekerjaan	13
2.4. Kesejahteraan Penduduk	17
BAB III POTENSI DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT	25
3.1. Potensi Sumberdaya Laut	25
3.2. Wilayah Pengelolaan	27
3.3. Teknologi Penangkapan	28
3.4. Sarana dan Prasarana Kenelayanan	32
3.5. Program dan Kegiatan dalam Pengelolaan	35
BAB IV COREMAP DAN IMPLEMENTASINYA	37
4.1. Pelaksanaan COREMAP : Permasalahan dan Kendala	37
4.1.1. Pengelolaan dan pelaksanaan/kegiatan COREMAP di tingkat kabupaten	38
4.1.2. Pengelolaan dan pelaksanaan/kegiatan Coremap di Kecamatan Mawasangka	52

4.2.	Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan/Program COREMAP	75
4.2.1.	Tingkat Kabupaten	75
4.2.2.	Kecamatan Mawasangka	84
BAB V	PENDAPATAN PENDUDUK DAN PERUBAHANNYA	93
5.1.	Perkembangan Perekonomian Kabupaten Buton	93
5.2.	Perubahan Pendapatan Penduduk Di Kecamatan Mawasangka Tahun 2006-2008	96
5.2.1.	Pendapatan Penduduk	96
5.2.2.	Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan	120
BAB VI	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	131
6.1.	Kesimpulan	131
6.2.	Rekomendasi	138
	DAFTAR PUSTAKA	140

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data Kerusakan Karang Nasional	1
Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk (Rumah Tangga Sampel) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Desa Mangumbangura dan Terapung (2008)	10
Tabel 2.2.	Pemilikan dan Penguasaan Rumah Tangga Terhadap Aset Produksi di Desa Terapung dan Wakambangura Tahun 2006-2008	18
Tabel 4.1.	Kegiatan/Program CRITC dan Keterlibatan Unsur Masyarakat	77
Tabel 4.2.	Kegiatan/Program CBM dan Keterlibatan Unsur Masyarakat	79
Tabel 4.3.	Kegiatan/Program MCS dan Keterlibatan Unsur Masyarakat	82
Tabel 4.4.	Kegiatan/Program <i>Public Awareness</i> dan Keterlibatan Unsur Masyarakat	83
Tabel 5.1.	Struktur PDRB Kabupaten Buton Menurut Harga Berlaku Tahun 2004 dan 2006	94
Tabel 5.2.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tahun 2006 dan 2008 (Rupiah)	99
Tabel 5.3.	Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan Rumah Tangga di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tahun 2006 dan 2008 (Persen)	102

Tabel 5.4.	Distribusi Pendapatan RT Menurut Lapangan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, Tahun 2006 dan 2008	106
Tabel 5.5.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Nelayan di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, Tahun 2006 dan 2008 (Rupiah)	114
Tabel 5.6.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim	115
Tabel 5.7.	Distribusi Rumah Tangga Nelayan Menurut Kelompok Pendapatan dan Musim	117
Tabel 5.8.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Anggota Pokmas Tahun 2008.	120

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Perubahan Tingkat Pendidikan ART (7 tahun ke atas) di Desa Terapung dan Wakambangura (2006-2008) (Persen)	12
Grafik 2.2.	Perubahan Lapangan Pekerjaan Utama KRT di Terapung dan Wakambangura Tahun 2006-2008 (%)	15
Grafik 2.3.	Perubahan Lapangan Pekerjaan Tambahan KRT di Terapung dan Wakambangura Tahun 2006-2008 (Persen)	17
Grafik 2.4.	Pemilikan dan Penguasaan Rumah Tangga Terhadap Aset Non-Produksi di Desa Terapung dan Wakambangura Tahun 2006-2008	20
Grafik 4.1.	Pengetahuan Responden ttg COREMAP (%)	86
Grafik 4.2.	Pengetahuan dan keterlibatan responden pada pembentukan LPS-TK dan lokasi	87
Grafik 4.3.	Pengetahuan Dan Keterlibatan Responden Pada Kegiatan Pelatihan UEP dan Lokasi	89
Grafik 4.4.	Pengetahuan Dan Keterlibatan Responden Dalam Kegiatan Pendampingan UEP dan Lokasi	90
Grafik 4.5.	Pengetahuan dan Keterlibatan Responden Dalam Kegiatan Pendampingan UEP dan Lokasi	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.	Peta Lokasi DPL Program COREMAP di Kabupaten Buton	43
Gambar 4.2.	Foto Lomba Cerdas Cermat Tingkat SLTA	46
Gambar 4.3.	Foto Kegiatan Patroli Yang Sedang Menangkap Basah Pelaku <i>Illegal Fishing</i>	48
Gambar 5.1.	Istri Nelayan Sedang Menunggu Suami Dari Laut	108
Gambar 5.2.	Papa lele sedang menunggu nelaan dari laut	108
Gambar 4.3.	Talut atau Pembatas Pantai Yang Dibangun dari Village Grant	123
Gambar 4.4.	Bak Penampungan Air Yang Dibangun dari Village Grant	124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Terumbu Karang

Kerusakan sumber daya kelautan di Indonesia, khususnya di wilayah padat penduduk, telah terjadi sejak 10 tahun terakhir. Beberapa fakta diantaranya adalah semakin menipisnya hutan mangrove, bertambahnya jumlah wilayah perairan yang mengalami *over fishing* dan meningkatnya *destructive fishing* akibat penggunaan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan seperti bom ikan dan obat bius. Studi yang telah dilakukan oleh LIPI (Suharsono, 2005), menyebutkan bahwa hanya sekitar 6 persen terumbu karang di wilayah timur Indonesia yang masih dalam kategori sangat bagus, dan sekitar 42 persen dalam kondisi kurang atau rusak dengan berbagai variasi tingkat kerusakannya. (COREMAP- LIPI, 2005). Deskripsi kerusakan karang secara lengkap di tingkat nasional dan wilayah dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Data Kerusakan Karang Nasional

Wilayah Indonesia	Lokasi Stasiun	Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang
Barat	278	5,40	24,10	34,17	36,33
Tengah	213	6,10	31,92	45,07	16,30
Timur	195	6,15	21,03	30,77	42,05
Indonesia	686	5,83	25,66	36,59	31,92

Sumber: Suharsono, 2005 (www.COREMAP.or.id)

Catatan : Sangat baik = 75 - 100% Cukup = 25 - 49,9%
Baik = 50 - 74,9% Kurang = 0 - 24,9%

Seperti di daerah lainnya, hasil pengamatan di wilayah perairan Kabupaten Buton dan sekitarnya, menunjukkan bahwa praktek yang cenderung merusak ekosistem terumbu karang telah terjadi dalam

waktu lama. Hal ini dibuktikan dengan berbagai hasil pengamatan tentang kondisi terumbu karang di wilayah ini yang mengalami degradasi dengan tingkat kerusakan yang bervariasi. Hasil survei ekologi Pusat Penelitian Oseanografi LIPI pada tahun 2005, mengungkapkan bahwa kondisi karang di Kabupaten Buton tergolong dalam kategori 'sedang'. Menurut hasil pengamatan RRI di 32 stasiun, persentasi rata-rata tutupan karang hidup hanya sekitar 29,8 persen (P2O-LIPI, 2005).

Meningkatnya kegiatan COREMAP di wilayah Kabupaten Buton, pasti membawa pengaruh terhadap ekosistem di wilayah perairan sekitarnya, secara langsung maupun tidak. Hasil pengamatan terakhir tentang kondisi terumbu karang yang dilakukan oleh tim peneliti CRITC- COREMAP - LIPI pada tahun 2007, menunjukkan bahwa pertumbuhan karang (*Acropora* dan non-*Acropora*) dalam kategori sedang, dengan persentase rata-rata tutupan karang hidup sebesar 35,86 persen. Pertumbuhan karang pada umumnya berupa "patches" yaitu kelompok-kelompok kecil (Manuputty dkk., 2007: 12). Namun demikian, dibandingkan dengan hasil pengamatan tutupan karang pada tahun 2006 (34,27 %) dan tahun 2007 (35,86 %), perubahan tutupan karang di Kabupaten Buton relatif rendah. Dari 12 titik yang diamati, titik terendah adalah 12,07 persen yaitu di Kawasan Mawasangka. Sementara titik tertinggi adalah 55,53 persen di Kadatua (P2O-LIPI, 2007). Dengan pencapaian ini, pertumbuhan karang di Kawasan Mawasangka tergolong jelek, sementara di Kawasan Kadatua dan Siompu, pencapaian tutupan karang sebesar 51,33 persen, tergolong baik.

Rendahnya hasil tutupan karang yang dicapai dalam 2 tahun terakhir di Kabupaten Buton, menunjukkan pemulihan kondisi terumbu karang memerlukan waktu lama dan perencanaan yang komprehensif, dengan melibatkan semua stakeholder terkait. Jeleknya kondisi karang terutama di Kawasan Mawasangka juga menunjukkan masih tingginya *overfishing* di daerah tersebut, meskipun menurut banyak informasi sudah jauh berkurang dibandingkan kondisi sebelumnya.

1.2. Program Pengelolaan Terumbu Karang

Program Pengelolaan Terumbu Karang yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia selama 15 tahun dalam 3 fase, kini memasuki Fase 2. Upaya untuk merehabilitasi dan mengelola terumbu karang, kini sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan meluncurkan program pengelolaan terumbu karang, dikenal dengan istilah COREMAP (Coral Reef Rehabilitation and Management Program). Kabupaten Buton merupakan salah satu wilayah binaan COREMAP baru yang pendanaannya berasal dari Bank Dunia (World Bank). Di wilayah Kabupaten Buton terdapat 7 dari 17 kecamatan yang merupakan daerah binaan COREMAP, yaitu Kecamatan Mawasangka, Kadatua, Siompu, Wabula, Siontapina, Talaga, dan Losalimu. Studi dasar sosial ekonomi pada umumnya telah dilakukan di wilayah ini pada tahun 2006, termasuk di Kecamatan Mawasangka dan Kadatua, yang juga menjadi sampel kajian BME Sosial Ekonomi untuk Kabupaten Buton pada tahun 2008 ini.

Implementasi program COREMAP Fase I yang telah dilaksanakan di dua wilayah yaitu Kecamatan Mawasangka dan Kadatua, Kabupaten Buton, telah memberikan fondasi yang cukup kuat untuk pelaksanaan Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM). Pendekatan PBM telah memberi pelajaran penting, bahwa keterlibatan seluruh *stakeholders* dalam pengelolaan terumbu karang sangat diperlukan terutama untuk membantu mencegah kerusakan karang lebih lanjut dan upaya pelestariannya. Pantai yang sangat panjang dan laut yang luas di wilayah ini dengan keterbatasan jumlah petugas dan sarana yang dimiliki, memerlukan keterlibatan dan partisipasi aktif seluruh *stakeholders*, khususnya masyarakat setempat dalam menjaga, mengelola dan melindungi sumber daya lautnya.

Dengan berakhirnya program COREMAP Fase I, sejak tahun 2006 program COREMAP di Kabupaten Buton pada umumnya telah memasuki Fase II. Pada periode ini, selain melanjutkan beberapa kegiatan sebelumnya, juga dilakukan akselerasi program-program yang sesuai dengan kondisi daerah. Penekanan program pada Fase II adalah mengelola dan melindungi sumber daya laut, khususnya terumbu karang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Tujuan program COREMAP Fase II, terutama menekankan pada terciptanya pengelolaan ekosistem terumbu karang, agar sumber daya laut dapat direhabilitasi, diproteksi dan dikelola secara berkelanjutan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya di lokasi COREMAP. Untuk mencapai tujuan ini, maka program COREMAP menekankan pada Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM) sebagai fokus utama kegiatan programnya.

Salah satu indikator keberhasilan COREMAP untuk lokasi World Bank dilihat dari aspek sosial ekonomi yaitu: 1) total pendapatan yang diperoleh dari berbagai kegiatan berbasis terumbu karang dan kegiatan alternatif di lokasi binaan COREMAP meningkat sebesar 10 persen pada akhir program (atau sebesar 2 persen per tahun). 2) Sekitar 70 persen nelayan/penerima manfaat merasa bahwa COREMAP berdampak positif terhadap kesejahteraan dan status sosial ekonomi masyarakat, terutama nelayan (*beneficiary*) di lokasi program. (World Bank, Project Appraisal Document, 2004).

Kajian evaluasi program COREMAP, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi permasalahan dan kendala pelaksanaan COREMAP di Kabupaten Buton.
- Mengkaji pemahaman masyarakat mengenai program COREMAP.
- Menggambarkan tingkat pendapatan masyarakat dan perkembangannya untuk memantau dampak program COREMAP terhadap kesejahteraan masyarakat.

Buku ini merupakan hasil kajian pelaksanaan Program COREMAP di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, terutama berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. Pembahasan dalam buku ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya tingkat pendapatan masyarakat serta memantau dampak Program COREMAP terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para *stakeholder* untuk perbaikan program selanjutnya, serta dapat dijadikan bahan evaluasi

bagi keberhasilan COREMAP di wilayah ini dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Data yang digunakan dalam buku ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian tentang Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton pada tahun 2006 dan 2008. Data primer meliputi data hasil survei terhadap sejumlah rumah tangga sampel dan data hasil wawancara dengan narasumber. Data sekunder adalah dokumen dan hasil publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya.

Buku ini terdiri dari 6 bab, yang diawali dengan bab pendahuluan (Bab I) dan diakhiri dengan bab penutup (Bab VI). Ketiga bab lainnya yaitu Bab II, III, IV dan Bab V adalah analisa hasil kajian.

Bab II menguraikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Fokus pembahasan pada perkembangan penduduk, pendidikan dan keterampilan, pekerjaan dan kesejahteraan penduduk. Perkembangan keadaan sosial ekonomi masyarakat di lokasi penelitian tersebut dilihat selama periode 2006-2008. Selanjutnya pada Bab III mengkaji potensi dan pengelolaan sumber daya laut.

Bab IV mengkaji tentang Program COREMAP dan implementasinya di tingkat kabupaten dan di lokasi kajian yaitu di Kecamatan Mawasangka (Desa Terapung dan Desa Wakambangura). Inti tulisan pada bab ini adalah pelaksanaan COREMAP dan permasalahannya, serta hasil survei tentang pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan COREMAP di lokasi tersebut

Bab V mengkaji tentang pendapatan penduduk dan perubahannya, berdasarkan hasil survei. Bab ini terutama mengkaji pendapatan penduduk dan perubahannya (2006-2008), serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan penduduk (COREMAP dan lainnya).

Bab akhir yaitu Bab VI merupakan penutup yaitu benang merah dari hasil kajian di Kabupaten Buton dan beberapa rekomendasi sebagai masukan untuk perbaikan program COREMAP ke depan.



BAB II

KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

Kecamatan Mawasangka merupakan 1 dari 7 kawasan binaan COREMAP yang lokasinya di wilayah bagian barat Kabupaten Buton, tepatnya berada di Pulau Muna. Wilayah Kecamatan Mawasangka, terutama Desa Terapung dan Wakambangura meliputi wilayah pesisir yang berada di sepanjang pantai dan wilayah pedalaman. Sebagian besar wilayah pesisir merupakan wilayah permukiman penduduk dan selebihnya merupakan wilayah pedalaman yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan (mete) dan pertanian tanaman pangan (jagung, ubi, pisang). Wilayah perairan dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk yaitu menangkap ikan dan budi daya rumput laut. Bagian ini akan membahas kondisi sosial ekonomi penduduk di daerah penelitian.

2.1. Perkembangan Penduduk

Desa Terapung adalah salah satu desa pesisir di Kecamatan Mawasangka yang lokasinya sekitar 17 km dari pusat kecamatan. Berdasarkan data terakhir yang dimiliki (Kecamatan Mawasangka Dalam Angka tahun 2004), jumlah penduduk Desa Terapung sebanyak 1.973 jiwa (laki-laki 1.007 jiwa dan perempuan 966 jiwa) atau sekitar 7 persen dari jumlah penduduk kecamatan, . . , atau rasio jenis kelamin sebesar 96. Penduduk ini tersebar di tiga dusun (Waburense, Kaudani dan Terwani), mempunyai 466 rumah tangga , sehingga rata-rata penduduk per rumah tangga sebanyak 4 orang (Kantor Statistik, 2005). Berdasarkan komposisi umur, penduduk Desa Terapung seperti juga di Kecamatan Mawasangka pada umumnya, tergolong penduduk muda, karena proporsi terbesar penduduk (sekitar 38 %) merupakan kelompok umur muda (0-14 tahun). Jumlah penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) cukup banyak

yaitu 73 orang. Angka beban ketergantungan sebesar 87 menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15-64) menanggung beban sebanyak 87 orang (anak-anak dan lanjut usia).

Penduduk Desa Terapung terdiri dari beragam suku bangsa. Mayoritas penduduk adalah suku Bajo, sehingga bahasa Bajo dipergunakan sebagai bahasa persatuan. Suku suku lainnya yang mendiami kawasan ini adalah Buton, Muna, Bugis, Makasar, Minang, Jawa, dan Cina. Perkawinan campur antara penduduk asli dengan suku lainnya sudah lama terjadi, seperti antara suku Bajo dengan Suku Muna atau Bajo dengan Suku Buton. Masyarakat Bajo yang tinggal di desa ini adalah keturunan dari perkawinan antarsuku tersebut. Bahkan keberadaan beberapa suku baru di desa ini terjadi karena proses perkawinan antara masyarakat yang tinggal di desa dengan pendatang yang berasal dari suku lain, seperti Minang dan Bugis. Seorang informan yang sudah lama menetap di daerah tersebut menuturkan bahwa pada awalnya desa ini bernama Desa Kaudani yang merupakan tempat permukiman masyarakat Bajo. Namun berdasarkan buku RPTK Desa Terapung (COREMAP Kabupaten Buton, 2006), nama awal desa ini adalah Waburense yang berdiri pada tahun 1987. Pada tahun 1987, pemerintah Kabupaten Buton melakukan *re-settlement* yaitu masyarakat Bajo yang masih tinggal di laut dipindahkan ke daratan, dengan membuat permukiman di sepanjang pantai. Jumlah penduduk pada saat itu sekitar 250 KK. Namun sebagian orang Bajo yang tidak betah tinggal di daratan, kembali tinggal di laut, dan hanya sekitar 25 persen yang masih tinggal di darat. Perkembangan penduduk selanjutnya dipengaruhi oleh kedatangan orang luar ke desa ini dengan tujuan berkebun. Penduduk Desa Terapung menjadi berkembang setelah adanya perkawinan antara masyarakat Bajo yang masih tinggal di darat dengan suku lainnya. Bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat Desa Terapung untuk saling berkomunikasi adalah Bahasa Bajo yang hampir sama dengan Bahasa Bugis.

Desa Wakambangura mempunyai jumlah penduduk sekitar 1.488 jiwa. Berbeda dengan Desa Terapung, di desa ini jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki, yaitu 757

orang perempuan dan 731 orang laki-laki atau rasio jenis kelamin 103 (Kecamatan Mawasangka Dalam Angka, 2004). Penduduk tersebut tersebar pada 346 rumah tangga dengan rata-rata penduduk per rumah tangga sebesar 4 orang. Berdasarkan komposisi umur, penduduk Desa Wakambangura termasuk dalam struktur penduduk muda dengan proporsi penduduk umur muda (0-14 tahun) sebesar 45 persen. Penduduk yang tergolong usia produktif (15-64) tahun sebesar 53 persen. Angka beban ketergantungan keluarga di Desa Wakambangura tidak berbeda dengan Desa Terapung yaitu sebesar 87 per 100 penduduk.

Mayoritas penduduk Desa Wakambangura termasuk dalam kelompok etnis Wasilomata (99%), selebihnya adalah suku Bajo dan Bugis. Menurut penuturan informan (tetua adat), etnis Wasilomata adalah sekelompok masyarakat yang nenek moyangnya berasal dari tentara Kerajaan Buton. Selain tinggal di Desa Wakambangura, etnis ini juga tersebar di desa lain Kecamatan Mawasangka. Hasil survei tahun 2008 di kedua desa kajian (Terapung dan Wakambangura) menunjukkan dari 100 rumah tangga sampel terdapat 684 orang anggota rumah tangga (ART), dengan jumlah penduduk laki-laki (346) sedikit lebih banyak dari perempuan (338) atau rasio jenis kelamin 102 per 100. Dari 100 rumah tangga yang dijadikan sampel, jumlah ART menurut kajian tahun 2008 jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2006 (selisih 130 jiwa), meskipun mayoritas sampel rumah tangga sama untuk tahun 2006 dan 2008. Tabel 3.1 menunjukkan komposisi ART menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

Proporsi penduduk muda (0-14 tahun) tahun 2008 relatif tinggi yaitu sekitar 42 persen atau meningkat 6 persen dibandingkan data sebelumnya yaitu sekitar 36 % (tahun 2006). Peningkatan ini mungkin berasal dari tambahan ART dalam 2 tahun (kelahiran atau kembali dari rantau) maupun jumlah ART dari sampel pengganti yang memang jumlahnya lebih banyak. Hal ini dapat dilihat dari proporsi anak balita (0-4 tahun) yang besarnya sekitar 16 persen atau 2 persen lebih tinggi dari kelompok yang sama pada tahun 2006. Sebaliknya untuk kelompok lansia, proporsi tahun 2008 lebih rendah 1,5 persen

dari 2 tahun sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan beban tanggungan keluarga relatif sama, karena proporsi kelompok usia produktif (15-64) hampir sama. Proporsi penduduk usia muda (0-4 tahun) yang relatif tinggi, mengindikasikan tingkat kelahiran yang relatif tinggi di daerah ini. Demikian juga penduduk usia (5-14 tahun) yang relatif tinggi yaitu 25,5 persen (sekitar 21,5 % tahun 2006). Hal ini perlu diperhatikan karena terkait dengan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar dan menengah di Kecamatan Mawasangka.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk (Rumah Tangga Sampel) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Desa Wakambangura dan Terapung (2008)

Kelompok Umur	Jenis Kalamın		Total Penduduk (ART)	
	Laki-Laki	Perempuan	2008	2006 *)
0-4	17,3	14,8	16,1	14,4
5-9	11,8	15,7	13,7	11,4
10-14	11,8	11,8	11,8	10,1
15-19	7,5	10,1	8,8	11,2
20-24	9,5	8,0	8,8	11,7
25-29	7,5	8,9	8,2	9,9
30-34	7,5	4,4	6,0	6,1
35-39	5,5	7,7	6,6	6,3
40-44	4,9	4,7	4,8	4,7
45-49	4,6	4,7	4,7	4,2
50-54	4,0	2,4	3,2	2,2
55-59	3,2	2,7	2,9	2,0
60-64	1,2	1,2	1,2	2,9
65+	3,5	3,0	3,2	2,9
Jumlah	100 (346)	100 (338)	100 (684)	100 (554)

Sumber: Data Primer, Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK-LIPI 2008.

*) Diambil dari hasil survei Kab. Buton, 2006.

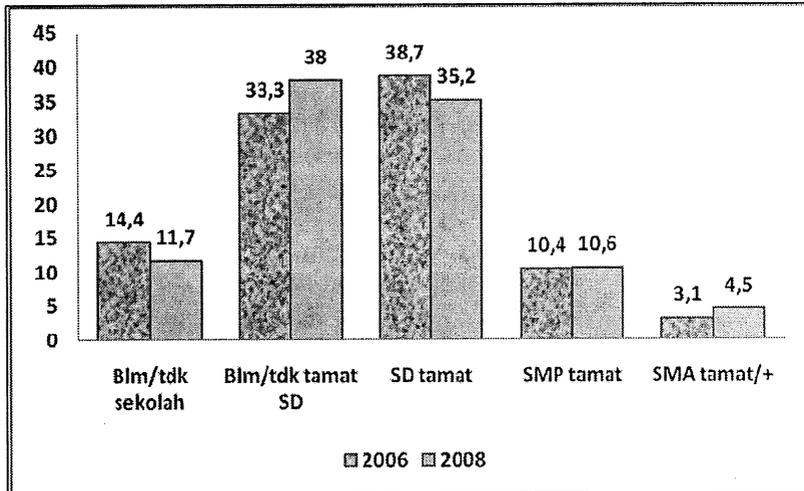
2.2. Pendidikan dan Keterampilan

Tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Mawasangka, khususnya di kedua lokasi kajian, relatif masih rendah, yaitu mayoritas berpendidikan SD atau kurang. Hal ini terutama disebabkan

tingkat putus sekolah yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil survei COREMAP tahun 2005, tingkat putus sekolah di Desa Wakambangura mencapai sekitar 41 persen (RPTK Wakambangura, 2006). Salah satu penyebab putus sekolah adalah fasilitas pendidikan yang minim dan rendahnya dorongan orang tua untuk sekolah.

Hasil survei tahun 2008 terhadap 100 rumah tangga terpilih di kedua lokasi kajian (Desa Terapung dan Wakambangura) menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu lebih dari 80 persen penduduk yang berusia 7 tahun ke atas hanya berpendidikan SD tamat atau kurang, dan kurang dari 5 persen yang tamat SLTA/ lebih. Proporsi penduduk yang berpendidikan SLTP ke atas di Desa Terapung lebih tinggi daripada di Wakambangura (masing-masing 17 dan 13 %), dan sebaliknya untuk yang berpendidikan rendah (belum tamat SD), proporsi di Wakambanguran lebih tinggi (sekitar 42%) dibandingkan Terapung (sekitar 35%). Selama 2 tahun terakhir (2006-2008), pendidikan ART dari rumah tangga sampel relatif meningkat, terutama pada kelompok ART yang belum sekolah dan kelompok yang belum tamat SD. Indikasi peningkatan pendidikan adalah menurunnya proporsi kelompok yang belum sekolah secara mencolok dari 29 persen (2006) menjadi 11,7 persen (2008). Sebaliknya proporsi ART yang tamat SD meningkat tajam dari 23 menjadi 38 persen selama 2006-2008. Demikian pula ART yang berpendidikan SLTA atau lebih, meskipun selama 2 tahun terakhir proporsinya meningkat lebih dari 2 kali lipat (2 menjadi 4,5 persen), jumlah tamatan SMA relatif kecil. Di Desa Terapung hanya ada beberapa orang saja yang berpendidikan SMA atau masih sekolah SMA. Peningkatan pendidikan ini wajar karena banyak ART yang masih berusia sekolah, sehingga dalam 2 tahun terakhir, pendidikan juga meningkat untuk semua jenjang pendidikan, kecuali tingkat SLTP tamat yang cenderung menurun, meskipun relatif kecil (1,4%) (lihat Grafik 2.1.).

Grafik 2.1. Perubahan Tingkat Pendidikan ART (7 tahun ke atas) di Desa Terapung dan Wakambangura tahun 2006-2008 (Persen)



Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LIPI, 2006
 Data Primer, Survei BME, Aspek Sosial Ekonomi, PPK-LIPI, 2008
 N (2006) = 554. N (2008) = 684

Selama dua tahun terakhir (2006-2008), tidak ada perubahan yang berarti untuk sarana pendidikan, terutama di kedua lokasi kajian. Perubahan sarana pendidikan terjadi di Kecamatan Mawasangka. Pada tahun 2007 pemerintah kecamatan mendapat bantuan sarana fisik berupa 2 sekolah SMP di Desa Napa dan Matura. Dananya berupa *block grant* berasal dari pemerintah Australia yang diserahkan pada Diknas Kabupaten. Sedangkan bantuan hibah berupa SMK baru direncanakan di pusat kecamatan pada tahun 2008. Rencana COREMAP untuk membangun sebuah Madrasah Tsanawiyah di Desa Terapung, sampai kajian dilakukan proses bangunan belum selesai karena dananya masih kurang 50 juta rupiah.

Selanjutnya dilihat dari jenis keterampilan penduduk, pada umumnya jenis keterampilan yang dimiliki masih terkait dengan jenis pekerjaan yang banyak melibatkan penduduk di wilayah tersebut. Seperti di Desa Wakambangura, keterampilan yang dominan berkaitan dengan pekerjaan budi daya rumput laut. Banyak penduduk dilibatkan pada pekerjaan budi daya rumput laut, terutama ketika masa panen dan proses penanaman kembali rumput laut. Kaum laki-laki umumnya melakukan bagian pekerjaan yang di laut (memetik dan menanam kembali), sementara anak-anak dan perempuan menyelesaikan bagian pekerjaan di darat (pengikatan bibit agar ke tali rafia). Untuk menyelesaikan pengikatan bibit rumput laut, diperlukan kecepatan dan kerapian dalam mengikat, karena harus selesai dalam waktu tertentu. Banyak anak-anak dan kaum perempuan dewasa yang selalu terlibat dalam pekerjaan tali menali ini, baik milik sendiri maupun milik orang lain, sehingga mereka menjadi terampil dalam pekerjaannya. Umumnya keterampilan tersebut diperoleh secara alami dari kedua orang tua atau dari orang dewasa yang juga terlibat dalam pekerjaan budi daya. Semakin terampil anak-anak dalam pekerjaannya, semakin banyak hasil yang diperoleh, sehingga upah yang diterima anak-anak juga semakin banyak. Di Desa Terapung, keterampilan yang menonjol terkait dengan sumberdaya laut adalah dalam pengolahan kepiting di *basecamp* yang berada di Terapung. Banyak anak-anak remaja (umumnya perempuan) yang terlibat pekerjaan borongan mengolah kepiting, sesuai dengan tahapan proses seperti merebus, mengupas, sortir, mencongkel daging sampai pengepakan, yang semuanya memerlukan keterampilan dan kecepatan dalam bekerja. Keterampilan tersebut diperoleh dari bos pengolahan kepiting yang melakukan pelatihan lebih dulu sebelum bekerja.

2.3. Pekerjaan

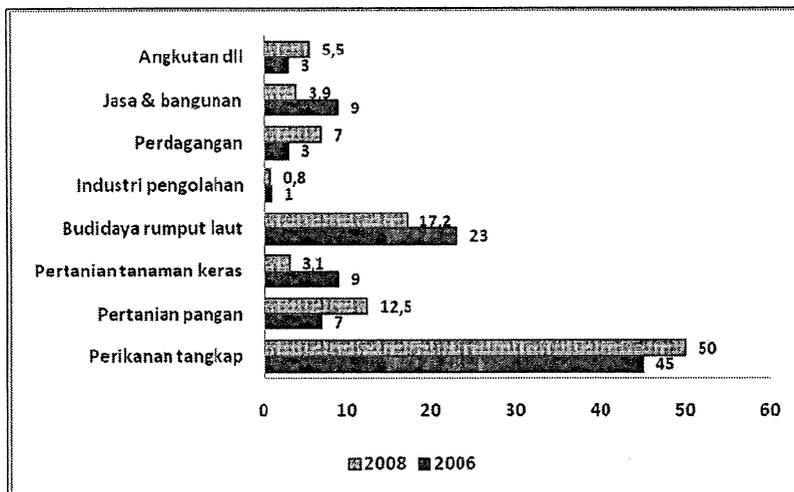
Sebagai daerah pantai, mata pencaharian utama penduduk kedua lokasi terkait dengan sumberdaya laut, yaitu sebagai nelayan tangkap. Di Desa Terapung, kebanyakan masyarakat Bajo sebagai masyarakat yang sudah akrab dengan kehidupan laut bekerja sebagai nelayan murni. Pada awalnya, sebagai masyarakat yang semula hidup di

tengah laut, dan tidak memiliki sumberdaya darat, maka sumber kehidupan hanya berasal dari laut. Hasil laut yang ditangkap adalah jenis ikan yang ditangkap dengan alat tangkap bagan, jaring dan pancing. Sementara masyarakat yang berasal dari suku lain, seperti Buton, Muna, Bugis di samping melakukan pekerjaan sebagai nelayan tangkap juga melakukan pekerjaan lainnya seperti petani (berkebun), pedagang pegawai dan berdagang. Dusun Air Wajo di Desa Terapung, adalah salah satu dusun yang sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani kebun. Sebagian penduduk Desa Terapung juga biasa pergi merantau ke daerah lain di Indonesia Timur bahkan ke Malaysia sebagai TKI. Disinyalir pada tahun 1995 sebanyak 200 orang masyarakat Desa Terapung merantau ke Malaysia.

Pola yang sama juga terdapat di Desa Wakambangura, mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan. Kegiatan pemanfaatan hasil laut oleh masyarakat Desa Wakambangura dilakukan dalam 3 bentuk yaitu penangkapan kawasan laut dalam, penangkapan kawasan laut dangkal dan budidaya rumput laut (RPTK, 2006). Mata pencaharian masyarakat Wasilomata (etnis terbesar di Wakambangura) selain mengandalkan hasil laut, juga mempunyai hasil lahan darat yaitu 'batu tanam', berupa hasil kelapa dan kacang mete. Masyarakat desa ini banyak yang pergi merantau ke Malaysia, Kalimantan (Balikpapan), Ambon, Sulawesi (Luwu). Bahkan jumlah etnis tersebut di Balikpapan cukup besar (sekitar 8000 orang), sehingga terdapat 2 macam paguyuban, yaitu Kerukunan Keluarga Wasilomata Buton (KKWB) dan Kerukunan Keluarga Buton (KKB). Berdasarkan informasi, jumlah warga desa ini yang merantau ke Malaysia mencapai lebih dari 100 orang.

Selama 2 tahun terakhir (2006-2008) tidak banyak terjadi perubahan pada pola lapangan pekerjaan, namun perubahan terjadi pada besarnya proporsi masing-masing lapangan pekerjaan baik pada pekerjaan utama maupun tambahan. Pergeseran pekerjaan utama dan tambahan selama 2 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut (Grafik 2.2 dan 2.3).

Grafik 2.2. Perubahan Lapangan Pekerjaan Utama KRT di Terapung dan Wakambangura Tahun 2006-2008 (%)



Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LIPI, 2006
 Data Primer, Survei BME, Aspek Sosial Ekonomi, PPK-LIPI, 2008

Selama periode 2006-2008, terjadi pergeseran lapangan pekerjaan utama KRT, yaitu semakin besar proporsi KRT yang bekerja di lapangan pekerjaan tertentu seperti perikanan tangkap (meningkat 5%), pertanian pangan (meningkat 5,5%), dan perdagangan (4%). Sebaliknya proporsi KRT menurun pada lapangan kerja seperti petani tanaman keras (turun sekitar 6%), budi daya agar (turun sekitar 5%) dan jasa&bangunan (turun sekitar 5%)(Grafik 2.2). Pergeseran lapangan pekerjaan ini dipengaruhi antara lain oleh pergantian musim (misal nelayan tangkap dan budi daya, pertanian pangan dan tanaman keras) atau perubahan dinamika ekonomi (seperti meningkatnya hasil tangkapan dan meningkatnya pedagang ikan). Lapangan pekerjaan baru yang muncul pada tahun 2008 hanya angkutan (1,6%), mungkin dipengaruhi oleh meningkatnya

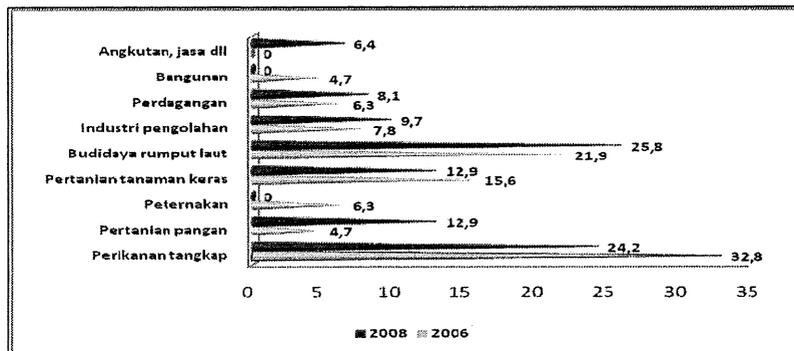
kemampuan untuk membeli aset produk seperti sepeda motor, yaitu dari 26 menjadi 44 unit (meningkat sekitar 69%).

Kondisi yang hampir sama terjadi pada perubahan lapangan pekerjaan tambahan KRT selama 2006-2008. Pada umumnya lapangan pekerjaan tambahan yang digeluti sama dengan pekerjaan utama, mayoritas sebagai nelayan tangkap dan budidaya rumput laut. Pola pergeseran juga terjadi pada lapangan pekerjaan tambahan KRT. Sebaliknya dengan perubahan pada pekerjaan utama, proporsi KRT yang terlibat pekerjaan tambahan sebagai nelayan tangkap turun sekitar 7 persen selama 2 tahun terakhir, sementara sebagai nelayan budidaya rumput laut meningkat sekitar 4 persen. Pekerjaan sampingan KRT lain yang agak menonjol adalah sebagai petani tanaman keras, yaitu masing-masing sekitar 16 persen (2006) dan 13 persen (2008), serta sebagai buruh industri pengolahan yang juga relatif tinggi yaitu 8 persen (2006) dan 10 persen (2008). Sebagai pekerjaan utama, proporsi KRT pada kedua lapangan pekerjaan ini relatif rendah, terutama sebagai buruh di industri pengolahan (sekitar 1 % selama 2 tahun terakhir). Padahal mayoritas industri sedang di Kabupaten Buton berlokasi di Kecamatan Mawasangka. Sebagai ilustrasi, selama tahun 2005-2006 jumlah industri sedang di Buton meningkat dari 19 ke 29 unit, 24 unit diantaranya berada di Kecamatan Mawasangka (BPS, 2006). Meskipun demikian proporsi KRT yang melakukan pekerjaan ini sebagai pekerjaan utama relatif kecil, karena mayoritas tidak biasa melakukan pekerjaan sebagai buruh. Kemungkinan selama musim angin barat, mereka tidak melaut dan sebagian anak-anak muda terpaksa melakukannya sebagai pekerjaan tambahan, karena membutuhkan penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Sebagian penduduk lainnya pergi merantau untuk berdagang atau tenaga jasa. Sebagian lainnya berkebun untuk 'mencari sayur' atau pekerjaan apa saja yang dapat menambah penghasilan.

Perubahan lapangan pekerjaan KRT lainnya adalah munculnya KRT yang melakukan pekerjaan tambahan sebagai tenaga jasa angkutan, jasa kemasyarakatan dan lain-lain pada tahun 2008 sekitar 6 persen, sementara pada tahun 2006 tidak ada yang melakukannya. Sebaliknya proporsi pekerja bangunan dan peternakan yang pada

tahun 2006 sebesar 11 persen, pada tahun 2008, tidak ada lagi yang melakukannya (Grafik 2.3).

Grafik 2.3. Perubahan Lapangan Pekerjaan Tambahan KRT di Terapung dan Wakambangura Tahun 2006-2008 (Persen)



Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LIPI, 2006

Data Primer, Survei BME, Aspek Sosial Ekonomi, PPK-LIPI, 2008

2.4. Kesejahteraan Penduduk

Perubahan-perubahan kegiatan ekonomi dan pendapatan rumah tangga selama 2 tahun terakhir, diharapkan berdampak pada kesejahteraan penduduk di kedua daerah kajian. Pada bagian ini perubahan kesejahteraan penduduk dapat diketahui dari 2 aspek: 1) pemilikan dan penguasaan aset produksi dan aset non-produksi oleh rumah tangga responden; 2) Kondisi permukiman dan sanitasi lingkungan. Pembahasan tentang kesejahteraan penduduk dan perubahannya terutama berdasarkan data survei yaitu dengan membandingkan pemilikan dan penguasaan aset produksi dan non-produksi pada tahun 2006 dan 2008 dan perubahan yang dapat diamati selama penelitian lapangan.

Pemilikan dan Penguasaan Aset Produksi dan Non-Produksi

Pemilikan dan penguasaan aset produksi dalam kajian ini meliputi pemilikan dan penguasaan sarana dan prasarana yang digunakan responden untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti peralatan untuk menangkap ikan (perahu motor, perahu tempel dan perahu tanpa motor, dan alat-alat penangkap ikan), prasarana pertanian (seperti lahan pertanian, tambak, dan keramba) dan alat transportasi komersial. Semakin banyak pemilikan dan/atau penguasaan sarana dan prasarana produksi oleh keluarga, juga mencerminkan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh penghasilan yang lebih banyak, sehingga kehidupan diharapkan akan lebih sejahtera.

Data tentang pemilikan dan penguasaan aset produksi selama 2006-2008, menunjukkan kecenderungan meningkatnya kesejahteraan rumah tangga responden di kedua lokasi kajian. Hampir semua aset produksi meningkat jumlahnya, terutama sarana dan prasarana untuk menangkap ikan. Meningkatnya pemilikan sarana dan prasarana produksi seperti perahu motor dalam, motor tempel, bagan, jaring, pancing dan bubu, memungkinkan keluarga nelayan untuk meningkatkan perolehan tangkapan ikan, sehingga kesejahteraannya juga semakin meningkat (Tabel 2.2).

Tabel 2.2. Pemilikan dan Penguasaan Rumah Tangga Terhadap Aset Produksi di Desa Terapung dan Wakambangura Tahun 2006-2008

Jenis aset produksi	2006 (Unit)	2008 (Unit)	Perubahan (%)
Perahu motor dalam	30	48	+ 60
Perahu tempel	14	26	+ 86
Perahu tanpa motor	28	40	+ 43
Keramba	4	4	-
Bagan	36	44	+ 22
Bubu	169	172	+ 2
Jaring	34	120	+ 253
Pancing rawai	83	114	+ 37
Tambak *)	3	1	- 66
Transport komersial	4	4	-

Lahan budi daya	2	28,02	+ 1300
Lahan perkebunan *)	108,2	61,5	-43
Total N	100	100	

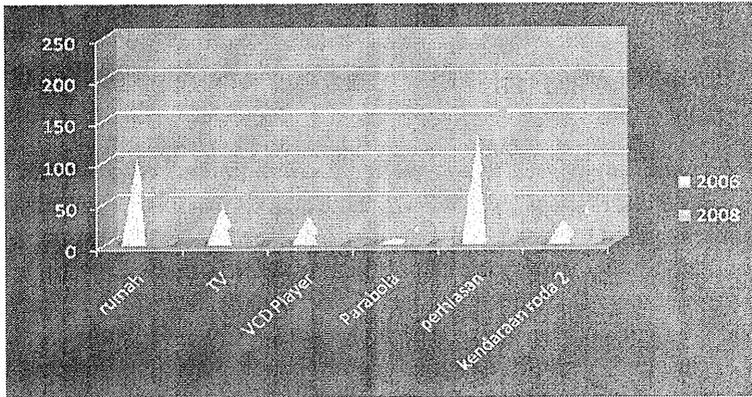
Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LIPI 2006
 Data Primer, Survei BME, Aspek Sosial Ekonomi PPK-LIPI, 2008

Perubahan aset produksi yang paling menonjol adalah meningkatnya sarana dan prasarana untuk penangkapan ikan, terutama jaring yang meningkat lebih dari 3 kali lipat (253%). Demikian pula lahan budi daya rumput laut yang meningkat dengan tajam selama 2 tahun terakhir, terutama di Desa Wakambangura yang merupakan sentra produksi rumput laut di Kecamatan Mawasangka. Aset produksi yang cenderung menurun adalah tambak dan lahan perkebunan, kemungkinan besar disebabkan seorang pemilik kebun dengan luas lahan sekitar 40 ha, tidak termasuk lagi sebagai responden, karena pindah atau sudah meninggal, sehingga diganti responden lain (tetangga) yang tidak memiliki tambak atau kebun. Diakui oleh banyak nelayan bahwa dalam 2 tahun terakhir, populasi ikan makin meningkat, dan harga ikan karang juga semakin menguntungkan. Indikasi yang dapat diamati adalah makin ramainya 'papalele' (pedagang ikan) yang selalu berada di pantai pagi hari untuk menunggu nelayan turun dari laut. Apakah meningkatnya aset produksi ini berpengaruh terhadap peningkatan pemilikan barang-barang non produksi yang biasa dikonsumsi keluarga seperti rumah, TV, VCD, perhiasan, dan kendaraan?

Pemilikan dan penguasaan aset non-produksi (atau barang konsumsi) adalah barang-barang yang biasanya dimiliki oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sekunder keluarganya. Semakin banyak aset non-produksi yang dimiliki suatu keluarga, biasanya merupakan indikasi meningkatnya kesejahteraan hidup keluarga tersebut. Pemilikan aset non-produksi biasanya dipengaruhi antara lain oleh pemilikan aset produksi dan pola konsumsi keluarga/masyarakat, dalam arti makin meningkat penghasilan suatu keluarga biasanya pemilikan barang-barang konsumtif juga meningkat.

Berdasarkan data tentang pemilikan beberapa aset non-produksi dalam 2 tahun terakhir, semakin membuktikan adanya peningkatan kesejahteraan keluarga di kedua daerah penelitian. Selama 2 tahun terakhir, semua item barang-barang non-produksi menunjukkan peningkatan jumlah yang cukup signifikan, terutama barang-barang elektronik (untuk hiburan), perhiasan emas dan kendaraan (Grafik 2.4).

Grafik 2.4. Pemilikan dan Penguasaan Rumah Tangga Terhadap Aset Non-Produksi di Desa Terapung dan Wakambangura Tahun 2006-2008



Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LIPI 2006

Data Primer, Survei BME, Aspek Sosial Ekonomi PPK-LIPI, 2008

Peningkatan aset yang paling mencolok adalah pemilikan perhiasan emas, yang meningkat sekitar 70 persen. Biasanya rumah tangga memilih membeli perhiasan apabila pendapatan meningkat, karena selain dapat meningkatkan status sosial mereka, juga sekaligus sebagai tabungan yang mudah dijual apabila diperlukan untuk tambahan modal. Barang konsumtif lainnya yang meningkat cukup tinggi adalah barang elektronik seperti pemilikan TV, VCD dan parabola, yang masing-masing meningkat lebih dari 70 persen. Kendaraan bermotor merupakan sarana penting di lokasi kajian,

karena transport umum belum tersedia sampai ke desa. Mobilitas mereka umumnya dengan sepeda motor baik milik sendiri ataupun menggunakan jasa ojek. Peningkatan pemilikan motor dari 5 unit menjadi 20 unit, cukup signifikan (4 kali lipat), karena selain dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan keluarga, juga semakin mudah diperoleh dengan membayar secara kredit. Menurut infomasi dari seorang informan (tokoh masyarakat), pada umumnya penerima kiriman dari para perantau biasa digunakan untuk membeli/merenovasi rumah atau membeli kendaraan roda dua. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dalam 2 tahun terakhir juga dapat diamati selama penelitian, terutama semakin banyaknya kendaraan bermotor di kedua lokasi kajian. Demikian pula dari kegiatan jual beli di pasar-pasar tradisional yang bergilir di desa-desa, selalu ramai dikunjungi pembeli. Berdasarkan informasi dari para informan, diakui bahwa terjadi peningkatan usaha perdagangan dan semakin bervariasinya jenis barang dagangan, menunjukkan meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat. Hal ini juga nampak pada animo masyarakat yang relatif besar untuk meminjam dana bergulir dari COREMAP maupun dana bergulir lainnya (seperti PNPM NP). Dana bergulir COREMAP untuk usaha ekonomi (UEP) baru dilaksanakan pada awal tahun 2008, dan sampai kajian dilakukan, cukup lancar pengembaliannya.

Kondisi Permukiman dan Sanitasi Lingkungan

Selama periode 2006-2008, tidak ada perubahan yang berarti dilihat dari permukiman penduduk, baik status pemilikan rumah maupun kondisinya. Berdasarkan data survei, rumah tangga yang memiliki rumah sendiri semakin meningkat meskipun relatif kecil yaitu meningkat sebanyak 11 unit (dari 102 menjadi 113 (atau sekitar 10 %), namun rata-rata rumah tangga hanya memiliki satu rumah per rumah tangga. Hanya ada beberapa responden yang memiliki lebih dari satu rumah, dan mereka yang belum mempunyai rumah sendiri umumnya menempati atau tinggal bersama orang tua atau keluarga lain. Demikian pula kondisi permukiman pada umumnya belum beranjak jauh dari kondisi semula, yaitu sebagian besar rumah tinggal

masyarakat berbentuk rumah panggung yang terbuat dari kayu dengan tiang penyangga dari kayu, terutama yang berlokasi di pinggir pantai. Namun demikian di Wakambangura sudah banyak rumah (terutama yang lokasinya di pinggir jalan) tidak lagi berbentuk rumah panggung, bahkan beberapa diantaranya, terutama rumah-rumah baru merupakan rumah pamanen. Rumah-rumah panggung, umumnya memanfaatkan ruang kosong di bawah rumah (kolong rumah) untuk melakukan berbagai kegiatan seperti memasak, memotong kayu dan melakukan kegiatan produksi (seperti mengikat rumput laut dan mengolah jambu mete). Berdasarkan pengamatan di lapangan, beberapa rumah sudah mengalami perbaikan atau penggantian bahan dinding dan lantai. Perumahan nelayan secara umum masih sederhana, meskipun sebagian juga sudah mengalami perbaikan atau perluasan ruangan. Sebagian besar rumah nelayan berbentuk rumah panggung yang terbuat dari papan dan atap yang umumnya terbuat dari seng. Meskipun kondisi beberapa rumah masih sangat memprihatinkan, baik ukurannya yang relatif kecil, maupun jenis bahan yang dipakai untuk dinding (papan) dan atapnya (rumbia). Namun demikian jumlah rumah yang mengindikasikan 'miskin' ini semakin berkurang jumlahnya, minimal tidak banyak lagi yang beratap rumbia.

Sebagian besar tempat tinggal penduduk di Desa Terapung terdiri dari rumah panggung yang terbuat dari kayu. Meskipun pola permukiman sudah tertata, namun kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal kurang terjaga kebersihannya. Keadaan ini dapat dilihat dari sampah yang dibuang sembarangan dan genangan air di sekitar perumahan. Sebagai dataran rendah, pada saat air pasang, air laut sering menggenangi permukiman masyarakat. Perumahan dan lingkungan masyarakat di Desa Wakambangura relatif lebih baik dibandingkan Desa Terapung. Tempat tinggal masyarakat Desa Wakambangura relatif lebih baik dan tertata rapi. Hampir semua masyarakat tinggal di daratan di sepanjang pantai sampai agak menjorok ke daratan. Bantuan COREMAP untuk fisik di Wakambangura berupa bangunan talut (penahan luapan air laut dari beton) sepanjang 124 meter di pantai selesai tahun 2008. Diharapkan ketika air laut pasang, genangan air ke jalan dan permukiman bisa berkurang, sehingga kebersihan pantai dan permukiman penduduk

lebih terjaga. Sedangkan di Desa Terapung bantuan fisik dari berbagai sumber relatif banyak karena keberhasilan kepala desa dalam me*Jobby* ke penyandang. Bantuan fisik dari program COREMAP terkait dengan lingkungan adalah pembuatan bak air (*block grant*), untuk penyediaan air bersih, yang selama ini jadi problem di Desa Terapung. Sedangkan bantuan pengadaan air bersih yang sedianya diterima oleh Desa Terapung tahun 2006, tidak selesai, sehingga tahun 2007 tidak mendapat bantuan fisik. Sebetulnya pipa PDAM sudah tersedia di beberapa desa termasuk Desa Wakambangura, dan direncanakan terealisasi pada tahun 2008 untuk Desa Wakambangura dan Napa.

Kebersihan lingkungan juga relatif semakin baik karena jarang terlihat sampah berserakan di sekitar tempat tinggal penduduk. Sampah masih kelihatan berserakan di tempat umum seperti pasar dan di tepi pantai.. Air bersih merupakan salah satu permasalahan bagi masyarakat di Kecamatan Mawasangka, terutama masyarakat di Desa Terapung dan Desa Wakambangura. Masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih terutama pada musim kemarau. Sumber air dari sumur masyarakat nelayan tidak bisa dikonsumsi karena rasanya agak asin. Air sumur hanya digunakan untuk mandi dan mencuci. Untuk keperluan air bersih masyarakat membeli dari penjual air bersih keliling dengan harga Rp. 2.500 per derijen. Pada musim hujan masyarakat menampung air hujan untuk keperluan sehari-hari. Sementara ini penyediaan air bersih dilakukan secara swadaya yaitu berasal dari mata air yang tersedia di lokasi.

Di Desa Terapung sumber air bersih yang relatif besar dapat diperoleh di lokasi yang agak jauh dari pemukiman penduduk. Lokasinya yang relatif jauh dan agak curam turun ke gua, menyebabkan relatif sulit dicapai, terutama di musim hujan (licin). Dari permukiman penduduk ke mata air tersebut dibutuhkan waktu sekitar 15 menit, menggunakan sepeda motor. Melalui program PPK, pada tahun 2006 pernah dilakukan pengaliran air dari sumber tersebut ke permukiman masyarakat dengan menggunakan pipa. Namun pipa tersebut kini dalam keadaan rusak, sehingga air tidak dapat dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Diluar musim hujan, kebutuhan air untuk

minum dan masak diperoleh dengan cara membeli atau mengambil dari sumber mata air tersebut. .

Jaringan listrik sudah dinikmati oleh sebagian besar penduduk Kecamatan Mawasangka, termasuk di kedua lokasi kajian, terutama untuk penerangan. Namun karena daya listrik dari PLN terbatas, di Desa Wakambangura baru sekitar 178 rumah tangga yang menggunakan listrik dari PLN, selebihnya menggunakan listrik dengan nyantol tetangga, atau memakai sumber penerangan dari swadaya masyarakat (genset). Jenis bahan bakar yang banyak digunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari adalah minyak tanah dan kayu bakar. Berbagai jenis kayu sangat mudah diperoleh di sekitar tempat tinggal. Penggunaan gas untuk kompor masih terbatas jumlahnya, namun dengan harga minyak tanah yang semakin mahal, akan semakin mendorong masyarakat menggunakan kompor gas.

Mayoritas penduduk belum memiliki sarana MCK (WC dan kamar mandi) sendiri. Sebagian kecil penduduk yang memiliki sarana tersebut umumnya terbatas pada rumah-rumah permanen dan para aparat desa. Masyarakat di lokasi kajian, terutama yang tinggal di tepi pantai, umumnya masih menggunakan laut sebagai tempat mandi dan WC. Demikian pula masih banyak penduduk yang menggunakan laut sebagai tempat pembuangan sampah dan limbah lainnya.

BAB III

POTENSI DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT

Wilayah Kecamatan Mawasangka, terutama Desa Terapung dan Wakambangura meliputi wilayah pesisir yang berada di sepanjang pantai dan wilayah pedalaman. Sebagian besar wilayah pesisir merupakan wilayah permukiman penduduk dan wilayah pedalaman yang umumnya dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan (mete) dan pertanian tanaman pangan (jagung, ubi, pisang). Wilayah perairan dimanfaatkan oleh hampir semua penduduk sebagai sumber mata pencaharian dengan menangkap ikan dan budidaya rumput laut.

3.1. Potensi Sumberdaya Laut

Wilayah laut di sekitar Kecamatan memiliki potensi terumbu karang yang cukup besar, terutama di Desa Wakambangura. Di sepanjang garis pantai Desa Wakambangura membujur terumbu karang yang menurut informasi dari masyarakat setempat merupakan karang terpanjang di Kabupaten Buton. Potensi karang juga terdapat di sekitar pulau-pulau kecil yang berada di wilayah perairan Kecamatan Mawasangka. Keberadaan karang ini menjadi tempat hidup berbagai jenis ikan (ikan karang), seperti ikan kerapu, ikan sunu dan sebagainya. Potensi sumberdaya laut (SDL) meliputi berbagai jenis ikan, biota laut dan rumput laut. Beberapa jenis ikan tangka antara lain ikan tongkol, cakalang, baronang, bobara, teri, kakap, kepiting, dan cumi. Jenis biota laut lainnya yang dimanfaatkan adalah teripang, bulu babi, siput laut, bintang laut, dan kerang laut.

Ikan teri adalah jenis ikan yang menonjol di Kecamatan Mawasangka. Pada tahun 2005, jumlah hasil tangkapan ikan teri di Kecamatan Mawasangka adalah sebanyak 6.037,20 ton atau 56 persen

dari hasil tangkapan laut lainnya (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2005). Ikan teri merupakan hasil tangkapan utama nelayan di Desa Terapung. Pada musim timur (bulan Mei-September) ikan teri ditangkap dengan menggunakan bagan . Berdasarkan informasi dari Kepala Desa Terapung, sekali musim jumlah produksi ikan teri di desa ini mencapai 420 ton, untuk memenuhi pemasaran ekspor dan dalam negeri. Produksi ikan teri di desa ini didukung oleh keberadaan 9 buah *basecamp* atau industri pengolahan ikan teri dengan cara pengasinan dan pengeringan. Didukung oleh sistim pemasaran yang cukup bagus, ikan teri menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat Desa Terapung.

Kepiting merupakan hasil laut yang sangat potensial di wilayah perairan Mawasangka, terutama di Desa Terapung. Setelah teri kepiting merupakan hasil tangkapan utama nelayan di Desa Terapung. Penangkapan kepiting sepanjang tahun dengan menggunakan alat tangkap bubu. Seperti halnya ikan teri, hasil tangkapan kepiting dijual nelayan pada pengumpul kepiting yang sekaligus memiliki *basecamp* pengolahan kepiting.

Wilayah perairan Kecamatan Mawasangka sangat cocok untuk pengembangan rumput laut. Budidaya rumput laut di kecamatan ini paling besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya . Pada tahun 2005, jumlah produksi rumput laut di Kecamatan Mawasangka mencapai 4.072,2 ton atau sekitar 27 persen dari total produksi rumput laut kecamatan (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2006). Budidaya rumput laut dilakukan oleh hampir semua desa di Kecamatan Mawasangka. Kondisi pantai dengan kemiringannya dan arus air di sekitar pantai sangat cocok untuk usaha budidaya rumput laut. Desa Wakambangura adalah salah satu desa yang mayoritas nelayannya melakukan usaha budidaya rumput laut dan memiliki areal budidaya rumput laut paling luas dibandingkan desa lainnya, yaitu sekitar 145,9 Ha. Potensi rumput laut ini didukung oleh sistim pemasaran yang cukup bagus karena keberadaan beberapa pengumpul rumput laut di tingkat desa.

3.2. Wilayah Pengelolaan

Wilayah pengelolaan sumberdaya laut atau wilayah tangkap nelayan menunjukkan kawasan yang dimanfaatkan oleh nelayan untuk memperoleh hasil tangkapan sumber daya laut.. Secara umum, jangkauan wilayah tangkap sangat tergantung pada jenis armada dan alat tangkap. Armada tangkap kapal motor dengan kekuatan mesin cukup besar dapat menjangkau wilayah tangkap yang relatif jauh ke tengah laut. Sebaliknya kapal motor berkekuatan mesin kecil memiliki wilayah tangkap yang lebih dekat.

Masyarakat nelayan Kecamatan Mawasangka menangkap ikan di sekitar perairan Mawasangka, di lokasi terumbu karang hidup, sampai batas laut lepas di sekitar Pulau Kabaena yang berjarak sekitar 4 km atau sekitar 2 jam perjalanan dengan menggunakan perahu motor. Armada kapal motor yang digunakan nelayan memiliki kapasitas mesin relatif kecil, sehingga wilayah tangkap masih terbatas pada wilayah jarak 1 sampai 2 jam perjalanan atau paling jauh pada jarak 4 km di sekitar Pulau Kabaena. Untuk memaksimalkan hasil tangkapan maka penangkapan ikan dilakukan dengan cara berpindah-pindah ke tempat-tempat yang banyak ikan. Wilayah tangkap paling jauh dari garis pantai biasanya dilakukan oleh nelayan pancing yang menangkap ikan tuna. Nelayan pancing ikan karang biasanya menangkap ikan melewati batas wilayah desa lain, seperti nelayan Desa Terapung menangkap ikan sampai ke wilayah Desa Gumanano di sebelah utara. Sasaran karang adalah Karang Lanabatupateh, Pasitoropimpi dan Pasititinganga.

Wilayah tangkap paling dekat dilakukan oleh nelayan budidaya rumput laut, yang dilakukan di sepanjang pantai pada jarak sekitar 100 meter dari garis pantai. Hampir semua garis pantai di Kecamatan Mawasangka dengan struktur pantai yang landai, dikuasai oleh nelayan budidaya rumput laut. Penguasaan lahan pantai untuk budidaya rumput laut oleh masyarakat sudah lama dilakukan, sehingga mereka yang sejak awal sudah menguasai lahan tertentu, selanjutnya menjadi wilayah bawah penguasaannya. Aturan ini sudah berlaku dan diterima oleh masyarakat nelayan. Lahan tertentu yang dikuasai nelayan budidaya dapat dipinjamkan pada nelayan lain

dengan membuat kesepakatan antarkedua pihak. Perluasan areal untuk budidaya dapat dilakukan ke wilayah laut dalam.

Selama dua tahun (2006-2008) wilayah tangkap nelayan Desa Terapung maupun Desa Wakambangura tidak banyak mengalami perubahan. Wilayah tangkap masih berada di sekitar wilayah perairan selatan Pulau Muna sampai ke perairan Pulau Kabaena. Sebaliknya, nelayan dari luar kecamatan banyak melakukan penangkapan ikan di sekitar wilayah perairan Mawasangka. Menurut salah seorang informan (nelayan), perairan di sekitar Desa Terapung relatif dangkal, sehingga lebih mudah mendapatkan ikan. Selanjutnya beberapa informan menyatakan, sejak adanya program COREMAP, cara penangkapan ikan dengan menggunakan bom mulai berkurang, sehingga menyebabkan populasi ikan mulai meningkat. Kondisi ini banyak dimanfaatkan oleh nelayan dari luar untuk menangkap ikan di sekitar perairan Mawasangka. Menurut informasi, nelayan luar masih ada yang menggunakan obat bius untuk penangkapan ikan. Indikasinya dapat dilihat dari sisik ikan yang menjadi agak lunak, akibat obat bius.

3.3. Teknologi Penangkapan

Teknologi penangkapan ikan dapat diketahui dari jenis-jenis armada tangkap (kapal motor/perahu) dan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan Desa Terapung dan Desa Wakambangura. Berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan nelayan, teknologi penangkapan ikan oleh nelayan tidak banyak mengalami perubahan selama dua tahun terakhir. Armada tangkap dan alat tangkap yang digunakan nelayan relatif masih sederhana. Alat tangkap yang digunakan nelayan adalah bagan, pancing, jaring dan bubu (ikan dan kepiting) dan armada tangkap yang digunakan adalah kapal/perahu motor bermesin dalam dan perahu motor bermesin tempel atau *katingting* yang memiliki kapasitas mesin relatif kecil. Kapal motor yang digunakan nelayan memiliki kapasitas mesin antara 5-22 PK dengan ukuran body 5-10 GT. Perahu motor dengan mesin berukuran 22 -24 PK, biasanya digunakan pada bagan karena memiliki kemampuan besar untuk membawa bagan berpindah tempat. Perahu

dengan kemampuan mesin antara 16-22 PK, juga digunakan nelayan pancing atau bubu untuk menangkap ikan, dengan wilayah tangkap yang cukup jauh. Sementara itu, *katingting* yang memiliki ukuran mesin lebih kecil yaitu 5,5 PK dan ukuran *body* 2,5 sampai 7 meter, biasa digunakan oleh nelayan bagan, untuk mengangkut bagan dan membawa pulang hasil tangkapan ikan dari bagan.

Teknologi armada tangkap belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kemampuan modal nelayan untuk memperbarui kapal motor, baik kapasitas mesin maupun ukuran perahu motornya. Biaya satu unit perahu motor dengan kapasitas mesin yang biasa dipakai sekitar 12 juta rupiah, dan biaya perahu motor tempel atau *katingting* sekitar 10 juta rupiah per unit. Perahu motor merupakan modal utama bagi masyarakat nelayan, sehingga bagi anak muda yang berkeinginan untuk menjadi nelayan, biasanya mereka pergi merantau dulu ke Malaysia untuk mendapatkan modal. Setelah modal cukup, mereka pulang dan langsung membeli perahu motor, atau membuat kapal sesuai dengan kemampuan.

Jumlah alat tangkap yang dimiliki nelayan mengalami perubahan dalam dua tahun terakhir. Menurut informasi dari informan (aparatus desa), jumlah bagan di Desa Terapung mengalami penurunan dari sekitar 400 unit menjadi sekitar 220 unit. Penurunan ini disebabkan oleh mahalnya biaya perbaikan bagan untuk sekali masuk *doc* sehingga sebagian nelayan bagan beralih menggunakan bubu dan sebagian lainnya pergi merantau ke luar daerah (seperti Irian). Nelayan yang tidak memfungsikan bagan yang dimiliki dapat diketahui dari adanya drum plastik yang disimpan berjejer di bawah kolong rumahnya. Sementara penggunaan bubu kepiting oleh nelayan Desa Terapung mengalami peningkatan. Bubu yang banyak digunakan adalah bubu kawat karena lebih cepat memasang dan mengambilnya dari pada menggunakan bubu bambu. Penurunan jumlah *basecamp* teri juga terjadi di Desa Terapung dari 13 menjadi 9 unit dan *basecamp* kepiting dari 3 menjadi 2 unit. Berkurangnya jumlah *basecamp* disebabkan adanya *mismanagement* dalam pengelolaan *basecamp* tersebut. Penambahan jumlah keramba juga terjadi di kedua lokasi penelitian. Di Desa Wakambangura, terjadi penambahan

jumlah keramba ikan hidup dari 2 menjadi 9 unit.. Sementara di Desa Terapung yang sebelumnya tidak ada, kini terdapat seorang nelayan yang memiliki keramba galian dan juga menjadi pengumpul ikan karang hidup dari nelayan. Sebelumnya ikan hidup atau ikan karang (mati) yang diperoleh nelayan Desa Terapung dijual di pasar lokal untuk dikonsumsi. Penambahan jumlah keramba ini mencerminkan adanya peningkatan jumlah produksi ikan karang hidup dan peningkatan jumlah permintaan ikan hidup.

Bagan adalah alat tangkap yang digunakan oleh mayoritas nelayan di Desa Terapung untuk menangkap ikan teri. Jenis bagan yang digunakan oleh nelayan adalah Bagan Drom dan Bagan Sema. Bagan drom menggunakan perahu motor dilengkapi dengan jaring dan tiang-tiang kayu penyangga dan di bawahnya dijejerkan beberapa drom supaya jaring dapat terapung di atas air. Bagan Sema hampir sama dengan bagan drom, tetapi di samping kiri dan kanan perahu diberi tangan untuk menjaga keseimbangan. Bagan drom dan bagan sema digunakan oleh nelayan sejak tahun 2000, sebelumnya nelayan di Desa Terapung menggunakan Bagan Tancap. Salah satu kelemahan bagan tancap adalah lokasi bagan tidak bisa dipindah-pindah, sedangkan bagan drom dan bagan sema dapat dipindah-pindah sesuai dengan sasaran lokasi ikan. Penangkapan ikan teri dilakukan pada malam hari dengan menurunkan jaring. Untuk menarik ikan masuk ke dalam jaring, digunakan lampu petromak atau lampu diesel, dan jaring diangkat setelah ikan masuk. Mahalnya biaya pembuatan dan perawatan bagan, menyebabkan penambahan jumlah bagan di kalangan nelayan relatif kecil.

Pancing merupakan alat tangkap sederhana yang banyak digunakan oleh nelayan. Nelayan pancing biasanya pergi melaut setiap hari (pagi sampai sore) selama musim Timur. Sedangkan pada musim Barat, penangkapan ikan dengan pancing dilakukan di sekitar pantai. Sebagain nelayan pancing adalah juga nelayan bagan, nelayan bubu atau nelayan budidaya rumput laut. Mereka beralih menggunakan pancing terutama pada musim barat (di luar musim ikan teri dan rumput laut). Jenis pancing yang digunakan adalah pancing ulur, tonda dan rawai. Jenis ikan yang ditangkap dengan

menggunakan pancing adalah ikan karang, cumi dan ikan laut dalam (cakalang, tuna), yang disesuaikan dengan mata pancingnya. Pancing rawai menggunakan 50-100 buah mata pancing dilengkapi dengan besi pemberat pada ujung tali. Ikan rumah-rumah, ikan tembang, ikan kakap merah dan ikan karang adalah jenis ikan yang ditangkap dengan pancing rawai. Pancing tonda digunakan untuk memancing ikan tongkol dan cakalang. Pancing ini menggunakan 10-17 mata pancing dan tali nomor 500 sebanyak 1 gulung dan ditarik dengan tangan pada saat kapal motor dimatikan. Ukuran mata pancing dan jenis tali yang digunakan disesuaikan dengan besar kecilnya ikan. Untuk ikan kecil digunakan mata pancing dan tali ukuran kecil, sebaliknya mata pancing besar untuk ikan ukuran besar. Pancing juga dapat digunakan untuk menangkap cumi. Mata pancing dan umpan untuk menangkap cumi harganya lebih mahal.

Bubu adalah salah satu alat tangkap yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan dan kepiting. Nelayan di Desa Terapung menggunakan bubu untuk menangkap kepiting dan nelayan di Desa Wakambangura menangkap ikan karang dengan bubu. Berdasarkan bentuk bubu, terdapat beberapa macam bubu yaitu bubu setengah lingkaran dan bubu kotak. Bubu setengah lingkaran terbuat dari kawat dan jaring, dan digunakan untuk menangkap kepiting. Sedangkan bubu kotak banyak digunakan untuk menangkap ikan karang oleh nelayan di Desa Wakambangura. Pada tahun 2006, untuk membuat 100 unit bubu setengah lingkaran, dibutuhkan kawat sebanyak 1 kg 5 ons dan jaring 6 kg. Sekarang ini bubu kawat untuk kepiting semakin banyak di gunakan nelayan dibandingkan pemakaian bubu dari kayu. Pemakaian bubu kawat dianggap lebih mudah, yaitu dengan cara menenggelamkan bubu dengan bnatuan tali, demikian pula untuk mengambilnya dengan cara menarik talinya dan bubu bisa dilipat. Hasil kepiting yang diperoleh juga lebih banyak, karena bubu dapat diletakkan di dasar laut. Sementara penggunaan bubu kayu memerlukan waktu lebih lama, karena bubu harus diletakkan dan diangkat satu per satu.

3.4. Sarana dan Prasarana Kenelayanan

Sarana ekonomi yang tersedia di Kecamatan Mawasangka masih terbatas pada sarana pasar dan warung sembako. Di Kecamatan Mawasangka terdapat 4 buah pasar yang terdiri dari 3 pasar permanen dan 1 pasar tidak permanen. Ketiga pasar permanen yang dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat berlokasi di Desa Watolo, Terapung dan Wakambangura, dan satu pasar non permanen di Desa Tanailandu. Sebelumnya, pasar di Desa Wakambangura juga merupakan pasar non permanen, setelah dilakukan perbaikan pasar tahun 2008 melalui program PPK, statusnya berubah menjadi pasar permanen. Keberadaan pasar sangat penting dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, terutama sebagai tempat jual-beli hasil perikanan dan pertanian. Masing-masing pasar memiliki hari pasar yang berbeda, di Terapung hari pasar adalah Rabu dan Minggu, di Wakambangura pasar diadakan dua hari sekali dan pasar di Watolo (kota kecamatan) dua kali dalam seminggu. Perbedaan hari pasar di masing-masing lokasi mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli, karena mereka dapat ke pasar setiap hari, tergantung hari pasar lokasi tersebut. Ikan hasil tangkapan nelayan dijual di pasar-pasar yang tersedia di kota kecamatan melalui pedagang ikan atau 'papalele. Papalele membeli ikan langsung dari nelayan yang baru pulang dari laut dan selanjutnya dibawa ke pasar. Begitu juga hasil pertanian, seperti sayur-sayuran, jagung, pisang, dan ubi kayu. Selain pasar desa, sarana ekonomi lain yang cukup mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa adalah warung sembako. Jumlah warung sembako relatif sedikit, pada umumnya menyediakan 32 bahan pokok makanan yang tahan lama, seperti minyak, gula, kopi dan jenis makanan lainnya, bahkan warung-warung tersebut juga menjual bahan bakar solar dan minyak tanah untuk kebutuhan transportasi (motor) yang banyak dimiliki masyarakat.

Sebagai daerah yang didominasi masyarakat nelayan, maka sarana ekonomi yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan kenelayanan adalah dermaga, untuk tempat berlabuhnya kapal nelayan sekaligus sebagai Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Sampai kajian ini

dilakukan (2008), kedua sarana ekonomi ini belum tersedia di Desa Terapung maupun Wakambangura. Kemungkinan karena di sepanjang pantai kedua desa kajian terdapat karang yang cukup luas, sehingga menyulitkan pembangunan dermaga. Pada saat air surut akan terlihat hamparan batu karang yang cukup luas di sepanjang pantai. Selama ini nelayan berlabuh pada beberapa lokasi di pinggir pantai. Sarana ekonomi yang menunjang kegiatan kenelayanan adalah tersedianya tempat penjualan atau pengisian bahan bakar minyak (BBM) atau semacam SPBU kecil di Desa Terapung, untuk memenuhi kebutuhan kapal motor nelayan setempat. Pemilik SPBU kecil ini adalah salah seorang pengumpul ikan dan rumput laut di Kecamatan Mawasangka. SPBU ini mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan bahan bakar solar untuk nelayan di daerah ini. Sejauh ini belum ada keluhan nelayan mengenai ketersediaan bahan bakar minyak di daerahnya.

Tempat pelelangan ikan (TPI) belum tersedia di daerah penelitian maupun di tingkat kecamatan. Ikan hasil tangkapan nelayan dijual langsung pada masyarakat, melalui *papalele* dan pengumpul ikan di masing-masing desa. Di Desa Terapung, terdapat beberapa pedagang pengumpul ikan teri yang mendominasi hasil tangkapan nelayan di desa ini. Masing-masing pedagang pengumpul memiliki beberapa nelayan anggota yang rutin menjual hasil ikan teri pada pengumpul tersebut. Namun tidak tertutup kemungkinan bagi nelayan untuk menjual ikan pada pedagang pengumpul lainnya. Begitu juga untuk kepiting, terdapat beberapa pedagang pengumpul yang membeli kepiting langsung dari nelayan di Desa Terapung. Di tingkat pedagang pengumpul, ikan teri maupun kepiting diolah lebih dulu di desa, sebelum dijual ke pedagang besar di luar kota. Ikan teri diolah menjadi ikan teri asin atau tawar dan kering, sedangkan kepiting diolah menjadi kepiting rebusan yang sudah diambil dagingnya. Begitu juga di Desa Wakambangura, ada beberapa orang pedagang pengumpul rumput laut (n hasil nelayan yang dominan di samping ikan karang dan ikan pelagis). Ikan karang hidup dijual pada pedagang pengumpul besar di Desa Watolo, yaitu satu-satunya pengumpul ikan karang di Kecamatan Mawasangka. Meskipun belum ada TPI namun nelayan tidak mendapatkan masalah untuk memasarkan hasil

tangkap ikan dan rumput laut, karena pedagang pengumpul umumnya penduduk yang tinggal di lokasi tersebut.

Sarana ekonomi lainnya yang dapat menunjang kegiatan kenelayan adalah lembaga permodalan, seperti Koperasi. Lembaga Koperasi terdapat di Desa Terapung namun sudah tidak berfungsi lagi, disebabkan pengelolaan yang kurang maksimal dan macetnya pengembalian cicilan dari anggota. Hal ini disebabkan karena pola pengembalian koperasi yang rutin tidak sesuai dengan pola penerimaan pendapatan masyarakat nelayan yang bersifat musiman. Setiap bulan anggota koperasi harus mengembalikan cicilan, sementara pada musim barat banyak nelayan yang tidak mampu membayar cicilan, karena umumnya jarang melaut sehingga tidak memiliki penghasilan yang cukup. Lembaga/perorangan yang biasa meminjamkan modal biasa disebut 'bos' atau 'tauke' umumnya sebagai pedagang pengumpul. Di Desa Terapung terdapat 9 orang pedagang pengumpul ikan teri, yang juga sebagai 'bos' pemberi pinjaman pada nelayan, dan nelayan berkewajiban untuk menjual ikan padanya. Pembayaran dilakukan pada saat nelayan menjual ikannya pada pengumpul tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nelayan, keberadaan pedagang pengumpul cukup membantu nelayan dalam hal permodalan, karena di samping sebagai sumber modal, pengumpul juga dapat berfungsi sebagai tempat menyimpan uang nelayan. Pada saat musim bagan, sebagian nelayan yang menjual hasil tangkapannya pada pengumpul, tidak langsung mengambil uang hasil penjualannya, tetapi tetap disimpan oleh pengumpul dan diambil pada musim Barat, yaitu saat bagan masuk 'dok'. Di tingkat kecamatan terdapat satu orang pedagang pengumpul (Bp. L) yang memiliki anggota dari beberapa desa. Selain pinjaman uang, Bp. L juga memberi pinjaman peralatan tangkap seperti bagan, kompressor, dan bubu pada anggotanya. Sistem ini sudah berjalan lama, sehingga ketergantungan nelayan pada pedagang pengumpul cukup tinggi.

3.5. Program dan Kegiatan dalam Pengelolaan

Sumberdaya laut (SDL) merupakan salah satu sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir. Dengan demikian, pengelolaan sumberdaya laut perlu dilakukan agar potensinya tetap terjaga dan terdapat keberlanjutan sumber mata pencaharian penduduk. Berdasarkan pendanaannya, program pemerintah dapat dibedakan atas program dengan pendanaan APBD dan Non APBN (bekerja sama dengan pihak lain, seperti COREMAP, PNPM-NP, PNPM-LMP). Program yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya laut adalah salah satu program pembangunan pemerintah daerah yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat pesisir.

Program pengelolaan SDL yang berasal dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) adalah:

- Program Saver (Sustainable Development Poverty dan Poor Reduction), yaitu suatu program pengembangan pangan untuk mengurangi kemiskinan. Program ini akan dilakukan pada tahun 2008 untuk pengembangan budidaya rumput laut dan Kerang Mabe (di Kapuntori) di seluruh Kabupaten Buton.
- Program PEMP (Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir). Program PEMP diberikan untuk 10 kecamatan, 30 desa. Diantara 10 kecamatan yang dapat Program PEMP, 7 kecamatan diantaranya adalah kecamatan binaan COREMAP.
- PNPM-NP atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Program ini sebelumnya disebut Program PPK (Program Pemberdayaan Kecamatan) diberikan pada 26 desa terdiri dari 17 desa di Mawasangka Induk dan 19 desa di Mawasangka Tengah. Program ini terdiri dari pembangunan fisik sebanyak (60%) dan Non Fisik (40%). Dana PNPM untuk pembangunan fisik digunakan pada tahun 2007 untuk membangun gedung TK, Posyandu dan penambahan ruang belajar SD-SMP). Sedang dana untuk non fisik digunakan untuk dana UEP dan Simpan Pinjam (SPP). UEP dan SPP diberikan pada tahun 2008 untuk 18 desa, termasuk Desa Terapung dan Wakambangura.

- Seed Fund dikelola oleh LPSTK
- AIG (Alternative Income Generative), dana dikembalikan ke Koperasi Dinas DKP (Koperasi Arwana)
- *Block Grant* dikelola oleh LPSTK untuk pembangunan fisik. Di Mawasangka dipergunakan untuk bak penampungan air di Desa Terapung dan talud di Wakambangura, Gumanano dan Kancebumi.

Program *Seed Fund* adalah salah satu Program COREMAP berupa pemberian bantuan dana bergulir pada masyarakat atau kelompok masyarakat di desa yang menjadi binaan COREMAP. Program ini dikelola oleh LPSTK dan dibantu oleh LKM (Lembaga Kredit Masyarakat) yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. LKM khusus dibentuk untuk mengelola dana bergulir dan pembentukan LKM dilakukan pada saat dana akan diturunkan. Dana *Seed Fund* digunakan untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Jumlah dana untuk masing-masing desa sebesar 50 juta rupiah untuk digulirkan pada anggota kelompok masyarakat (Pokmas) yang sudah terbentuk. Namun kenyataannya dana yang diperoleh masing-masing desa tidak sama, Desa Terapung menerima dana sebesar . 50 juta rupiah dan Desa Wakambangura sebesar 25 juta rupiah.

BAB IV

COREMAP DAN IMPLEMENTASINYA

Bagian ini merupakan uraian tentang program COREMAP di Kabupaten Buton dan implelementasinya selama tiga tahun berjalan (2005-2007). Pembahasan terdiri dari dua bagian, **B***pertama* berisi bahasan tentang pelaksanaan COREMAP serta permasalahan dan kendala yang dihadapi di tingkat kabupaten maupun di kedua lokasi penelitian.. *Kedua*, adalah bagian yang mendeskripsikan tingkat pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap program-kegiatan COREMAP di tingkat kabupaten maupun lokasi kajian (Kecamatan Kadatua dan Mawangsangka).

4.1. Pelaksanaan COREMAP : Permasalahan dan Kendala

Bagian ini menekankan pada deskripsi tentang dinamika pengelolaan dan pelaksanaan COREMAP di Kabupaten Buton dan realisasi pelaksanaan komponen-komponen program COREMAP di wilayah binaan, yaitu kegiatan *Coral Reef Information and Training Center (CRITC)*, *Community Awareness (CA)*, *Community Based Management (CBM)*, dan *Monitoring, Controlling, dan Surveilence (MCS)*. Selanjutnya akan dibahas tentang problematika kelembagaan dalam pelaksanaan COREMAP yaitu PMU/PIU, yang pada intinya membahas tentang seberapa jauh tingkat capaian program dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing kelembagaan dalam pelaksanaannya.

4.1.1. Pengelolaan dan Pelaksanaan/Kegiatan COREMAP di Tingkat Kabupaten

PIU/PMU

PMU atau *Project Management Unit* adalah salah satu unsur kelembagaan COREMAP di tingkat kabupaten. Selain PMU, ada juga unsur kelembagaan lain, yakni Dewan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (CCEB), dan UPT Taman Nasional laut/KSDA. Namun dibandingkan kedua unsur kelembagaan COREMAP, PMU merupakan pengelola COREMAP langsung di tingkat kabupaten. Posisi PMU sangat sentral bagi pelaksanaan COREMAP. Misalnya, Dewan Pemberdayaan Pesisir dalam konteks pelaksanaan COREMAP hanya memberikan pertimbangan atau masukan kepada PMU COREMAP dalam menetapkan kebijakan.

PMU COREMAP kabupaten juga merupakan instrumen kebijakan COREMAP nasional. PMU COREMAP kabupaten harus menjabarkan kebijakan COREMAP nasional di dalam menetapkan kebijakan, atau dengan kata lain kebijakan PMU COREMAP Buton juga merupakan jabaran dari kebijakan COREMAP di tingkat nasional. PMU COREMAP Buton juga berkewajiban melaporkan kebijakan pengelolaan terumbu karang kepada Bupati Buton. Jadi dengan demikian, PMU COREMAP merupakan pusat pengendalian pelaksanaan program COREMAP di Buton, yang dalam merumuskan kebijakan harus memperhatikan kebijakan nasional dan masukan dari instansi teknis, dan juga kelembagaan terkait lain yang dibentuk di daerah.

PMU COREMAP memiliki struktur sendiri, yang tidak sama dengan struktur dinas teknis di lingkungan pemerintah daerah. Jadi, secara kelembagaan PMU COREMAP Kabupaten merupakan tangan panjang dari COREMAP pusat walaupun personalnya berasal dari karyawan Pemda. PMU COREMAP Buton, di satu sisi harus menjabarkan kebijakan COREMAP nasional, dan di sisi lain PMU COREMAP Buton merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pemerintah daerah Kabupaten Buton. Posisi kelembagaan PMU COREMAP yang demikian kemungkinan dapat berpengaruh

terhadap kinerja implementasi program COREMAP. Sebagai contoh adalah program COREMAP nasional yang menetapkan pelestarian terumbu karang sebagai substansi yang dapat diajarkan di sekolah.

Di Buton, upaya memasukkan pelestarian terumbu karang ke dalam kurikulum di sekolah sampai saat penelitian ini dilakukan masih belum jelas realisasinya. Di era otonomi daerah ini, setiap kabupaten termasuk Buton ini memiliki kebijakan otonom, yang tidak bisa didikte oleh pusat. Misalnya, kebijakan menetapkan muatan lokal. Kabupaten dapat menetapkan matapelajaran tertentu sebagai muatan lokal yang diajarkan di sekolah. Dalam konteks ini, Kabupaten Buton telah menetapkan bahasa daerah, yakni Bahasa Wwolio sebagai muatan lokal yang diajarkan di sekolah-sekolah di Buton. Ini salah satu permasalahan yang dihadapi terkait implementasi memasukkan pelestarian terumbu karang dalam kurikulum sekolah di Buton.

Pada saat penelitian ini dilakukan, dasar hukum penetapan pelestarian terumbu karang ke dalam kurikulum pelajaran sekolah di Buton masih belum jelas. Hal ini dapat diketahui dari wawancara dengan berbagai narasumber, tidak terlihat ada kesepakatan tertulis antarinstansi teknis soal memasukkan pelestarian terumbu karang dalam kurikulum sekolah, atau belum ada tanda-tanda rencana pembuatan keputusan Bupati Buton soal muatan lokal terumbu karang ini. Salah satu persoalan yang belum tuntas selain kepastian dasar hukum pelestarian terumbu karang sebagai muatan lokal adalah belum tuntasnya pembahasan soal waktu pengajaran muatan lokal terumbu karang ke dalam kurikulum sekolah di Buton. Ini sebenarnya problem koordinasi antara PMU dan berbagai instansi teknis di Penda.

Persoalan lain yang dihadapi PMU adalah soal pembuatan peraturan desa di desa binaan COREMAP yang sudah ditetapkan lokasi DPL. Pada saat penelitian ini, Peraturan Desa masih dalam bentuk draft yang sedang dalam proses dikonsultasikan dengan instansi teknis di Pemda Buton. Persoalan lain yang dihadapi, yakni keterlambatan pemberian gaji untuk pengelola COREMAP di Desa binaan, sehingga sempat membuat resah pelaksana COREMAP di lapangan, persoalan ini tidak lepas dari problem koordinasi internal.

Jadi, persoalan koordinasi antara PMU dengan instansi teknis tampaknya merupakan permasalahan implementasi COREMAP di lokasi kajian

Problem koordinasi yang dihadapi PMU COREMAP Kabupaten Buton dalam menjalankan kebijakan COREMAP, tampaknya tidak dapat dilepaskan dari posisi jabatan PMU COREMAP yang tidak dipegang langsung oleh kepala dinas, sekalipun secara kepegawaian, pejabat PMU di bawah kepala dinas teknis tetapi dalam realitasnya PMU COREMAP dapat langsung berhubungan dengan instansi teknis lain karena secara struktural bukan dinas teknis pemda. PMU COREMAP memiliki struktur terpisah dengan struktur dinas teknis terkait dan memiliki posisi yang kuat dalam konteks pelaksanaan program COREMAP. PMU COREMAP, di samping institusi yang melaksanakan tugas-tugas COREMAP dari pusat di daerah, juga melakukan koordinasi dengan instansi teknis di daerah. Di era otonomi daerah seperti sekarang, jika PMU COREMAP bertindak seperti instansi pusat yang menjalankan tugasnya di daerah, akan selalu menghadapi persoalan koordinasi dengan instansi teknis di daerah otonom, karena program COREMAP yang dianggap "sentralisasi" ini (atau program pemerintah pusat) tentu akan menjadi problem dalam keberlanjutannya, terutama ketika program COREMAP selesai.

Komponen COREMAP (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program*)

- **CRITC (*Coral Reef Information and Training Center*)**

CRITC merupakan salah satu komponen program COREMAP yang kegiatannya antara lain melakukan pengamatan ekologi terumbu karang. Hal ini telah dilakukan CRITC sejak Fase I (2005) dilaksanakannya program COREMAP di Buton, dan pada tahun 2006 dilanjutkan lagi dengan fokus studi ekologi karang, ikan karang dan biota megabentos. Hasil dari kegiatan ini telah menghasilkan publikasi tentang Monitoring Ekologi Buton Tahun 2007. Pelaksana kegiatan ini adalah LIPI, COREMAP II dan CRITC.

Kegiatan CRITC yang lain adalah pendataan (data entri) tentang hasil penangkapan ikan, kapasitas penangkapan ikan, inventarisasi nelayan/alat tangkap di lokasi-lokasi pendaratan ikan, dengan melakukan studi awal terlebih dahulu sebelum menentukan lokasi pendaratan ikan. Selanjutnya berdasarkan pendataan tersebut kemudian di analisa dan diproses menjadi sebuah informasi mengenai hasil tangkapan ikan per jenis alat tangkap; tangkapan per jenis ikan (CPUE). Dibandingkan dengan kegiatan pertama, kegiatan ini tidak lagi melibatkan peneliti LIPI, tetapi dilaksanakan oleh pelaksana COREMAP di daerah. Pada saat penelitian i dilakukan, hasil dari pelaksanaan kegiatan yang disampaikan baru berjalan di empat kecamatan-lokasi binaan COREMAP, yakni Batauga-Bola, Lasalimu-Sampuabalo, Mawasangka-Inulu, dan Sampolawa-Bahari. Dengan demikian, kegiatan ini baru terlaksana di 4 dari 17 kecamatan-lokasi binaan COREMAP di Kabupaten Buton.

Kemudian, jika melihat pelaksanaan pengisian tabel bantu (*lookup*) menunjukkan belum semua terisi data, seperti tabel tentang lokasi penangkapan ikan berdasarkan musim. Data yang ada sebatas nama desa dan lokasi penangkapan. Demikian juga tidak terlihat data isian periode musim dan lembar inventarisasi sarana penangkapan ikan. Secara keseluruhan, hanya sebagian kecil saja tabel bantu yang telah terisi data, seperti data hasil tangkapan per bulan dan lokasi penangkapan, dan CPUE bulanan berdasarkan lokasi pendaratan dan alat tangkap, catatan harian, data-data tentang alat dan metode penangkapan, dan nama-nama jenis ikan menurut nama ilmiah, Inggris, Indonesia dan lokal. Dengan demikian, kemajuan pelaksanaan program ini yang meliputi empat desa/kecamatan tidak lebih hanya sebatas pendataan data CREEL.

Selain kegiatan tersebut, CRITC, juga melakukan aktivitas yang mendukung kelestarian ekologi terumbu karang, misalnya pada tahun 2005, diadakan pelatihan selam dasar, SAR dan ekologi terumbu karang. Target /sasaran kegiatan ini adalah 20 orang yang berasal dari unsur masyarakat dan aktivis LSM, pegawai pemerintahan dan staf PMU Buton. Selain pelatihan juga dilakukan kegiatan workshop. yang diikuti 33 peserta dengan tema membahas

agenda CRITC. Peserta workshop berasal dari kalangan LSM, Perguruan Tinggi, BAPPEDA dan DKP Buton. CRITC juga melakukan kegiatan aksi, yakni melakukan monitoring, penelitian lokal, dan survei sosial-ekonomi.

Tahun 2006, CRITC lebih banyak melakukan workshop di tingkat lokal dan regional, yakni tentang pengembangan program CRITIC, dan pelatihan pemantauan terumbu karang. Kali ini sasaran kegiatan CRITC adalah 25 peserta yang berasal dari warga masyarakat. CRITC juga melakukan survei pendapatan masyarakat nelayan. Hasil survei pendapatan yang dilakukan CRITC di tahun 2006, menyatakan bahwa rata-rata pendapatan perkapita nelayan Kabupaten Buton sekitar Rp. 168.118 per bulan. Workshop dan pelatihan tampaknya menjadi kegiatan CRITC yang menonjol di tahun 2007. Sasaran kegiatan tersebut adalah pegawai Pemda Buton, dan aktivis LSM. Materi pelatihan yang disampaikan pada kegiatan ini adalah Pemantauan Ikan Berbasis Masyarakat, Pelatihan BME, kajian sosial-ekonomi dan ekologi.

Kegiatan CRITC lainnya adalah pemetaan Daerah Perlindungan Laut (DPL). Sebagaimana terlihat pada peta, COREMAP Kabupaten Buton telah berhasil membenrntuk 39 DPL. Kegiatan pembentukan DPL merupakan kegiatan yang paling sentral dalam program COREMAP, karena DPL merupakan lokasi rehabilitasi terumbu karang (Gambar 4.1).

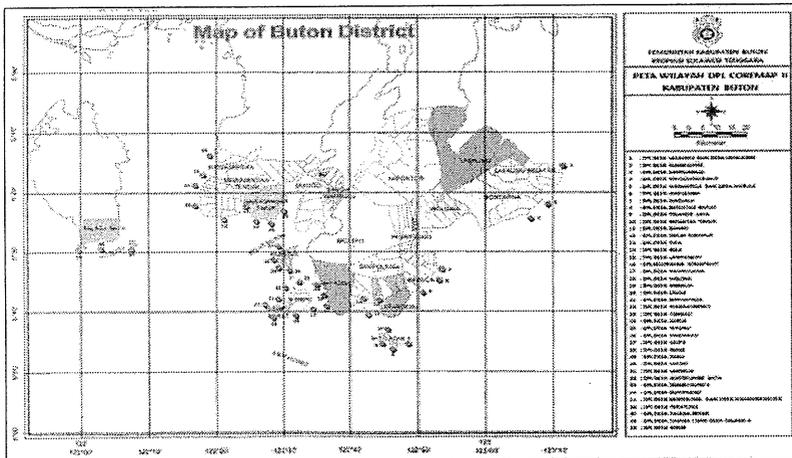
Pada tahun 2006, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton telah mengeluarkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir. Dengan dikeluarkannya, Rancangan Perda ini, maka keberadaan DPL akan mempunyai landasan hukum. Di dalam Rancangan Perda ini meyebutkan bahwa kegiatan pengelolaan bersama ekosistem terumbu karang harus didukung oleh masyarakat sebagai bagian dari kegiatan CRITC, Pengelolaan SDA berbasis Masyarakat (CBM), dan Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (MCS).

Pemerintah Daerah Kabupaten Buton cukup responsf dalam mendukung pembentukan DPL tersebut. Hal ini terlihat dengan

dicantumkannya Pasal 38 pada Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Pasal 38 Ayat 1 menyebutkan bahwa "Setiap Desa dapat membuat Daerah Perlindungan Laut yang diatur dalam Peraturan Desa dengan tujuan menjaga dan melindungi sumberdaya laut di wilayah desa" Di dalam Rancangan Perda itu juga telah mengakomodasi pelibatan peran serta masyarakat dan karakteristik sumberdaya alam setempat dan sekaligus memberikan dasar untuk pengaturan pengelolaan Daerah Perlindungan Laut. Dasar hukum yang dapat digunakan untuk memberikan landasan CBM tersebut, antara lain : Pasal 38 , Ayat 2 dan Ayat 3, sebagai berikut :

- (2) *Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dilakukan secara terpadu dengan tetap memperhatikan kondisi ekologi dan melibatkan peran serta masyarakat.*
- (3) *Daerah Perlindungan Laut sebagai mana dimaksud ayat 2 dapat ditutup secara berkala dan/atau tetap dari kegiatan perikanan dan/atau pengambilan biota dengan kesepakatan masyarakat desa*

Gambar 4.1. Peta Lokasi DPL Program COREMAP di Kabupaten Buton



- **CBM (*Community-Based Management*)**

Kegiatan CBM di Buton diawali pada tahun 2005, dengan melakukan kegiatan workshop, yang bertujuan mencari masukan untuk penyusunan muatan peraturan daerah tentang pengelolaan terumbu karang, dan kegiatan pelatihan untuk personal pelaksana COREMAP di lapangan, seperti SETO dan Community Fasilitator (CF) terutama materi-materi yang berhubungan dengan soal dasar-dasar pengetahuan strategi pemberdayaan/ pendampingan masyarakat, dan soal pengelolaan perikanan berkelanjutan. Kemudian, pada tahun 2006, kegiatan CBM ditandai dengan penetapan 28 DPL (Daerah Perlindungan Laut) yang ditindaklanjuti dengan penyusunan draft peraturan desa untuk memberikan legitimasi terhadap pembentukan DPL tersebut. Selain itu juga dilakukan kegiatan pelatihan budidaya laut dan perumusan mata pencaharian alternatif (MPA) serta pelatihan teknis menejemen usaha.

Dibandingkan tahun sebelumnya, kegiatan CBM tahun 2006 telah melibatkan unsur masyarakat (tokoh agama, nelayan, pemuda) sebagai target sasaran kegiatan, di samping melibatkan juga unsur aparat pemerintah daerah. Tampaknya pendekatan partisipatif digunakan dalam kegiatan CBM tahun 2006. COREMAP menggunakan musyawarah sebagai bentuk konsultatif dengan masyarakat dalam penyusunan pengelolaan terumbu karang dan profil metode PRA. Sementara itu, kegiatan CBM tahun 2007, masih melanjutkan kegiatan n sebelumnya, yakni melakukan pendekatan konsultatif dengan masyarakat desa dalam penyusunan profil metode PRA serta kegiatan lainnya yang sifatnya pemberian bekal pengetahuan dan wawasan bagi pelaksana program COREMAP di lapangan, seperti *training village management*.

Kegiatan CBM yang bersifat ekonomi juga mulai dilakukan di tahun 2007. Hal ini dapat dilihat dari *pilot project* untuk pengembangan usaha perikanan rumput laut dan pengelolaan pasca panen, meskipun tidak dilakukan secara luas di wilayah desa-desa binaan COREMAP. Lokasi *pilot project* ini berada di Kecamatan Batauga dengan target 50 orang, terdiri dari 5 (lima) kelompok budidaya rumput laut. Selain pengembangan usaha budidaya rumput

laut, juga dilakukan pengelolaan pasca panen rumput laut seperti pembuatan jus agar, dodol agar dan gula-gula.. Kegiatan ini lebih menyebar dibandingkan usaha budidaya rumput laut, yaitu dilakukan di 16 desa yang tersebar di 5 kecamatan. Sasaran kegiatan ini adalah kalangan ibu rumah tangga. .

Kegiatan CBM lainnya pada tahun 2007 meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

- *Workshop* sertifikasi perdagangan ikan kerapu yang bertujuan membangun kesepahaman semua pihak tentang sistem pemasaran dan produk perdagangan ikan karang dan soal pelestarian sumberdaya ikan karang
- Terbangunnya 43 Pondok Informasi serta kontribusi warga masyarakat rata-rata sebesar 4 juta rupiah untuk setiap bangunan pondok yang dibangun terutama dari *block grant*.
- Terbangunnya insfrastruktur desa dengan dana *block grant* di 23 desa sebesar . 1.200 juta rupiah.
- Tersalurkannya bantuan dana bergulir (*seed funds*) kepada 43 desa binaan dengan nilai . 1.550 juta rupiah.
- Telah dibangun stasiun radio FM/AM di Kecamatan Batauga untuk memperluas penyebaran informasi tentang kegiatan COREMAP di Buton.

Program CBM di tahun 2007 juga melakukan pembentukan DPL yang sebelumnya dilakukan sebagai program CRITC. Jumlah DPL yang terbentuk sebanyak 15 buah dan tersebar di 15 desa, dengan luas masing-masing DPL minimal 10 hektar. Dengan terbentuknya DPL baru ini, maka jumlah DPL n menjadi 43 DPL di Buton. Untuk memberikan landasan hukum pada pembentukan DPL tahap kedua, COREMAP Buton telah mempersiapkan draft peraturan desa, yang pada saat penelitian ini draft tersebut masih dikonsultasikan ke bagian hukum Pemerintah Kabupaten Buton.

- **Community Awareness (CA)**

Pelaksanaan program *Community Awareness* di Buton menggunakan strategi pendekatan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai media sosial. Program ini diawali dengan pelatihan yang melibatkan pelaksana COREMAP di lapangan, seperti SETO dan CF, kalangan LSM dan Perguruan Tinggi. Kegiatan tahun 2005 ini bertujuan untuk memberikan pembekalan tentang komunikasi yang efektif dan pelatihan tentang pengetahuan jurnalistik dalam penyampaian informasi atau kampanye pelestarian terumbu karang.

Pendekatan yang dilakukan dalam program ini melalui media sekolah. Pemanfaatan sekolah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman fungsi terumbu karang di kalangan anak-anak sekolah. Pendekatan media sekolah ini merupakan pilihan program *Community Awareness* Tahun 2006. Program *Community Awareness* berkeinginan untuk memasukkan pengetahuan terumbu karang sebagai muatan lokal untuk dapat diajarkan di sekolah-sekolah di Buton. Dalam kaitan ini, PMU Buton menyelenggarakan *workshop* dan seminar sebagai langkah awal peningkatan kesadaran masyarakat untuk kelestarian terumbu karang. Peserta *workshop/seminar* berasal dari kalangan guru SD dan SLTP. *Workshop* ini menghasilkan bahan pelajaran dan sosialisasi pengajaran muatan lokal kelestarian terumbu karang.



Gambar 4.2. Foto Lomba Cerdas Cermat Tingkat SLTA

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kelestarian terumbu karang, program *Community Awareness* juga melakukan lomba cerdas cermat untuk kalangan siswa SD. Selain untuk kalangan anak sekolah, program *Community Awareness* juga menggarap masyarakat luas. Pada tahun 2006 ini, PMU Buton juga melakukan *workshop* tentang perumusan model strategi

penyadaran masyarakat tentang pelestarian terumbu karang. Workshop ini diikuti oleh 28 kepala desa (kades) yang berasal dari 7 kecamatan di Kabupaten Buton. Pelatihan, *workshop* dan perlombaan masih menjadi instrumen penting dalam kegiatan *Community Awareness* tahun 2007. Pelatihan sebagai bagian kegiatan *Community Awareness* lebih ditujukan untuk membangun keterampilan dalam berkomunikasi di kalangan staf PMU COREMAP Kabupaten Buton, sedangkan kegiatan *workshop* dilakukan untuk melanjutkan kegiatan tahun sebelumnya, yaitu tentang pemahaman program pengembangan kesadaran kelestarian terumbu karang sebagai muatan lokal di sekolah. Workshop ini diikuti sekitar 54 guru SD yang berasal dari 12 desa.

Cerdas cermat dan lomba melukis juga masih dilakukan pada tahun 2007. Selain itu, olah raga juga dipakai sebagai media dalam rangka membangkitkan kesadaran kelestarian terumbu karang. Melalui olah raga ini, sosialisasi penyebaran informasi dan kampanye pelestarian ekosistem terumbu karang dilakukan. Media olah raga yang dilakukan adalah pertandingan sepak bola yang memperebutkan piala COREMAP CUP yang diikuti 17 kecamatan-lokasi program COREMAP di Kabupaten Buton. Biaya pelaksanaan kegiatan olahraga ini didukung dari dana *loan* Bank Dunia pada Unit Pelaksana Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu karang COREMAP II sebesar 48, 85 juta rupiah dan bantuan dari KONI Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 20 juta rupiah.¹

- **MCS (*Monitoring, Controlling, dan Surveillance*)**

Kegiatan MCS diawali pada tahun 2005 dengan pelatihan investigasi penangkapan ikan ramah lingkungan. Pesertanya terbatas pada pelaksana COREMAP, dan tidak ada unsur masyarakat, walaupun tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengawasan sumberdaya laut serta strategi

¹ Laporan Pelaksanaan Pertandingan Sepak Bola COREMAP CUP Tingkat Kabupaten tahun 2007. Kerjasama PMU COREMAP II Kabupaten Buton dan LSM Pelintas Buton

penanggulangan *destructive fishing*. Peserta pelatihan ini lebih banyak berasal dari unsur pelaksana COREMAP (SETO, CF), pegawai pemerintah daerah, jurnalis, TNI AL dan kepolisian. Namun demikian pada kegiatan tahun berikutnya, kegiatan MCS ini diikuti oleh unsur masyarakat yaitu kelompok (Pokmas) konservasi dan dari unsur kepolisian. Pelibatan unsur masyarakat mungkin karena topiknya berkaitan dengan sistem pengawasan masyarakat (Siswasmas). Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pengawasan di wilayah perairan terhadap kegiatan *destructive fishing* dan *illegal fishing*.



Gambar. 4.3. Foto Kegiatan Patroli yang sedang menangkap basah pelaku *illegal fishing*

Pada tahun 2007, program MCS juga melakukan *workshop* tentang strategi penyadaran masyarakat untuk menghasilkan rumusan pola pendekatan strategi penyadaran yang berbasis masyarakat. *Workshop* ini diikuti oleh 28 kepala desa. Dan, pada tahun ini dilakukan juga pelatihan Siswasmas, dengan sasaran peserta adalah ketua dan anggota Pokmaswas Konservasi. Selain pelatihan, program MCS juga melakukan

kegiatan apel bersama yang melibatkan semua unsur dalam Siswasmas, mulai dari pemerintah daerah, TNI, kepolisian, aparat kecamatan dan desa, serta unsur kelompok masyarakat yang dibentuk dalam rangka program COREMAP II.

Permasalahan dan Kendala.

Laporan kemajuan kegiatan COREMAP Buton yang disusun oleh PMU COREMAP Buton, menyebutkan bahwa dari pelaksanaan program COREMAP selama 3 tahun ini masih belum tercipta kesadaran pelestarian terumbu karang pada semua masyarakat, terutama masyarakat di luar desa-desa binaan COREMAP. Laporan kemajuan ini memang secara eksplisit tidak menyatakan bahwa

masyarakat desa binaan COREMAP mengalami peningkatan kesadaran, namun dinyatakan belum tercipta kesadaran pelestarian terutama masyarakat desa di luar desa binaan COREMAP. Laporan PMU Buton dapat diartikan bahwa dampak COREMAP terhadap kesadaran masyarakat akan pelestarian terumbu karang tidak jauh berbeda antara desa binaan dan bukan binaan. Kesadaran masyarakat di desa-desa binaan COREMAP masih rendah, bahkan di bawah tingkat kesadaran desa-desa non- binaan COREMAP.

Berdasarkan laporan kemajuan PMU COREMAP Buton selama tiga tahun dapat diajukan beberapa pertanyaan: Mengapa hal ini bisa terjadi ? Berapa jumlah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat? Berapa jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program penyadaran masyarakat dari dana keseluruhan? Apakah anggaran COREMAP lebih banyak porsinya untuk membangun kelembagaan pelaksanaan program COREMAP di tingkat supra-komuniti? Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan karena salah satu indikator keberhasilan COREMAP adalah pencapaian peningkatan kesadaran masyarakat sampai 70%. Oleh sebab itu, perubahan kesadaran yang terjadi pada masyarakat merupakan indikator keberhasilan, sehingga penting untuk menilai dampak keberhasilan program COREMAP. Karena itu, unit sosial yang menjadi sasaran indikator keberhasilan program COREMAP adalah komunitas. Indikator keberhasilan program COREMAP tidak terletak di SETO, CF, MD atau pegawai pemerintahan.

Dilihat dari daftar kegiatan COREMAP II Tahun 2007 di Kabupaten Buton dapat diketahui bahwa jumlah kegiatan dan anggaran RCU dan PMU COREMAP II adalah sebanyak 61 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.590.904.000,- Kemudian dari 61 kegiatan sebanyak 32 kegiatan dikelola secara swakelola, 29 dikelola oleh kontraktor. Sementara itu alokasi anggaran COREMAP yang besarnya hampir 10 Milyar rupiah tersebut, sekitar 89,0 persen berasal dari Pagu Anggaran IDA, 7,7 persen dari Pagu Anggaran GEF, dan 3,7 persen dari APBD. Selain itu, dilihat dari jenis kegiatan, dari 61 kegiatan yang tampak secara eksplisit sebagai kegiatan COREMAP, hanya 8 kegiatan yang berhubungan langsung

dengan masyarakat dan bersifat sosial-ekonomi.. Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar 38,8 persen dari total anggaran COREMAP II. Adapun kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, yakni:

- *Pilot Project* Pengembangan Budidaya Ikan;
- *Village Grant for Resolving Funds (Seed funds)*,
- *District grant*
- *Block grant* untuk pengembangan infrastruktur;
- AIG District Grant,
- Pilot Project Matapencaharian Alternatif (MPA),
- *Village Grant*, dan
- *Seed Fund*(dana bergulir)

Seperti disebutkan dalam laporan PMU Buton, besarnya alokasi anggaran COREMAP terkait dengan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat, kemungkinan berhubungan dengan belum terciptanya kesadaran masyarakat untuk pelestarian terumbu karang. Dengan kata lain, selama tiga tahun alokasi anggaran COREMAP lebih banyak dialokasikan untuk memperkuat kelembagaan di supra komunitas, seperti pelatihan, workshop, seminar, kajian dimana keterlibatan langsung masyarakat sangat minimal. Pengalokasian anggaran yang tidak terkait langsung dengan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap penilaian keberhasilan COREMAP yang menggunakan perubahan pendapatan masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan COREMAP.

Untuk melihat dampak program COREMAP terhadap perubahan pendapatan sangat ditentukan oleh seberapa banyak pilihan program kegiatan yang ditetapkan menyentuh langsung aktivitas perekonomian masyarakat. Seberapa besar program kegiatan COREMAP seperti bantuan permodalan dan penciptaan mata pencaharian alternatif dilakukan dan berapa persen anggaran dialokasikan untuk mendukung kegiatan tersebut. Sebagaimana terlihat pada laporan PMU Buton, anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program ini sangat terbatas. Dana yang disediakan tidak dapat melayani semua warga masyarakat di desa-desa binaan COREMAP, sehingga sangat sulit untuk menilai keberhasilan

COREMAP melalui peningkatan pendapatan masyarakat nelayan sebesar 10 persen dan masyarakat nelayan dan atau masyarakat merasakan dampak positif dari program COREMAP sebesar 70 persen

Kesulitan untuk mencapai indikator keberhasilan tersebut disebabkan program/kegiatan COREMAP cenderung lebih banyak digunakan untuk kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan COREMAP, atau lebih banyak dilakukan di supra-komuniti, seperti kegiatan-kegiatan yang melibatkan kelembagaan Dewan Pesisir, PMU (termasuk Seto, CF, MD) dan pegawai pemerintahan di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa, aparat penegak hukum, TNI, Perguruan Tinggi dan aktivis LSM. Sementara program kegiatan COREMAP yang menyentuh langsung kehidupan ekonomi riil masyarakat sasaran COREMAP sangat terbatas.

Kegiatan Coremap untuk penguatan kelembagaan yang mendapat porsi anggaran lebih besar, di satu sisi cukup positif karena kegiatan ini dalam rangka penguatan kemampuan SDM aparatur pemerintah daerah-terutama di bidang Kelautan dan Perikanan. Kegiatan penguatan kelembagaan COREMAP diikuti oleh sebagian besar aparat pemerintah daerah. Sementara di sisi lain, sangat ironis karena dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan penguatan kelembagaan COREMAP berasal dari luar (bukan APBD). Dengan kata lain, peningkatan SDM aparatur pemerintah daerah justru masih menumpang dana COREMAP. Hal ini penting dikemukakan karena terakait dengan indikator keberhasilan COREMAP dari sudut peran Pemerintah Daerah dalam *sharing* pendanaan COREMAP sebesar 70 persen. Sulit dicapai.

Partisipasi Pemda Kabupaten Buton dalam pembiayaan operasional COREMAP sebesar 70 persen merupakan salah satu indikator keberhasilan program COREMAP. Sementara itu, menurut laporan PMU COREMAP Buton, selama tiga tahun, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton baru mampu mendukung biaya operasional sekitar 20 persen. Hal ini berarti selama 3 tahun berjalan indikator keberhasilan program COREMAP di Buton dari sudut partisipasi APBD tidak tercapai. Kegiatan operasional COREMAP yang belum

didukung secara optimal dari APBD tentu saja menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan program COREMAP di Buton di masa mendatang, terutama jika program COREMAP berakhir. Hal ini merupakan persoalan besar yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Buton untuk melanjutkan pengelolaan COREMAP secara mandiri tanpa tergantung bantuan dana dari luar.

4.1.2. Pengelolaan dan Pelaksanaan/kegiatan Coremap di Kecamatan Mawasangka

Pembentukan dan kinerja kelembagaan

Komponen utama dalam pelaksanaan COREMAP II adalah pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat (CBM). Dalam hal ini masyarakat diposisikan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan ekosistem terumbu karang. Dalam buku panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) (DKP, 2007:1) disebutkan bahwa 'keterlibatan masyarakat tidak lagi hanya terbatas dalam hal melaksanakan aturan-aturan pengelolaan semata, melainkan secara utuh dari semua siklus pembangunan, mulai dari tahap merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, sampai pada tahap mengevaluasi'. Untuk menjalankan fungsi pengelolaan sumberdaya perikanan dan terumbu karang, masyarakat di lokasi binaan Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, sesuai dengan arahan juga telah berhasil menyusun Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK), sebagai pedoman dalam pelaksanaan program di lingkungan masing-masing. Penyusunan RPTK di lokasi binaan yaitu Desa Terapung dan Wakambangura telah selesai pada tahun 2006, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, difasilitasi oleh fasilitator dari tingkat kabupaten dan kecamatan, serta mengacu pada panduan penyusunan RPTK COREMAP II. Berdasarkan RPTK yang telah berhasil disusun di masing-masing lokasi binaan, masyarakat mempunyai pedoman dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan terumbu karang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing. Untuk pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan dalam RPTK, di masing-masing lokasi binaan,

dibentuklah beberapa lembaga teknis seperti LPSTK, Pokmas dan Pokmaswas Pada bagian ini akan diuraikan proses pembentukan lembaga-lembaga tersebut dan bagaimana kinerjanya selama ini.

- **Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPS-TK)**

Lembaga Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang (LPS-TK) merupakan lembaga tertinggi dalam pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat di tingkat lokasi binaan COREMAP, termasuk di lokasi kajian yaitu Desa Terapung dan Wakambangura di Kecamatan Mawasangka. LPS-TK merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di lokasi binaan untuk membentuk tim penyusun yang bertugas secara teknis dalam mempersiapkan dan menyusun RPTK. Di kedua lokasi kajian LPS-TK dibentuk pada tahun 2005. Sesuai dengan arahan fasilitator, Kepala LPS-TK dipilih melalui musyawarah masyarakat dengan menentukan 3 calon ketua untuk masing-masing desa binaan COREMAP. Adapun kriteria untuk calon ketua LPS-TK di desa binaan adalah:

1. Masyarakat lokal (atau sudah menetap lama di lokasi)
2. Mempunyai waktu yang cukup (atau di Wakambangura tidak suka merantau)
3. Mempunyai pengalaman dalam kegiatan masyarakat (misal PPK).
4. Berpendidikan minimal lulus SMA (kalau tidak ada, disesuaikan dengan kondisi setempat).
5. Sanggup menjalankan tugas.

Proses pembentukan LPS-TK

- SETO (*Senior Extension Training Officer*), CF (*Community Fasilitator*) dan MD (*Mmotivator Desa*) sebagai fasilitator bekerja sama dengan Kepala Desa dalam proses pembentukan LPS-TK sampai pemilihan ketua.
- Sosialisasi tentang tugas-tugas sebagai ketua LPS-TK dilakukan sebelum pencalonan ketua LPS-TK.

- Kepala Desa dibantu fasilitator mengundang semua unsur masyarakat termasuk tokoh masyarakat untuk menghadiri musyawarah pembentukan LPS-TK.
- Setelah terpilih 3 calon ketua, ditentukan sebagai ketua adalah calon yang mempunyai suara terbanyak, sedangkan 2 calon lainnya menjadi sekretaris dan bendahara. Di Desa Terapung ketiga calon adalah laki-laki, sementara di Desa Wakambangura 2 calon laki-laki dan seorang calon perempuan.

Proses pembentukan LPS-TK di masing-masing lokasi kajian dihadiri oleh 60-70 orang, selain fasilitator juga pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat/adat dan semua unsur masyarakat. Di Desa Wakambangura juga dihadiri oleh CF dari Desa Koncebumi. Ketua LPS-TK yang terpilih di kedua lokasi kajian diusahakan sesuai atau mendekati kriteria yang ditentukan. Misalnya ketua LPS-TK terpilih di Desa Terapung sudah berpengalaman sebagai ketua Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Kecamatan Mawasangka, dan ketua terpilih untuk Desa Wakambangura mempunyai pengalaman sebagai Tim Pengelola Kegiatan Tingkat Desa, PPK Kecamatan Mawasangka. Setelah 6 bulan terpilih sebagai ketua LPS-TK, bersama MD masing-masing desa binaan diikutsertakan dalam pelatihan untuk memperkenalkan program berkaitan dengan pelestarian terumbu karang di Bau-bau. Fokus program adalah pelestarian terumbu karang, terutama pencegahan penggunaan alat tangkap ikan yang merusak karang (seperti bom, racun, *rendy* dan pukot (biasa digunakan nelayan dari luar). Sosialisasi yang dilakukan LPS-TK (dibantu CF dan MD) meliputi COREMAP dan program-programnya, terutama program perlindungan karang. Sebelum ada program di tingkat desa, sosialisasi ke masyarakat pernah dilakukan oleh PMU dan konsultan (tingkat kabupaten).

Beban pekerjaan LPS-TK dalam kaitan dengan pelestarian laut relatif berat di lapangan, karena semua kegiatan COREMAP melibatkan pengurus LPS-TK sebagai penanggung jawab COREMAP di tingkat desa. Berbagai kegiatan sering dilakukan oleh ketua LPS-TK, sehingga banyak menyita waktu dan tenaga. Untuk kegiatan

pelestarian terumbu karang, banyak melibatkan pengurus Pokmas Konservasi, terutama untuk kegiatan pemantauan dan patroli. Menurut ketuanya, beban Pokmas Konservasi lebih berat dibandingkan kedua Pokmas lainnya (Jender dan UEP), karena sering dilibatkan dalam penyuluhan konservasi ke masyarakat, kegiatan pemantauan dan pengawasan yang sewaktu-waktu dibutuhkan, baik oleh swadaya desa maupun ikut patroli bersama tim kabupaten. Sementara kegiatan kedua Pokmas lainnya terfokus ke usaha kredit, yang umumnya merupakan pekerjaan administrasi/pembukuan terutama pada waktu tertentu (waktu dana turun dan pembayaran cicilan bulanan).

LPS-TK di Desa Wakambangura pernah menghadapi permasalahan dengan CF dan kepala desa, karena hasil usulan masyarakat yang telah disepakati yaitu membuat talut (penahan ombak) diganti CF/kepala desa menjadi program pembuatan bak air. Perubahan ini dilaporkan LPS-TK ke PMU, sehingga musyawarah diulang, dan hasilnya kembali ke rencana awal yaitu membuat talut. Demikian pula beberapa usulan masyarakat yang tidak sesuai, ditolak oleh LPS-TK. Hasil rapat program dengan PMU, kemudian disampaikan pada musyawarah berikutnya. Biasanya setiap dusun berupaya mempertahankan usulan masing-masing tanpa memahami permasalahannya. Misalnya usulan masyarakat tentang perbaikan jalan ditolak LPS-TK, karena program tersebut menjadi wewenang Pemda, bukan COREMAP. Menurut ketua LPS-TK di Wakambangura, sementara dana yang disalurkan ke masyarakat masih terbatas, jumlah pengurus kelembagaan Pokmas dianggap terlalu banyak, karena dengan kegiatan yang relatif masih terbatas, cukup diselesaikan oleh pengurus LPS-TK. Berdasarkan wawancara mendalam dengan ketua LPS-TK, pengurus-pengurus tersebut sulit dilibatkan dalam kegiatan karena:

- kemampuan terbatas, tidak pernah mendapat latihan
- dana terbatas, sehingga tidak mampu memberikan insentif (atau kalau ada sangat terbatas)
- aktivitas tidak banyak, kecuali pada waktu-waktu tertentu.

Akibatnya banyak pengurus kelembagaan (seperti LKM, Pokmas dan kelompok peminjam kredit usaha) dibentuk hanya sebatas

formalitas, kurang dilibatkan dalam kegiatan POKMAS, karena tidak mengetahui kegiatan yang harus dilakukan. Pendapat ini semakin menguatkan bahwa dominasi ketua LPS-TK dalam kegiatan COREMAP umumnya dan Pokmas pada khususnya di lokasi ini cukup kuat, sehingga pengurus lainnya cenderung pasif. Dengan adanya kewenangana yang cukup besar pada ketua LPS-TK, ditambah keterlibatan keluarga dekat dalam pengurus Pokmas, maka praktis kegiatan Pokmas hanya dilakukan oleh lingkup yang terbatas. Kondisi demikian semakin kurang memberdayakan pengurus lainnya, sehingga beban pekerjaan bertumpuk pada orang-orang tertentu. Akibatnya pengurus lain cenderung kurang peduli, bahkan kadang – kadang menimbulkan sikap negatif (seperti curiga, iri hati dan saling tuduh).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM), merupakan lembaga teknis yang dibentuk untuk membantu LPS-TK dalam pengelolaan *seed fund* yang besarnya 50 juta rupiah per desa binaan. Idealnya pengurus LKM dipilih melalui musyawarah yang dihadiri LPS-TK, Kades, CF dan MD. Namun realisasinya di Desa Wakambangura LKM dibentuk secara mendadak menjelang dana untuk Pokmas UEP hampir cair (yaitu awal tahun 2008). Dalam pertemuan mendadak tersebut yang dihadiri Kades, MD dan CF Koncebumi, ketua LPS-TK. menunjuk 3 orang sebagai ketua, sekretaris dan bendahara LKM. Pengurus LKM hanya diberitahu tentang 3 kelompok masyarakat (masing-masing 10 orang) yang akan menerima dana bantuan kredit usaha sejumlah 50 juta rupiah. Realisasi sampai waktu kajian, dana yang diperoleh baru mencapai 50 persen (25 juta), sehingga terbatas hanya untuk satu kelompok (10 orang). Pembentukan pengurus yang serba mendadak ini, menyebabkan ketua dan pengurus LKM lain merasa pembentukan LKM hanya untuk formalitas, karena semua kegiatan pengalokasian dana Pokmas ditentukan oleh ketua LPS-TK yang kadang-kadang dibantu MD. Menurut ketua LKM, peraturan dan mekanisme pengalokasian *seed fund* tidak jelas (CF belum pernah menjelaskan bagaimana alokasi dana selanjutnya), sehingga meskipun dana dari peminjam sudah terkumpul setiap bulan, namun tidak segera disalurkan, sebelum dianggap cukup untuk memenuhi 1 kelompok lainnya (10 orang). Tampaknya anggapan bahwa ketua LPS-TK di

Desa Wakambangura ‘jalan sendiri’ semakin mencolok dalam realisasi pengalokasian dana, sehingga seperti dikatakan seorang informan: ‘Ketua LPS-TK sering memutuskan sendiri sesuai dengan kemauannya- sok tahu’. Sementara di pihak LPS-TK berpendapat ‘pengurus sering sulit diajak untuk aktif, karena tidak berminat’. Akibatnya hanya satu lembaga yang dominan berperan yaitu LPS-TK, termasuk sebagai pelaksana teknis keuangan mikro yang seharusnya dilakukan oleh LKM. Kurang berperannya lembaga lainnya, akan berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat yang menjadi salah satu fokus program COREMAP di lokasi binaan, khususnya di Desa Wakambangura.

Permasalahan tersebut tidak tampak untuk Desa Terapung. LKM dibentuk sekitar bulan Juli 2007 (sekitar 6 bulan sebelum dana dicairkan), berfungsi sebagai pendamping LPS-TK dalam pengelolaan *seed fund*. Dalam prakteknya, ada semacam pembagian tugas antara LKM dan LPS-TK, yaitu LKM sebagai pengelola dana khusus simpan pinjam dan LPS-TK berkonsentrasi pada *block grant* untuk kegiatan fisik. Melalui musyawarah yang dihadiri Kades, LPS-TK dan MD, ketua LKM terpilih adalah Ibu Kades. Kegiatan LKM dilakukan di Pondok Informasi yang lokasinya bersebelahan dengan kantor desa/rumah kades, sehingga memudahkan Kades untuk datang ke pondok apabila ada masalah. Selain untuk kantor LKM, Pondok Informasi juga dimanfaatkan untuk pertemuan kecil kegiatan COREMAP dan rencananya juga akan menyediakan informasi tentang terumbu karang (termasuk taman bacaan untuk anak-anak sekolah). Kerja sama LPS-TK dan LKM memungkinkan hubungan antar lembaga lebih harmonis dan saling mengisi, sehingga semua pengurus lembaga merasa memiliki dan aktif untuk mencapai program yang sudah disepakati bersama masyarakat.

Pemilihan MD (Motifator Desa) dilakukan dengan musyawarah dengan Kepala Desa yang difasilitasi oleh CF dan Seto, untuk memilih 3 calon dengan kriteria:

- Berpendidikan SMA ke atas
- Berpengalaman sebagai fasilitator program lain di masyarakat.

- Mempunyai waktu cukup untuk melaksanakan tugas sebagai MD.

Dalam realisasinya, menurut seorang informan (fungsionaris COREMAP), pemilihan MD cenderung orang-orang dekat pemilih, atau calon jadi kepala desa. Kasus pemilihan MD di Desa Wakambangura sebagai calon jadi kades berbeda dengan yang dikehendaki masyarakat. Calon terpilih dari masyarakat umumnya aktif/menonjol dalam kegiatan social. Perbedaan yang menonjol antara MD dan LPS-TK, MD mendapat honor 300 ribu rupiah per bulan, sementara LPS-TK bekerja tanpa honor resmi. Usulan untuk memberi honor pada pengurus LPS-TK sampai sekarang belum ditanggapi. Jalan keluar yang dilakukan di Desa Terapung, honor untuk pengurus, diusahakan dari bagian hasil Pokmas UEP dan Jender (bunga pinjaman).

• **Kelompok Masyarakat (Pokmas)**

Di kedua lokasi kajian telah dibentuk 3 Pokmas yaitu: 1) Pokmas Konservasi. 2) Pokmas Jender dan 3) Pokmas Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Pokmas Konservasi dibentuk pada tahun 2005 bersamaan dengan pembentukan LPS-TK, sedangkan 2 Pokmas lainnya dibentuk pada tahun 2006. Pengurus Pokmas Konservasi (ketua, sekretaris, bendahara) ditentukan dalam forum musyawarah LPS-TK bersama Kades dan BPD. Sedangkan 2 orang anggota Pokmas Konservasi ditetapkan oleh pengurus bersama forum, dari 5 calon yang diusulkan. Sebagian pengurus Pokmas konservasi di Desa Terapung dipilih dari nelayan yang masih menggunakan bom sebagai penangkap ikan. Pendekatan ini dilakukan agar orang-orang tersebut berhenti melakukan pengrusakan karang, karena terlibat dalam pengurusan Pokmas Konservasi.

Dalam menjalankan tugas monitoring dan pengawasan Pokmas Konservasi mengajak serta semua komponen masyarakat yang dikenal dengan sistim pengawasan berbasis masyarakat (Siswasmas), dan kelompok yang dibentuk dinamakan kelompok pengawasan masyarakat (Pokwasmas). Pembentukan kelompok ini relatif baru di

lokasi kajian, sehingga partisipasi masyarakat dalam pengawasan, cenderung lebih merupakan swadaya perseorangan nelayan daripada kelompok. Pokmas Konservasi dan Pokwasmas ini tidak mempunyai dana maupun sarana khusus untuk kegiatan pengawasan/patroli, sehingga aktivitasnya terbatas pada kegiatan yang sifatnya swadaya masyarakat. Sedangkan nelayan pendatang yang biasa melakukan pemboman ikan, mempunyai sarana yang lebih canggih, sehingga Pokmas kurang berdaya dalam pengawasan terumbu karang. Biasanya dalam melakukan patroli Pokwasmas menggunakan sarana kapal sendiri atau pinjam *body* milik nelayan lain, sedangkan biaya BBM untuk patroli, menjadi beban COREMAP kabupaten, karena sifatnya menumpang. Pengawasan swadaya masyarakat desa, menjadi tanggung jawab masing-masing nelayan, yang melakukannya sambil bekerja menangkap ikan.

Pokmas Jender dan UEP dibentuk pada tahun 2006, setelah dilakukan sosialisasi ke masyarakat tentang perlunya pembentukan Pokmas. Sedangkan pengurus kedua Pokmas dipilih melalui musyawarah yang dihadiri oleh semua unsur masyarakat (sekitar 100 orang), yaitu Kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat, CF, MD, SETO, wakil 20 dusun dan unsur masyarakat lainnya. Pengurus masing-masing Pokmas terdiri dari 3 orang yaitu ketua, sekretaris dan bendahara, sementara sejumlah anggota pada masing-masing Pokmas, ditentukan oleh pengurus Pokmas bersama MD dan LPS-TK. Sebagai ketua Pokmas Jender dipilih seorang ibu yang berpengalaman dalam PKK, sementara Ketua Pokmas UEP di Terapung dipilih warga yang berpengalaman sebagai pengusaha. Anggota Pokmas ditentukan oleh Pokmas bersangkutan dibantu oleh LPS-TK, LKM, MD dan Kepala Desa berdasarkan kriteria tertentu yang telah disepakati sebelumnya

Pembentukan kelompok usaha dalam kedua Pokmas ini merupakan prasyarat untuk penyaluran dana, karena sistem tanggung renteng dalam Pokmas memerlukan peran kelompok, meskipun dalam prakteknya tetap lebih menjadi tanggung jawab individu masing-masing. Hasil musyawarah dengan LPS-TK dan MD juga memutuskan mekanisme pinjaman dan penyelesaian masalah/sanksi terkait dengan pinjaman anggota Pokmas, dilakukan berdasarkan

kesepakatan ketua Pokmas bersama kelompok masing-masing. Di Desa Terapung penundaan pembayaran dari waktu yang telah disepakati (toleransi 7 hari), berarti si peminjam harus membayar denda 3000 rupiah per hari. Dalam sistem tanggung renteng, apabila peminjam tetap menolak untuk membayar cicilan, kelompok akan melakukan upaya penagihan ramai-ramai. Sementara di Desa Wakambangura bagi anggota yang bermasalah (tidak bayar), sesuai dengan kesepakatan diberlakukan penyelesaian hukum, dengan maksud untuk shok terapi. Kesepakatan ini dianggap cukup untuk membuat anggota Pokmas disiplin membayar cicilan, tanpa harus mengenakan denda yang memberatkan anggota. Kelonggaran untuk membayar kredit di Wakambangura diberikan selama 3 bulan, karena beberapa usaha anggota kelompok adalah budidaya rumput laut yang membutuhkan waktu 3 bulan sampai menghasilkan/ panen pertama.

Kinerja Pokmas Konservasi dapat dilihat antara lain :

- Ketua Pokmas melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang perlindungan terumbu karang, setiap ada kesempatan berbincang dengan kelompok masyarakat. Penyuluhan biasa dilakukan di *gote* warga (tempat berkumpul di depan rumah warga), atau tempat kumpul lainnya. Penyuluhan yang dilakukan Pokmas ini relatif terbatas, karena tergantung pada masyarakat yang hadir dalam pertemuan/bincang-bincang tersebut.
- Pokmas Konservasi melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terumbu karang secara swadaya di lokasi DPL (daerah perlindungan laut), dengan mengajak semua komponen masyarakat untuk melakukan kegiatan tersebut, termasuk nelayan yang sedang melakukan penangkapan ikan, untuk ikut memantau dan mengawasi lingkungannya baik perseorangan atau kelompok (Pokwasmas).
- Kegiatan swadaya masyarakat desa, umumnya atas kesadaran sendiri nelayan melakukan monitoring dan pengawasan terumbu karang di lokasi DPL (daerah perlindungan laut). Apabila ditemukan pelaku pelanggaran seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bom, obat bius, *trawl*, penambangan karang, dan

penggunaan jaring yang diikatkan ke karang, pengawas segera melaporkannya pada Pokmas Konservasi. Pelaku pelanggaran di luar DPL, kadang-kadang masih dilakukan oleh nelayan yang umumnya berasal dari luar lokasi (Desa Tapi-tapi).

- Pengawasan yang dilakukan secara swadaya desa, baik perorangan maupun kelompok (Pokwasmas) umumnya menggunakan sarana seadanya atau pinjam *body* milik nelayan. Dengan keterbatasan sarana dan dana, cara pengawasan swadaya ini menjadi kurang efektif, karena umumnya kalah cepat dibandingkan sarana yang dimiliki pelaku pelanggaran yang umumnya lebih canggih. Hasil pengawasan ini dilaporkan ke Pokmas Konservasi yang menindak lanjuti dengan pengintaian ulang dan apabila benar, mereka akan melaporkannya ke polisi atau pihak COREMAP kabupaten.
- Pokmas Konservasi yang diberi tugas untuk menjaga wilayah DPL (*reef watcher*) biasanya juga ikut berpatroli bersama tim patroli kabupaten yang terdiri dari Polo Airut, AL, COREMAP (2 orang), ketua Pokmas Konservasi, MD. Patroli dilakukan sampai ke perbatasan Pulau Muna. Selama ada Pokmas Konservasi, ketua Pokmas selalu ikut patroli, dan tim patroli telah berhasil melakukan penangkapan sebanyak dua kali pelaku pengrusakan karang di wilayah tersebut.
- Sebelum ada program COREMAP, praktek penangkapan ikan yang merusak karang sering dilakukan nelayan lokal maupun pendatang. Namun sejak tahun 2007, setelah penyuluhan dan sosialisasi banyak dilakukan, dan secara periodik dilakukan monitoring dan pengawasan di laut, penangkapan ikan yang merusak terumbu karang menurun tajam. Kini praktek yang merusak karang tinggal penggunaan obat bius yang umumnya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang selalu berhasil lolos dari pengejaran masyarakat.

Masalah yang dihadapi oleh Pokmas Konservasi antara lain:

- Hilangnya tanda-tanda DPL akibat angin barat yang merusak tali batas DPL. Penggantian tali-tali tersebut memerlukan dana,

sedang Pokmas tidak memiliki dana khusus. Tanda-tanda DPL diperlukan, terutama oleh nelayan dari luar, karena umumnya nelayan lokal hafal dengan batas-batas DPL di wilayahnya.

- Terbatasnya SDM dan dana untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi, jumlah papan informasi yang minim (hanya 3 buah), menyebabkan jangkauan sosialisasi dan penyuluhan terbatas pada masyarakat yang kebetulan hadir.
- Adanya ketimpangan dalam pemberian insentif antarpengurus lembaga di desa, Ketua Pokmas Konservasi yang relatif berat bebannya tidak memperoleh insentif, sementara pengurus LPS-TK memperoleh insentif dari hasil jasa pengelolaan UEP. Bahkan kedua motivator desa (MD) mendapat honor bulanan dari COREMAP untuk melakukan kegiatannya.
- Polisi dianggap kurang serius dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang biasa melakukan pemboman, bahkan terkesan melindungi. Peraturan Desa (perdes) yang dapat dijadikan pedoman menjadi tidak efektif, selama polisi tidak serius menanggapinya. Bahkan dapat menjadi kontraproduktif terhadap LPS-TK yang selama ini bertindak keras terhadap nelayan lokal pelaku pelanggaran, sementara pelaku dari luar dibiarkan lolos oleh polisi. Penangkapan di laut hanya berhasil menangkap pelaku pemboman yang umumnya nelayan, sementara bandar di belakang nelayan (korban) selalu berhasil 'lolos' dari jeratan hukum.

Kinerja Pokmas Jender dan UEP dapat dilihat dari hasil pengelolaan *seed fund* dan perkembangan jumlah dan kesejahteraan anggota yang memanfaatkannya. Dalam praktek, kegiatan kedua Pokmas (Jender dan UEP) digabung dan sebagai pendamping adalah MD. Kegiatan kedua Pokmas baru berjalan, setelah dana untuk kredit usaha dicairkan, yaitu pada akhir tahun 2007. Sampai kajian dilakukan, jumlah dana yang sudah dicairkan berbeda untuk kedua lokasi, Desa Terapung sudah memperoleh 50 juta rupiah (2 tahap), sementara Desa Wakambangura baru separuhnya diterima (Rp25 juta).

Di Desa Terapung, jumlah dana sebesar 50 juta telah disalurkan kepada 26 anggota dari ketiga Pokmas (Pokmas Jender dan UEP, masing-masing 12 anggota dan Pokmas Konservasi 2 anggota). Pada saat kajian (April 2008) jumlah dana yang dialokasikan telah berkembang menjadi sekitar 60 juta rupiah (meningkat 20%), dan jumlah anggota meningkat menjadi 42 orang (laki-laki 16 dan perempuan 26). Sedangkan di Desa Wakambangura jumlah anggota Pokmas yang memperoleh kredit usaha pada tahap pertama (25 juta rupiah) sebanyak 15 orang dari 28 anggota yang diusulkan, mayoritas laki-laki. Sampai kajian dilakukan, dana tahap kedua belum terealisasi, sehingga 13 anggota yang sudah terdaftar, masih menunggu terkumpulnya dana minimal untuk tambahan satu kelompok (5-6 orang). Pada tahap pertama pencairan dana ini, penentuan anggota diprioritaskan pada pengurus Pokmas dan selebihnya untuk anggota lain yang membutuhkan pinjaman dan memenuhi syarat yang ditentukan. Kesepakatan ini untuk memastikan bahwa dana pinjaman akan lancar pengembaliannya. Beberapa usaha yang diusulkan antara lain pertukangan, kegiatan nelayan, *papa lele* (pedagang ikan) dan budi daya rumput laut (khususnya di Wakambangura).

Perkembangan jumlah anggota di Desa Terapung relatif lebih cepat, karena dipengaruhi terutama oleh jumlah alokasi dana yang lebih banyak daripada Desa Wakambangura. Demikian pula adanya perbedaan manajemen pengelolaan dana, di Desa Terapung dana yang terkumpul segera disalurkan ke kelompok anggota lain, sehingga anggota Pokmas terus bertambah, tidak harus menunggu terkumpulnya dana untuk kelompok yang lebih besar.

Masalah yang terutama dihadapi kedua Pokmas adalah lambatnya pencairan dana, sehingga jarak antarpemilihan anggota Pokmas (2005) dengan realisasi pencairan dana (akhir 2007) relatif jauh. Akibatnya banyak terjadi perubahan jumlah maupun orangnya, Misalnya anggota Pokmas tidak lagi memerlukan dana bergulir karena telah mendapat dana dari program lain, atau kondisi anggota Pokmas lebih baik, sehingga tidak membutuhkan bantuan lagi. Sampai kajian dilakukan, hanya 2 desa binaan (Terapung dan Koncebumi) yang pencairan *seed fund* telah mencapai 50 juta rupiah, sementara 2 desa

binaan lainnya yaitu Wakambangura dan Gumanano baru memperoleh separuhnya. Kondisi ini menimbulkan masalah bagi anggota kelompok lain yang belum mendapat giliran bantuan pinjaman (terutama di Wakambangura). Meskipun pada waktu pembentukan Pokmas tidak banyak menghadapi kendala, namun karena cairnya dana bertahap, tidak semua anggota yang sudah terdaftar dapat memperoleh sekaligus. Hal ini menimbulkan iri hati bagi anggota yang tidak/belum memperolehnya. Masalah ini berpotensi menimbulkan konflik diantara kelompok masyarakat, terutama apabila anggota yang sudah mendapat bantuan dana, merupakan orang-orang dekat pengurus. Untuk mengatasi masalah ini, pengurus Pokmas (dibantu CF, LPS-TK dan MD) memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan kredit usaha dilakukan secara bertahap, sejalan dengan pencairan dana tahap berikutnya dan juga kelancaran pengembalian cicilan.

Sistem tanggung renteng kelompok dalam Pokmas, dimaksudkan agar permasalahan yang dihadapi pengguna dana menjadi tanggung jawab kelompok. Dalam praktek, sistem ini sulit dilakukan, karena berdasarkan pengalaman, penyelesaian masalah tetap dibebankan pada individu bersangkutan, sebagai pihak yang seharusnya lebih bertanggung jawab dibandingkan kelompok.

Kegiatan COREMAP di Lokasi

Program COREMAP merupakan upaya pengelolaan sumberdaya kelautan, khususnya ekosistem terumbu karang dan sumberdaya ikannya secara berkelanjutan, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Hasil penelitian Herman Cesar (dikutip DKP, 2007:2) menunjukkan bahwa hasil perikanan pada ekosistem yang terkelola dengan baik, mencapai 5 kali lipat dibandingkan hasil pada ekosistem yang terdegradasi. Program COREMAP (Fase I) dimulai sejak tahun 1998/1999 dan berakhir 2004, kemudian dilanjutkan dengan program COREMAP (Fase II) yang direncanakan sampai tahun 2010.

Penekanan program COREMAP terutama pada upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat serta pengembangan berbagai alternatif kegiatan masyarakat, dalam upaya memenuhi kebutuhan terkait dengan pemanfaatan sumberdaya ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan COREMAP, dilakukan berbagai kegiatan baik di tingkat kabupaten maupun tingkat desa binaan. Wilayah binaan COREMAP di Kabupaten Buton sampai kajian dilakukan meliputi 12 kecamatan dan 43 desa.

Seperti dikemukakan di atas, pada tahun 2006 masyarakat di kedua lokasi kajian sudah berhasil menyusun RPTK, sehingga pemerintah desa, pihak terkait dan masyarakat setempat mempunyai pedoman yang jelas untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang dihadapi desa dalam kaitannya dengan rencana pengelolaan terumbu karang terpadu berbasis masyarakat. Diharapkan adanya RPTK juga dapat memberi peluang terutama bagi masyarakat setempat untuk melindungi, memperbaiki, memanfaatkan dan mengendalikan sumberdaya terumbu karang secara optimal, melalui prinsip-prinsip berkelanjutan. Demikian pula lembaga pendukung program dan pendamping di masing-masing lokasi umumnya sudah terbentuk di kedua lokasi yaitu LPS-TK, ketiga Pokmas (konservasi, jender dan UEP) dan MD. Demikian pula beberapa kegiatan terkait program COREMAP sudah mulai dijalankan di desa-desa binaan, sejalan dengan pencairan dana.

Pada sub-bagian ini pembahasan meliputi beberapa kegiatan COREMAP yang sedang dan telah dilakukan di kedua wilayah kajian Kecamatan Mawasangka yaitu Desa Terapung dan Wakambangura, dan masalah-masalah yang dihadapi selama ini.

- **Penyadaran Masyarakat**

Sejalan dengan dilakukannya sosialisasi COREMAP di lokasi binaan, para fungsionaris COREMAP di kabupaten sampai desa binaan memfokuskan kegiatan pada peningkatan kesadaran masyarakat, terutama untuk penyelamatan terumbu karang. Falsafah

COREMAP adalah menyelamatkan terumbu karang dengan laut dan darat. *Public awareness* merupakan salah satu program COREMAP yang menekankan pada upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk pelestarian terumbu karang, yang sebagian kondisinya di wilayah kajian sudah rusak (lihat Bab I). Kegiatan awal penyadaran masyarakat di lokasi kajian, biasanya dilakukan sejalan dengan sosialisasi COREMAP yang dilakukan oleh fasilitator dari kabupaten (PMU) dibantu konsultan.

Kegiatan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pelestarian terumbu karang, kemudian dilanjutkan setelah program COREMAP lainnya mulai dijalankan di lokasi kajian oleh fasilitator kecamatan dan desa maupun oleh LPS-TK dan Pokmas bersangkutan. Untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting konservasi terumbu karang, juga dilakukan penyuluhan tentang pelestarian terumbu karang juga sering dilakukan secara informal, baik oleh ketua LPS-TK maupun Pokmas Konservasi, terutama di setiap kesempatan banyak warga berkumpul, antara lain bincang-bincang di *gote* warga (tempat duduk dari papan/kayu di depan rumah warga), di warung maupun dalam rapat.

Penyadaran masyarakat yang lebih luas juga dilakukan melalui media seperti pemasangan papan informasi di tempat umum (misal di pantai, pasar, dan kantor desa), dan penyebaran leaflet yang intinya mengingatkan masyarakat agar peduli pada keselamatan kelautan/terumbu karang, yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat. Distribusi material ke desa binaan/sekolah berupa kaos, kalender atau poster dikelola oleh LPS-TK.

Sebagai daerah pantai, sejak dini anak-anak perlu dikenalkan dengan kondisi wilayahnya. Media paling efektif adalah melalui pendidikan di sekolah-sekolah, terutama melalui pelajaran mulok (muatan lokal) di tingkat SMP/MTs dan melalui buku pelajaran bahasa Indonesia untuk tingkat SD.

- **Sosialisasi COREMAP**

Sebelum program COREMAP di jalankan di lokasi binaan, sosialisasi COREMAP dan program-programnya, telah dilakukan oleh PMU dan konsultan dari kabupaten. Sosialisasi ke masyarakat juga dilakukan menjelang pembentukan Pokmas di lokasi kajian. Demikian pula setelah terbentuk lembaga pendukung seperti LPS-TK (2005) dan Pokmas (2006), sosialisasi program dan mekanisme pengelolaan program semakin sering dilakukan di daerah binaan oleh Seto dan/atau CF, dibantu oleh pengurus LPS-TK dan MD di lokasi. Keterbatasan jumlah SDM yang memahami permasalahan lingkungan, menyebabkan sosialisasi dan pemberian informasi terbatas pada yang hadir dalam acara tersebut.

- **Pelatihan**

Di Desa Terapung pelatihan –pelatihan terkait dengan program COREMAP yang pernah diikuti oleh pengurus LPS-TK, Pokmas dan lain-lain antara lain:

- Pelatihan untuk MD, tentang tugas-tugas MD.
- Pelatihan tentang konservasi/DPL sering dilakukan, 2 kali latihan di Bau-bau (tahun 2005 dan 2007), yaitu tentang pengawasan laut dan teori pengawasan. Pelatihan diikuti 4 orang dari lokasi binaan yaitu Kepala Desa, ketua Pokmas Konservasi, MD dan ketua LPS-TK. Dalam pelatihan tersebut juga dibahas masalah yang berkaitan dengan penentuan DPL Pasi Ladio di Kecamatan Mawasangka, seluas 800X500m. Setelah pelatihan terjadi perubahan lokasi DPL dari Pasi Ladio ke Magirasa (600X400m), karena lokasi Pasi Ladio berdekatan dengan air tawar, sehingga kurang bagus untuk perkembangan karang. Namun DPL tersebut kini sulit dikenal nelayan terutama dari luar, karena banyak tali yang putus karena kencangnya angin barat. Tali DPL yang sudah rusak dibiarkan tanpa penggantian, karena Pokmas Konservasi tidak mempunyai dana operasional. Demikian pula pelatihan

formal untuk masyarakat di lokasi juga belum pernah dilakukan, dan hanya dilakukan secara informal .

- Pelatihan lain yang dilakukan di kabupaten adalah untuk Pokmas, sehingga pesertanya adalah ketua-ketua Pokmas. Pelatihan ini semacam pembekalan bagi ketua Pokmas untuk memahami fungsi dan mekanisme pengelolaan dana Pokmas (terutama UEP).
- Pelatihan pembukuan tahun 2007 diikuti oleh 7 orang dari Desa (yaitu ketua LPS-TK, ketua dan bendahara LKM, bendahara Pokmas dan masyarakat) dilakukan di lokasi, dengan mendatangkan pelatih dari kabupaten (LSM Pelintas).
- Pelatihan dan sosialisasi budidaya rumput laut (1 hari), pernah dilakukan oleh COREMAP/Unida untuk Kecamatan Mawasangka di Desa Wakambangura. Peserta adalah wakil dari 4 desa binaan. Peserta dari tiap desa 5 orang, yaitu guru (2 orang), masyarakat (2 orang) dan ketua LKM (ibu desa) sebagai koordinator.

• Edukasi

Program edukasi dalam COREMAP menjadi bagian dari *public awareness*. Seperti dikemukakan di atas, penyadaran masyarakat tentang pelestarian terumbu karang dilakukan antara lain dengan pendidikan sekolah, melalui kurikulum, menambah materi pelajaran dalam mata pelajaran muatan lokal (mulok), dan/atau menyediakan buku-buku terkait pelestarian terumbu karang di perpustakaan sekolah atau umum. Di tingkat kabupaten, kerjasama DKP dan Diknas sudah berjalan, bahkan sedang dilakukan koordinasi antara DKP dan Diknas untuk memasukkan materi COREMAP dalam kurikulum sekolah dari SD sampai SMA, yang ditargetkan masuk kurikulum sekolah pada tahun ajaran 2009. Beberapa hal yang sudah dilakukan DKP berkaitan dengan kerjasama ini adalah:

- Menyertakan Diknas sebagai anggota Dewan Pesisir
- Mengundang Diknas dalam acara COREMAP untuk sekolah.

- Beberapa guru SD/SMA diikutsertakan oleh Diknas dalam workshop masalah kurikulum kelautan yang diadakan oleh COREMAP di Makasar. Workshop guru ini diadakan setiap tahun oleh COREMAP, dengan sasaran yg berbeda (SD dan SMP).
- Menyediakan bahan-bahan untuk Mulok (antara lain buku-buku dari LIPI), meskipun belum masuk kurikulum, beberapa desa binaan sudah mengimplementasikan dalam pelajaran-pelajaran yang ada di kurikulum.
- Sosialisasi mata pelajaran dari COREMAP untuk mengajarkan Mulok terumbu karang, diadakan pada bulan Juli 2007 di Bau-bau, dengan pesertanya adalah kepala sekolah. Sosialisasi dilanjutkan pada bulan September 2007 di Bau-bau, untuk dewan guru dan pengambilan materi Mulok. Desa Terapung diwakili oleh Kepala UPTD, dengan harapan dapat mentransfer ke guru-guru di sekolah-sekolah desa binaan. Desa Wakambangura diwakili oleh kepala sekolah. Sosialisasi ini merupakan kerjasama antara DKP dengan LPP (Yayasan pesisir), dan dihadiri oleh Diknas Kabupaten.

Seperti dikemukakan di atas, penyadaran masyarakat di lokasi kajian juga dilakukan di sekolah-sekolah SMP/Mts, dengan menambah mata pelajaran ‘kelautan’ yang diselipkan di mata pelajaran Mulok. Bahkan guru Mulok di Desa Terapung adalah salah satu MD di daerah tersebut. Di tingkat SD, materi diselipkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, antara lain dengan tugas membuat karangan ‘Perlindungan Terumbu Karang’. Di Desa Wakambangura, mata pelajaran tentang ‘terumbu karang’ dimasukkan sebagai bagian Mulok yang diajarkan dari kelas 1-6. Meskipun ‘terumbu karang/kelautan’ belum masuk kurikulum, beberapa guru yang juga menjadi pengurus COREMAP, atas kesadaran sendiri (tanpa waktu khusus) menyelipkannya dalam setiap kesempatan mata pelajaran terkait yang menjadi tanggung jawabnya. Khusus tentang terumbu karang diselipkan dalam mata pelajaran IPS, antara lain tentang bahan-bahan perusak karang (bom dan racun). Penyadaran tentang pelestarian terumbu karang akan lebih efektif apabila masuk dalam kurikulum

sekolah, sehingga disediakan waktu khusus untuk mata pelajaran tersebut. Tanpa waktu khusus, selain terbatas waktu pelaksanaannya, juga mengurangi jam pelajaran lainnya yang akan berdampak pada capaian target sekolah tersebut.

Permasalahan timbul karena adanya perbedaan Mulok di sekolah desa binaan dengan sekolah di luar desa binaan. Mulok (tentang terumbu karang) di daerah binaan, tidak termasuk sebagai bahan ujian akhir sekolah (UAS). Sedang di luar desa binaan pelajaran untuk Mulok masih tetap 'Bahasa Daerah' (Buton) yang menjadi bahan UAS. Akibatnya timbul dilemma di sekolah binaan COREMAP, apakah meneruskan Mulok terumbu karang dengan resiko kurang jam pelajaran untuk UAS, atau kembali fokus pada bahasa daerah, sehingga mengorbankan materi terumbu karang dalam Mulok. Dilema ini telah dikemukakan ke Diknas, dan keputusan sementara, sekolah harus kembali fokus ke Mulok Bahasa Daerah, khususnya untuk klas 6, dan Mulok terumbu karang dihentikan. Untuk mengatasinya perlu dibicarakan lebih serius, apakah diadakan pembagian waktu antara kedua materi Mulok, atau memasukkannya dalam kurikulum tersendiri.

- **Kegiatan pengawasan**

Untuk menjaga pelestarian terumbu karang, di setiap lokasi binaan (43 desa), masyarakat dianjurkan untuk membentuk DPL (daerah pengawasan laut), dengan difasilitasi oleh COREMAP. Di kedua lokasi kajian pembentukan DPL telah dilakukan, sehingga pengawasan difokuskan ke lokasi DPL yang telah disepakati bersama masyarakat. Seperti diuraikan di atas (Pokmas dan kinerjanya), kegiatan monitoring dan pengawasan terumbu karang, telah banyak dilakukan di lokasi binaan baik di lokasi DPL maupun di luar. Kegiatan ini umumnya dikoordinir oleh Pokmas Konservasi dengan melibatkan komponen masyarakat yang dikenal dengan sistem pengawasan berbasis masyarakat (Siswasmas), baik perseorangan maupun kelompok (Pokwasmas). Bahkan beberapa anggota Pokmas Konservasi yang ditunjuk sebagai *reef watcher* bertugas mengawasi DPL, untuk memastikan bahwa nelayan yang sedang menangkap ikan

tidak melakukan pelanggaran seperti pemboman, obat bius dan menggunakan alat tangkap lain yang merusak karang (trawl dan redi). Meskipun Pokwasmas relatif baru di lokasi kajian, Pokmas Konservasi terutama di Desa Terapung telah berhasil menambah anggota kelompok menjadi 20 orang untuk meningkatkan kegiatan monitoring dan pengawasan. Sementara di Desa Wakambangura, Pokwasmas yang relatif baru dibentuk, cenderung masih belum difungsikan secara efektif, karena belum banyak anggota kelompoknya.

Meskipun Pokmas Konservasi tidak mempunyai dana untuk operasional dan tidak mempunyai sarana yang memadai untuk melakukan tugasnya, namun dalam menjalankan tugas pengawasan, telah berhasil menyadarkan masyarakat untuk secara swadaya melakukan pengawasan, agar praktek penangkapan ikan oleh nelayan tidak melanggar DPL. Berbekal Perdes yang telah disiapkan di wilayah kajian, masyarakat bahu membahu dalam melakukan pengintaian dan pengejaran pelaku pengrusakan karang. Seperti dikemukakan di atas, aktivitas pengawasan juga dilakukan secara periodik oleh tim patroli yang terdiri dari beberapa komponen masyarakat (termasuk masyarakat desa binaan), sehingga beberapa kali melakukan penangkapan pelaku pelanggaran. Meskipun praktek penangkapan ikan yang merusak karang masih terjadi di wilayah kajian (terutama pembiusan), dampak kegiatan pengawasan dan monitoring yang serius dilakukan masyarakat, telah nampak yaitu menurunnya praktek yang merusak karang di wilayah ini (terutama pemboman). Masyarakat di lokasi binaan mulai merasakan meningkatnya populasi ikan karang di wilayahnya, terutama di Desa Wakambangura, sehingga meningkatkan aktivitas warga dalam kegiatan kenelayanan.

- **Kegiatan UEP (Unit Ekonomi Produktif)**

UEP merupakan salah satu program COREMAP (dikordinir oleh MCS (Monitoring Controlling Services) untuk membantu usaha ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokasi binaan COREMAP. Di lokasi binaan, kegiatan UEP di

bawah koordinasi LPS-TK dan secara teknis keuangan dibantu LKM. Melalui program UEP, setiap desa binaan COREMAP direncanakan memperoleh dana bantuan usaha sebesar 50 juta rupiah, untuk disalurkan pada kelompok usaha yang dibentuk di masing-masing Pokmas. Setiap anggota Pokmas yang terdaftar sebagai penerima dana pinjaman adalah anggota yang telah memenuhi syarat yang ditentukan.

Sesuai aturan, mekanisme penyaluran dana, calon peminjam harus mengisi formulir di LKM dan harus mendapat persetujuan dari LPS-TK. Secara teknis dana disalurkan melalui LKM - Pokmas UEP – anggota kelompok. Besarnya pinjaman usaha per anggota kelompok maksimal 2,5 juta rupiah (disesuaikan dengan kebutuhan), dengan bunga 1,2 persen per bulan. Pengelolaan dana di kelompok masing-masing seperti besarnya dana pinjaman per individu, lama pinjaman dan sanksi yang diberlakukan apabila menunggak pembayaran, ditentukan berdasarkan kesepakatan internal dalam Pokmas yang bersangkutan. Sebelum dana disalurkan ke anggota kelompok, LPS-TK memberi arahan pada anggota Pokmas/peminjam tersebut. Pemilihan anggota kelompok melalui seleksi internal dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Implementasi penyaluran dana UEP di lokasi binaan:

Dalam implementasinya aktivitas Pokmas UEP digabung dengan Pokmas Jender. Sebagai pendamping adalah MD di masing-masing lokasi binaan. Oleh karena dana bantuan usaha baru cair pada akhir tahun 2007, penyaluran dana pada anggota Pokmas baru dilakukan pada awal tahun 2008. Untuk tahap pertama, di kedua lokasi kajian prioritas dana diberikan pada anggota yang dipastikan dapat mengembalikan dana tepat waktu, sehingga dapat menjadi contoh bagi kelompok berikutnya. Anggota yang terpilih menerima dana UEP harus memenuhi syarat tertentu yang telah disepakati antara lain:

- Mempunyai usaha/ketrampilan khusus dalam berbisnis
- Tidak tercatat sebagai penunggak pinjaman

- Belum pernah mendapat bantuan dari program lain
- Membutuhkan dana tersebut untuk pengembangan usaha.

Sedangkan mekanisme penyaluran dana UEP ke peminjam (anggota Pokmas):

- Peminjam harus membawa KTP pada waktu menerima dana.
- Menyetujui syarat-syarat pembayaran, waktu pembayaran, besarnya cicilan, bunga dan denda/sanksi apabila peminjam menunggak.

Pencairan dana di Desa Terapung sebanyak 50 juta rupiah telah berlangsung 2 tahap, dan telah disalurkan kepada 26 anggota ketiga Pokmas, yaitu Pokmas UEP dan Jender (masing-masing 12 anggota), dan Pokmas Konservasi (2 anggota). Masing-masing anggota memperoleh antara 1-2,5 juta rupiah. Di Desa Wakambangura, pencairan dana baru sekali sebanyak 25 juta rupiah, sehingga hanya cukup untuk 15 orang (laki-laki 13, perempuan 2), masing-masing anggota memperoleh antara 1-2 juta rupiah. Aturan pinjaman dengan sistem tanggung renteng, yang berarti apabila ada anggota bermasalah dalam pembayaran, resiko ditanggung bersama kelompok masing-masing. Perkembangan jumlah anggota di kedua lokasi juga berbeda dipengaruhi oleh besarnya dana yang disalurkan dan mekanisme penyaluran dana yang disepakati masing-masing kelompok di lokasi binaan.

Mekanisme penyaluran dana berdasarkan kesepakatan dengan anggota kelompok yang disesuaikan dengan kondisi usaha masing-masing desa binaan. Di Terapung diterapkan sistem denda bagi penunggak pembayaran. Apabila peminjam dana terlambat membayar cicilan dari waktu yang telah disepakati (7 hari, dikenakan denda 3000 rupiah per hari. Sedangkan di Wakambangura, bagi peminjam yang menunggak pembayaran sesuai batas waktu yang ditentukan (3 bulan), disepakati untuk penyelesaian secara hukum. Akibatnya tunggakan pinjaman di Wakambangura mencapai 20 persen (terutama usaha budi daya rumput laut). Menurut LPS-TK setempat, sistem denda sulit diterapkan, karena memberatkan anggota. Untuk biaya operasional Pokmas dan lain-lain, diperoleh dari hasil jasa penyaluran dana (bunga

dan denda). Pengalokasian hasil jasa tersebut disepakati untuk tambahan modal (30%), LKM (25%), LPS-TK (25%) dan administrasi (20%).

Pengelolaan dana UEP di kedua lokasi binaan relatif berbeda. Di Desa Terapung mekanisme penyaluran dana, cenderung mengikuti aturan yaitu melibatkan lebih banyak pengurus lembaga terkait (LPS-TK, LKM, Pokmas dan MD). Sementara di Desa Wakambangura, keterlibatan lembaga lain cenderung hanya formalitas, pelaku utama penyaluran dana UEP didominasi orang-orang tertentu yaitu ketua LPS-TK dan bendahara Pokmas UEP, yang kebetulan merupakan orang terdekat. Pengurus lainnya seperti LKM dan MD, cenderung kurang mengetahui mekanisme penyaluran dana dan rincian dana untuk masing-masing anggota penerima. Hal ini dipengaruhi oleh mekanisme pembentukan lembaga-lembaga tersebut dan keseriusan SDM pendukungnya.

Berbagai kegiatan COREMAP di kedua lokasi kajian menunjukkan bahwa sosialisasi dan penyadaran masyarakat untuk pelestarian terumbu karang, telah menunjukkan hasil, minimal adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan DPL. Hasil yang dirasakan masyarakat dengan masuknya program COREMAP adalah menurunnya praktek penangkapan ikan yang merusak karang, terutama praktek pemboman di wilayah DPL, sehingga populasi ikan dan jenisnya meningkat, bahkan beberapa jenis ikan yang pernah hilang, kini muncul lagi (antara lain ikan biji angka). Demikian pula adanya berbagai pelatihan sesuai dengan fungsi Pokmas, menyebabkan pengalaman masyarakat dalam mengelola dana meningkat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mengingat bantuan dana UEP untuk anggota Pokmas masih relatif baru, hasilnya dalam meningkatkan usaha anggota belum nampak, terutama apabila dilihat dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota Pokmas bersangkutan. Terbatasnya jumlah dana bantuan usaha dibandingkan animo masyarakat yang menginginkan bantuan pinjaman tersebut, diperlukan kesabaran anggota Pokmas untuk memperolehnya sesuai gilirannya. Masalah ini bertambah kompleks, karena pencairan dana ke lokasi binaan relatif lambat, sehingga waktu

dan besarnya dana (di beberapa lokasi binaan) menjadi kurang sesuai dengan rencana COREMAP. Minimnya pengetahuan SDM bagi pengurus yang terlibat, juga menyebabkan pekerjaan bertumpuk pada orang-orang tertentu yang mampu melaksanakannya. Diperlukan pelatihan teknis lebih banyak untuk pengurus yang terlibat, sehingga dana bantuan dapat dikelola lebih profesional dan lebih tepat sasaran.

4.2. Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan/Program COREMAP

Bagian ini membahas pengetahuan masyarakat tentang program dan kegiatan COREMAP yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005, serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai program kegiatan COREMAP. Pembahasan tentang pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan program COREMAP meliputi tingkat kabupaten maupun tingkat lokasi kajian.

4.2.1. Tingkat Kabupaten

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan/program COREMAP di Buton cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran program COREMAP selama 3 tahun, adalah sebagai berikut: Rp. 1.093.734.636 (2005), Rp. 3.220.207.000,- (2006) dan Rp. 8.553.147.318,- (2007). Anggaran ini digunakan untuk membiayai komponen program/kegiatan COREMAP, yakni CRITC, *Community Awareness*, MCS, dan CBM. Masing-masing komponen COREMAP memiliki program atau kegiatan yang saling melengkapi yang muaranya untuk mendukung keberhasilan pengelolaan terumbu karang. Masing-masing program dan kegiatan tentu saja memiliki target sasaran yang berbeda.

Partisipasi masyarakat adalah salah target sasaran sebuah program atau kegiatan yang telah dijabarkan. Sebuah program kegiatan ada yang tidak memilih target sasaran partisipasi masyarakat atau sebaliknya, sekalipun nantinya diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program COREMAP.

Misalnya, kajian matapencaharian alternatif adalah salah satu kegiatan COREMAP yang tidak perlu membutuhkan partisipasi masyarakat, tetapi hasil kajian ini nantinya dapat diterapkan yang diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan mata pencaharian alternatif (MPA) yang diusulkan dalam hasil kajian tersebut. Jadi dalam konteks ini, tidak ada partisipasi masyarakat langsung dalam kegiatan kajian MPA. Berbeda dengan kegiatan/program COREMAP, seperti pilot project pengembangan budi daya rumput laut dan pengolahan pasca panen rumput laut, kegiatan ini langsung membutuhkan partisipasi masyarakat.

Dengan mengambil perbandingan dua kegiatan COREMAP di atas, maka pengertian partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu, *pertama*, partisipasi masyarakat dilihat sebagai metodologi pendekatan agar tujuan program kegiatan dapat berhasil. Tujuan kegiatan/program itu lebih bersifat untuk kepentingan pelestarian lingkungan, walaupun dalam jangka panjang nantinya masyarakat dapat memetik keuntungan ekonomi di masa mendatang apabila program pelestarian lingkungan berhasil. Jadi, dampak keuntungan masyarakat dari program COREMAP yang bersifat jangka panjang jika kegiatan pelestarian lingkungan berhasil. Sebagai contoh adalah diikutsertakan warga masyarakat dalam program/kegiatan pelatihan selam, penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL). Ketrampilan menyelam masyarakat sangat berguna untuk melakukan pengawasan dan pemantauan kondisi terumbu agar tetap terjaga kondisinya. Ketrampilan selam dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dapat merusak kelestarian terumbu karang. Jadi dengan demikian, pengertian partisipasi masyarakat mengandung pengertian sebagai strategi pendekatan keberhasilan program/kegiatan. *Kedua*, adalah partisipasi masyarakat yang berhubungan langsung dengan tujuan program/kegiatan COREMAP, seperti kegiatan/program COREMAP yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berangkat dari uraian di atas, maka untuk melihat partisipasi masyarakat di tingkat kabupaten dapat dilakukan identifikasi apakah unsur masyarakat terlibat dalam setiap progra kegiatan tersebut, dan

bagaimana menempatkan masyarakat sebagai target sasaran atau strategi pendekatan program kegiatan. Tabel-tabel di bawah ini menunjukkan bahwa tidak semua program/kegiatan COREMAP yang berjalan selama tiga tahun selalu melibatkan unsur masyarakat. Program CRITC, misalnya. Selama tiga tahun pelaksanaan program CRITC tercatat hanya ada 2 kegiatan dari 12 kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat. Kedua kegiatan itu adalah pelatihan selam dasar (2005) dan pelatihan terumbu karang (2006). Sedikitnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini sebagaimana disebutkan dimuka kemungkinan kegiatan ini bukan program sosial-ekonomi masyarakat, sebaliknya pelibatan unsur masyarakat dalam kegiatan selam agar masyarakat ikut mendukung agar tujuan program CRITC berhasil.

Tabel 4.1. Kegiatan/Program CRITC dan Keterlibatan Unsur Masyarakat

Kegiatan (2005)	Unsur Masy.	LSM	Aparat Desa/Kec.	Instansi Pemt.	PMU
1) Pelatihan Selam Dasar (20 orang)	X	X	-	X	X
2) Pelatihan Terumbu karang (20 orang)	-	X	X	X	X
Kegiatan (2006)	Unsur Masy.	LSM	Aparat Desa/Kec.	Instansi Pemt.	PMU
3) Pelatihan Pemantaun Terumbu Karang (25 orang)	X	-	-	-	-
4) Survey Kondisi Sosek	--	-X	-X	-	X
5) Publikasi, Penyimpanan dan Penyebaran dan pertukaran data	-	-	-	-	X

Kegiatan (2007)	Unsur Masy.	LSM	Aparat Desa/Kec.	Instansi Pemt.	PMU
6) Publikasi, Filling & Tukar data	-	-	-	-	X
7) Pengadaan dan Pemasangan VSAT	-	-	-	-	X
8) Implementasi dan Penelitian Lokal	-	-	-	-	X
9) Pelatihan Pemantauan Ikan berbasis masyarakat (20 orang)					X
10) Pelatihan BME, Sosek, & Ekologi (31 orang)	-	-	X	-	-
11) Lokakarya tingkat kabupaten (23 orang)	-	-	-	X	X
12) <i>On the job training</i> -pelatihan GIS, WEB, dan data base. (6 orang)	-	-	-	-	X

Sumber: Data Primer Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK-LIPI, 2008.

Dibandingkan dengan CRITC, program CBM di Buton selama tiga tahun ini lebih banyak melibatkan unsur masyarakat dalam kegiatannya. Kemungkinan dipengaruhi oleh adanya nama masyarakat dalam programnya yaitu *-community based management*. Dari 28 kegiatan program CBM terdapat 17 kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat, dengan rincian tahun 2005 (1 kegiatan), tahun 2006 (5 kegiatan), dan tahun 2006 (11 kegiatan) . Hal ini bisa dimengerti karena program CBM adalah program-program yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat. Namun demikian, apakah pelibatan

unsur masyarakat dalam kegiatan cenderung menggunakan partisipasi masyarakat sebagai strategi pendekatan program atau sebagai target sasaran langsung dari kegiatan tersebut.

Tabel 4.2. Kegiatan/Program CBM dan Keterlibatan Unsur Masyarakat

Kegiatan (2005)	Unsur Masy.	LSM	Aparat Desa/Kec.	Instansi Pemt.	PMU
1) Workshop CBM tingkat kabupaten (67 orang)	-	-	-	X	X
2) Pelatihan SETO &CF (30 orang)	-	-	-	-	X
3) Pelatihan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan	-	X	-	-	X
4) Musyawarah desa penyusunan profil metode PRA (28 desa)	X	-	X	-	-
5) Kajian mata pencaharian alternatif (28 desa)	-	-	-	-	X
6) Musyawarah desa penyusunan RPTK (28 desa)	-	-	X	-	X
Kegiatan (2006)	Unsur Masy.	LSM	Aparat Desa/Kec.	Instansi Pemt.	PMU
7)					
8) Pelatihan Daerah Perlindungan Laut (DPL)	X	-	X	-	X
9) Pembentukan DPL (28 DPL)	X	-	X	-	X
10) Penyusunan Perdes (28 desa)	X	X	X	-	X

11) Workshop Pengembangan Perdes	-	-	X	X	X
12) Pelatihan Budi daya Laut (28 nelayan)	X	-	-	-	X
13) Pelatihan Teknis dan Manajemen Perikanan (52 orang)	X	-	-	-	X
Kegiatan (2007)	Unsur Masy.	LSM	Aparat Desa/Kec.	Instansi Pemt .	PMU
14) Pelatihan SETO, CF dan MD	-	-	-	-	X
15) Pelatihan Manajemen Proyek	-	-	-	-	X
16) Musyawarah Desa Penyusunan Profil Metode PRA	X	-	X	X	X
17) Musyawarah Desa Penyusunan RPTK	X	-	X	-	X
18) Training Village Financial Management (30 orang/15 desa)	X	-	-	-	X
19) Pilot Project Pengembangan Usaha Perikanan (10 orang/kel)	X	-	-	-	X
20) Pilot Project pengelolaan pasca panen (16 desa)	X	-	-	-	X
21) Workshop sertifikasi perdagangan ikan karang (45 orang)	X	X	X	-	X

22) Pembangunan & Rehabilitasi Pondok Informasi (45 Pondok)	X	-	X	-	X
23) Block Grant untuk pembangunan infrastruktur (village grant) (24 desa)	X	-	X	-	X
24) Block Grant untuk revolving fund (43 desa)	X	-	-	-	X
25) Pengembangan dan pembentukan DPL (15 DPL, a 10 Ha)	X	-	X	-	X
26) Penyusunan Perdes (15 desa)	X	-	X	-	X
27) Pembangunan Radio FM/AM Masyarakat	-	-	-	-	X
28) Pelatihan Manajemen Keuangan dan Pengadaan (20 orang)	-	-	-	-	X
29) Penyusunan Renstra Pengelolaan Terumbu karang	-	-	-	-	X

Sumber: Data Primer Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK-LIPI, 2008.

Tahun 2005, satu-satunya program kegiatan yang melibatkan masyarakat adalah musyawarah desa penyusunan profil metode PRA. Program/kegiatan yang menyebutkan 28 desa sebagai pesertanya, diduga partisipasi masyarakat bukan sebagai sasaran langsung dari kegiatan ini. Kecenderungan ini terjadi pula pada tahun 2006. Beberapa kegiatan program CBM yang menggunakan partisipasi masyarakat sebagai strategi pendekatan program, adalah sebagai berikut : Pelatihan Daerah Perlindungan Laut (DPL), Pembentukan DPL (28 DPL), Penyusunan Peraturan Desa, Workshop

Pengembangan Peratran Desa, dan Pelatihan Teknis dan Manajemen Perikanan. Satu-satunya program kegiatan CBM yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai target sasaran adalah pelatihan budidaya laut yang melibatkan 28 nelayan.

Partisipasi masyarakat sebagai metode pendekatan program juga mewarnai kegiatan-kegiatan CBM di tahun 2007. Sebagian besar kegiatan program CBM yang melibatkan unsur masyarakat menempatkan partisipasi masyarakat sekedar sebagai metode pendekatan atau mungkin hanya sebatas konsultatif dengan masyarakat.. Sementara itu, kegiatan program CBM yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai target sasaran langsung kegiatan program CBM sangat sedikit, yakni *Block Grant* untuk pembangunan infrastruktur (*village grant*) yang melibatkan 24 desa dan *Block Grant* untuk *revolving fund* untuk 43 desa.

Tabel 4.3. Kegiatan/Program MCS dan Keterlibatan Unsur Masyarakat

Kegiatan (2005)	Unsur Masy.	LSM	Aparat Desa/Kec.	Instansi Pemt.	PMU
1) Pelatihan investigasi penangkapan ikan tidak ramah lingkungan	-	-	-	X	X
Kegiatan (2006)	Unsur Masy.	LSM	Aparat Desa/Kec.	Instansi Pemt.	PMU
2) Pengembangan Siswasmas	X	-	-	X	X
3) Lokakarya startegi penyadaran masyarakat (28 Kepdes)	-	-	X	-	X
Kegiatan (2007)	Unsur Masy.	LSM	Aparat Desa/Kec.	Instansi Pemt.	PMU
4) Pelatihan PPNS (3 orang)	-	-	-	X	-
5) Collaborative MCS	-	-	-	X	X
6) Pelatihan Siswasmas (36 orang)	X	-	-	-	X
7) Apel Siswasmas	X	-	X	X	X

Sumber: Data Primer Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK-LIPI, 2008.

Kegiatan program MCS selama tiga tahun di Buton jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan dengan kegiatan CBM dan CRITC. Begitu pula dalam hal melibatkan unsur masyarakat, baru tahun 2006 dan 2007, kegiatan/program MCS yang melibatkan unsur masyarakat. Pada tahun 2005, tidak ada kegiatan program MCS yang melibatkan unsur masyarakat. Program kegiatan MCS yang melibatkan unsur masyarakat hanya pengembangan Siswasmas, Pelatihan Siswasmas, yang melibatkan 36 orang, dan apel Siswasmas. Dari sini jelas, partisipasi masyarakat ditempatkan sebagai metode pendekatan dengan tujuan program MCS dapat berjalan dengan baik. Kecenderungan ini bisa dipahami karena masyarakat dalam program MCS adalah hanya salah satu pemangku kepentingan (*stake holder*). MSC tampaknya lebih melihat aparat penegak hukum sebagai stakeholder utama. Banyak unsur-unsur lain yang terlibat dalam program MCS, seperti aparat kepolisian, TNI, PPNS, dan aparat penegak hukum lainnya.

Tabel 4.4. Kegiatan/Program Public Awareness dan Keterlibatan Unsur Masyarakat

Kegiatan (2005)	Unsur Masy.	LSM	Aparat Desa/Kec.	Instansi Pemt.	PMU
Pelatihan komunikasi (21 orang)	-	-	-	X	X
Pelatihan Jurnalistik (26 orang)	X	-	-	X	X
Pengadaan Materi PA	-	-	-	-	X
Kegiatan (2006)	Unsur Masy.	LSM	Aparat Desa/Kec.	Instansi Pemt.	PMU
Workshop tentang Materi Pembelajaran Muatan Lokal (7 kec.)	-	-	-	X	X
Pengadaan materi PA	-	-	-	-	X
Lokakarya Strategi Penyadaran Masyarakat (28 Kades/7 Kec.)	-	-	X	-	X
Lomba Cerdas Cermat Tingkat SD, SLTP dan SLTA	X	-	-	-	X
Lomba melukis SD	X	-	-	-	X

Kegiatan (2007)	Unsur Masy.	LSM	Aparat Desa/Kec.	Instansi Pemt.	PMU
Pelatihan komunikasi/PA (25 orang)	-	-	-	-	X
Workshop Guru untuk mengembangkan muatan lokal	-	-	-	X	X
Kontes Inovator muda	X	-	-	-	X
Pertandingan sepak bola tingkat kecamatan (14 kecamatan)	X	-	-	-	X

Sumber: Data Primer Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK-LIPI, 2008.

4.2.2. Tingkat Kecamatan (Mawasangka)

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, sosialisasi program COREMAP telah banyak dilakukan di daerah binaan. Demikian pula implementasi beberapa program telah berjalan di kedua lokasi kajian melalui ketiga Pokmas yang telah dibentuk sebelumnya. Sesuai dengan aturan, pembentukan lembaga-lembaga pendukung COREMAP seperti LPS-TK dan Pokmas di kedua lokasi kajian, melalui proses yang melibatkan semua komponen masyarakat, tokoh maupun anggota masyarakat lainnya. Proses pembentukan lembaga dan pelaksanaan program yang melibatkan masyarakat memungkinkan sebagian masyarakat mengetahui lebih baik tentang COREMAP beserta program-programnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan sebagian masyarakat juga terlibat dalam kepemimpinan maupun pemanfaat program-programnya. Bagian ini membahas sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap COREMAP dan pembentukan LPS-TK, serta bagaimana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan COREMAP tertentu, seperti UEP, pelatihan, pendampingan dan pengawasan. Pembahasan untuk masing-masing lokasi kajian, terutama berdasarkan survei terhadap responden individu dalam 100 rumah tangga sampel dan wawancara terbuka terhadap informan terkait. Responden individu adalah salah satu

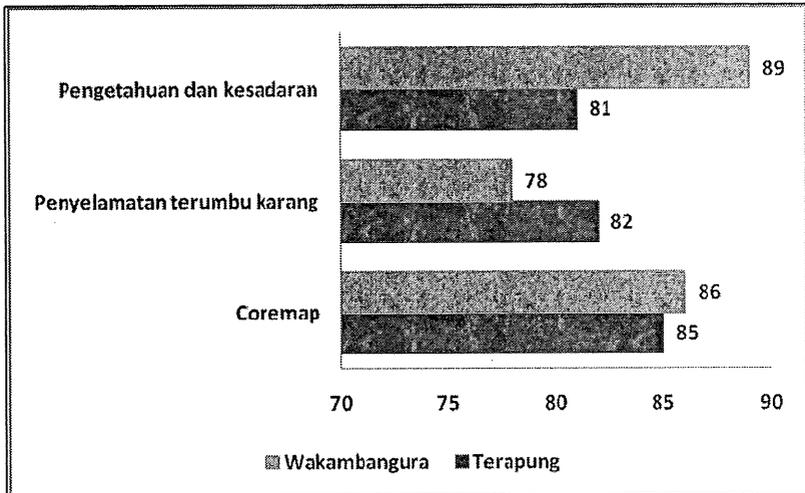
anggota rumah tangga sampel yang berusia 15 tahun ke atas, yang dipilih secara acak.

- **Pengetahuan tentang COREMAP**

Pengetahuan tentang COREMAP didasarkan pada beberapa pertanyaan dalam survei yang meliputi keberadaan proram COREMAP, kegiatan penyelamatan terumbu karang dan kegiatan-kegiatan lain terkait program COREMAP di kedua lokasi kajian. Jumlah individu sebagai responden terpilih sebanyak 129 orang, 74 orang di Desa Terapung dan selebihnya (55 orang) di Desa Wakambangura. Hasil tabulasi dari jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen responden di kedua lokasi kajian mengetahui tentang COREMAP dan program-programnya. Meskipun untuk beberapa pertanyaan menunjukkan perbedaan tingkat pengetahuan kedua lokasi, namun perbedaannya relative kecil dan saling mengimbangi.

Penelusuran lebih mendalam pada setiap pertanyaan, perbedaan pengetahuan antarlokasi terdapat pada pengetahuan terhadap 'kegiatan penyelamatan terumbu karang' dan pengetahuan 'kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran pentingnya pelestarian terumbu karang'. Untuk kegiatan penyelamatan terumbu karang, proporsi responden di Terapung yang mengetahui lebih besar daripada Wakambangura (masing-masing sekitar 82 dan 78%). Sebaliknya untuk kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran pentingnya pelestarian karang, proporsi responden di Wakambangura (sekitar 89%) lebih besar dari Terapung (sekitar 81%). Hal ini dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi dan penyuluhan tentang penyelamatan terumbu karang yang dilakukan terhadap kelompok – kelompok masyarakat, oleh Pokmas Koservasi maupun lembaga pendukung lainnya (Grafik 4.1).

Grafik 4.1. Pengetahuan Responden ttg COREMAP (%)



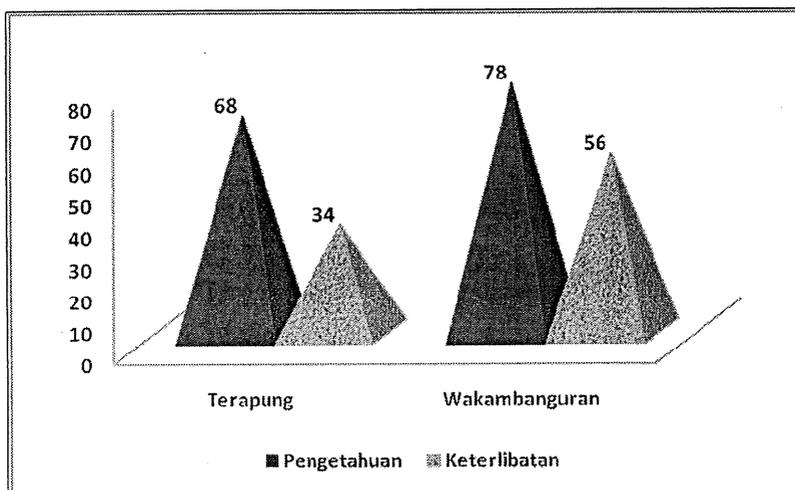
Sumber: Data Primer Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK-LIPI, 2008.

- **Pengetahuan dan Keterlibatan Dalam Pembentukan LPS-TK**

LPS-TK merupakan lembaga pengelola COREMAP di setiap desa binaan. Pembentukan LPS-TK dilakukan pada awal program COREMAP akan dijalankan di lokasi binaan. Pembentukan dan pemilihan pengurusnya dilakukan dengan sistem musyawarah yang melibatkan banyak komponen penduduk. Konon waktu pembentukan LPS-TK di kedua lokasi kajian, lebih dari 100 penduduk hadir, terdiri dari pemerintah desa, tokoh masyarakat dan komponen masyarakat lainnya. Hampir pada setiap kegiatan COREMAP di lokasi binaan melibatkan LPS-TK. Perannya yang menonjol pada setiap kegiatan COREMAP, memungkinkan pengurusnya lebih dikenal daripada lembaga COREMAP lainnya. Hasil survei di kedua lokasi kajian memang menunjukkan kecenderungan bahwa pembentukan LPS-TK diketahui oleh lebih dari 70 persen responden, dan proporsi responden di Wakambangura (sekitar 78%) lebih tinggi daripada di Terapung

(sekitar 68%)(Grafik 4.2). Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh lokasi permukiman penduduk Desa Wakambangura yang cenderung lebih mengelompok di sepanjang jalan raya, dibandingkan permukiman di Terapung yang relatif tersebar dan agak berjauhan jarak satu rumah dengan lainnya. Penduduk di wakambangura juga relatif lebih homogen dibandingkan Terapung yang terdiri dari beberapa etnis (Buton, Bajo dan pendatang)

Grafik 4.2. Pengetahuan dan Keterlibatan Responden Pada Pembentukan LPS-TK Dan Lokasi



Sumber: Data Primer Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK-LIPI, 2008.

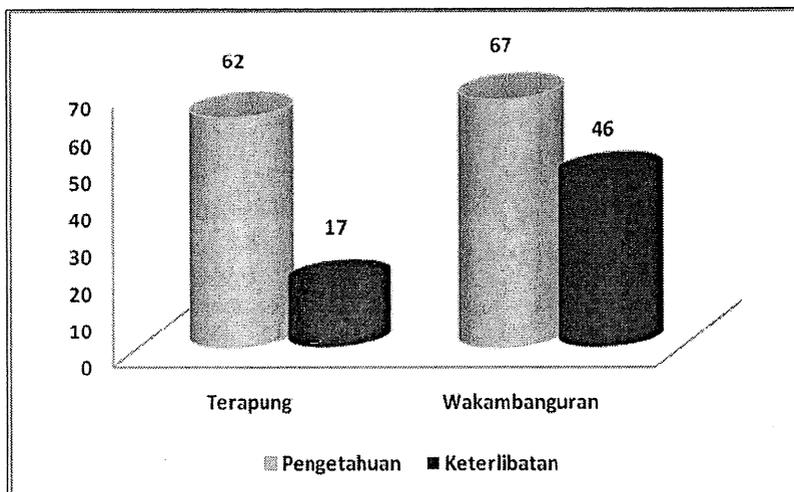
Demikian pula pusat kegiatan COREMAP di Wakambangura terletak di tengah permukiman penduduk, sementara kebanyakan penduduk di Desa Terapung tinggal agak terpisah dengan pondok informasi dan balai desa di Terapung. Meskipun mayoritas responden mengetahui pembentukan LPS-TK, hanya sekitar 44 persen yang terlibat dalam pembentukannya. Perbedaan kedua lokasi semakin mencolok dilihat dari keterlibatan responden dalam pembentukan LPS-TK, yaitu lebih dari separuh responden di Wakambangura

(sekitar 56%), dan hanya 34persen di Desa Terapung. Tampaknya keterbatasan SDM dan dana yang dimiliki, kondisi permukiman dan homogenitas penduduk seperti Wakambangura juga berpengaruh terhadap efektivitas penyuluhan dan informasi yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok masyarakat.

- **Pengetahuan tentang Kegiatan Pelatihan UEP**

Pembentukan Pokmas UEP di kedua lokasi kajian sudah cukup lama (sejak tahun 2006), namun kegiatan Pokmas ini relatif baru, karena pencairan dan penyaluran dana pinjaman tersebut baru berjalan beberapa bulan. Demikian pula jumlah anggota yang terlibat relatif kecil dibandingkan jumlah anggota yang diusulkan (terutama di Wakambangura). Namun anggota yang sudah terdaftar di ketiga Pokmas telah mendapat sosialisasi dan pelatihan untuk pemanfaatan pinjaman dana usaha tersebut. Pada umumnya program yang berkaitan dengan bantuan dana langsung ke masyarakat, informasinya relatif cepat sampai ke masyarakat. Hasil survei menunjukkan kecenderungan tersebut, karena lebih dari 60 persen responden mengetahui kegiatan pelatihan UEP, dan terdapat kecenderungan pola yang sama yaitu proporsi responden di Wakambangura sedikit lebih tinggi (sekitar 67%) dibandingkan Terapung (62%). Namun demikian seperti pada pembentukan LPS-TK, keterlibatan responden pada pelatihan UEP relative rendah (sekitar 30%), dan di Terapung proporsinya jauh lebih rendah (sekitar 17%) dari Wakambangura (sekitar 46%) (Grafik 4.3). Salah satu kemungkinan adalah banyak penerima kredit usaha di terapung yang tidak menjadi responden. Sebaliknya di Wakambangura, kemungkinan banyak responden adalah anggota Pokmas yang sudah mendapat pelatihan UEP, namun dana pinjaman belum diterima, karena belum sepenuhnya dana turun. Meskipun jumlah anggota Pokmas yang memperoleh kredit usaha di Terapung jauh lebih banyak daripada di Wakambangura, namun proporsi anggota Pokmas yang menjadi responden di Wakambangura (47%) lebih tinggi dari Terapung (39%).

Grafik 4.3. Pengetahuan dan Keterlibatan Responden Pada Kegiatan Pelatihan UEP dan Lokasi



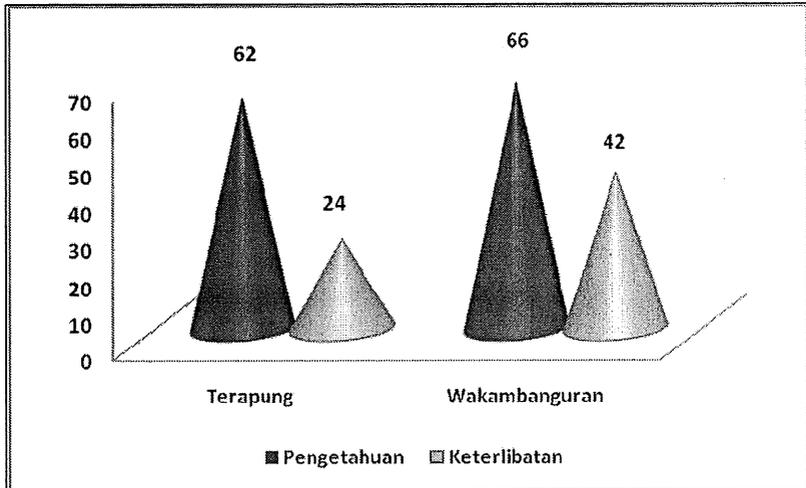
Sumber: Data Primer Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK-LIPI, 2008.

- **Kegiatan pendampingan UEP**

Dana UEP yang telah dialokasikan pada anggota Pokmas, dimaksudkan untuk membantu anggota dalam mengembangkan usahanya. Untuk setiap kelompok usaha memperoleh pendampingan dari LSM yang ditunjuk untuk kelompok tersebut. Kegiatan pendampingan ini dimaksudkan agar anggota Pokmas dapat mengelola dana lebih baik, sehingga pengembalian pinjaman dana lancar sesuai dengan kesepakatan kelompok. Seperti pengetahuan responden pada kegiatan-kegiatan COREMAP lainnya, 2 diantara 3 responden (sekitar 64%) menyatakan mengetahui tentang kegiatan pendampingan UEP. Perbedaan pengetahuan tentang kegiatan pendampingan UEP pada kedua lokasi kajian juga relatif kecil yaitu Terapung sekitar 62 persen dan Wakambangura sekitar 66 persen. Meskipun demikian, sejalan dengan terbatasnya jumlah responden yang telah menerima dana pinjaman di kedua lokasi, keterlibatan pada

kegiatan pendampingan UEP relatif kecil yaitu hanya sekitar 32%. Akan tetapi seperti pada kegiatan COREMAP lainnya, keterlibatan responden pada kegiatan pendampingan UEP di Wakambangura cukup mencolok dibandingkan Terapung (masing-masing 42 dan 24%) (Grafik 4.4)

Grafik 4.4. Pengetahuan dan Keterlibatan Responden dalam Kegiatan Pendampingan UEP dan Lokasi



Sumber: Data Primer Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK-LIPI, 2008.

Hal ini menguatkan dugaan bahwa faktor proporsi responden/anggota Pokmas di Wakambangura yang lebih besar dari Terapung, cukup berpengaruh terhadap perbedaan tersebut. Hal ini disebabkan kegiatan pendampingan UEP hanya diberikan pada anggota Pokmas. Faktor lain kemungkinan responden yang mayoritas berpendidikan relatif rendah, kurang memahami perbedaan kegiatan pendampingan UEP dengan kegiatan-kegiatan COREMAP lainnya di lokasi binaan. Hasil survei terhadap 529 ART (berusia 10 tahun ke atas) dari 129 rumah tangga sampel, menunjukkan lebih dari 80

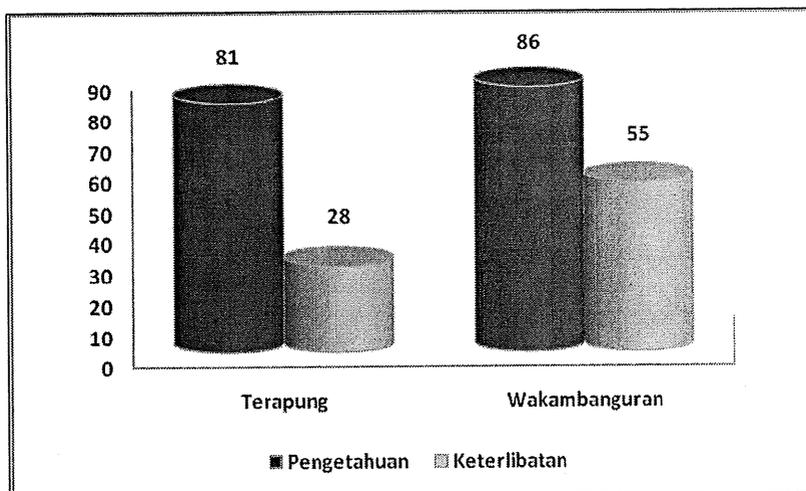
persen ART berpendidikan SD atau kurang. Kondisi ini memungkinkan kebanyakan responden kurang memahami perbedaan kegiatan COREMAP yang ada di masing-masing lokasi binaan.

- **Perlindungan dan Pengawasan**

Kegiatan COREMAP yang relatif lebih banyak dilakukan di lokasi binaan adalah perlindungan dan pengawasan. Kegiatan ini di bawah koordinasi Pokmas Konservasi yang pembentukannya di lokasi binaan bersamaan dengan pembentukan LPS-TK, atau setahun lebih dulu dibandingkan kegiatan Pokmas lainnya. Salah satu kegiatan yang melibatkan masyarakat (terutama nelayan) adalah pembentukan zona DPL dan perlindungannya. Kegiatan ini relatif lebih besar gaungnya karena dilibatkannya masyarakat nelayan sebagai *reef watcher* atau dalam kelompok pengawasan terumbu karang (Pokwasmas). Kegiatan lainnya adalah kegiatan tim patroli yang melibatkan berbagai komponen masyarakat (kabupaten dan lokasi binaan), dan berhasil menangkap pelaku pengrusakan karang. Dengan berbagai kegiatan ini, disertai penyuluhan dan sosialisasi penyelamatan terumbu karang, dapat dipastikan lebih banyak masyarakat yang mengetahui kegiatan pengawasan terumbu karang. Hasil survei terhadap rumah tangga sampel menunjukkan kecenderungan tersebut, yaitu lebih dari 80 persen responden menyatakan mengetahui kegiatan pengawasan/perlindungan pesisir dan laut. Kedua lokasi juga menunjukkan kecenderungan yang sama, meskipun polanya tetap proporsi responden di Wakambangura (86%) lebih tinggi dari Terapung (81%), dengan perbedaan yang relatif tipis (Gambar 4.5). Namun demikian keterlibatan responden dalam kegiatan perlindungan/pengawasan terumbu karang relatif rendah (sekitar separuhnya yaitu 40%). Perbedaan proporsi responden yang terlibat kegiatan pengawasan/perlindungan cukup signifikan yaitu di Terapung hanya sekitar 28 persen dari responden yang mengetahui kegiatan pengawasan, sementara di Wakambangura, lebih dari separuh responden yang mengetahuinya, juga terlibat pada kegiatan tersebut. Hal ini menguatkan dugaan, bahwa perbedaan tingkat homogenitas penduduk dan pola permukiman, cukup berpengaruh

terhadap efektivitas penyebaran informasi dan sosialisasi kegiatan COREMAP di kedua lokasi binaan.

Grafik 4.5. Pengetahuan dan Keterlibatan Responden dalam Kegiatan Pendampingan UEP dan Lokas



Sumber: Data Primer Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK-LIPI, 2008.

BAB V

PENDAPATAN PENDUDUK DAN PERUBAHANNYA

Pendapatan merupakan upah atau penghasilan yang diperoleh seseorang dari kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Pendapatan merupakan salah satu aspek penting dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang/keluarga. Pendapatan rumah tangga adalah total pendapatan dari semua anggota rumah tangga yang bekerja, baik dari pekerjaan utama maupun pekerjaan tambahan. Pada bagian ini akan dikemukakan perubahan pendapatan penduduk/rumah tangga di lokasi penelitian Kecamatan Mawasangka selama dua tahun terakhir, (2006 – 2008). Data yang digunakan adalah hasil survei tentang pendapatan rumah tangga di lokasi kajian. Dalam survei ini, pendapatan rumah tangga adalah pendapatan bersih (perbulan) yang diperoleh setelah dikurangi biaya produksi. Suvei dilakukan semaksimal mungkin pada rumah tangga sampel yang sama dengan survei pada tahun 2006.

Gambaran perubahan jumlah pendapatan rumah tangga di daerah penelitian dalam dua tahun ini diperlukan untuk mengetahui dampak kegiatan COREMAP terhadap pendapatan penduduk, terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi produktif. Perubahan tersebut dapat menjadi indikator keberhasilan COREMAP di kedua lokasi kajian.

5.1. Perkembangan Perekonomian Kabupaten Buton

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) yang bersumber dari berbagai sektor ekonomi. Besarnya nilai PDRB dapat dilihat menggunakan pendekatan harga konstan dan harga berlaku. Dalam pendekatan harga konstan yang menggunakan tahun dasar, pengaruh kenaikan harga

(inflasi) sudah dihilangkan sehingga perkembangan ekonomi mencerminkan kenaikan atau penurunan pendapatan riil.

Selama periode 2004-2006, besarnya nilai PDRB, baik menurut harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Buton mengalami peningkatan. Menurut harga berlaku, PDRB Kabupaten Buton mengalami peningkatan dari Rp. 840.597 juta (2004) menjadi Rp. 1.168.030 juta (2006), atau mengalami peningkatan sebesar 17,9 persen. Demikian pula menurut harga konstan, nilai PDRB mengalami peningkatan riil sebesar dari Rp. (2004) menjadi Rp. 669.878 juta (2006), (BPS, Kabupaten Buton, 2006). Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan perekonomian makro di Kabupaten Buton. Pada periode sebelumnya (2000-2004) nilai PDRB Kabupaten Buton masih menunjukkan kecenderungan penurunan, terutama dilihat dari harga konstan 2000 (Nagib dkk, 2006). Dibandingkan daerah lain di wilayah Sulawesi Tenggara, perbaikan ekonomi di Kabupaten Buton agak tersendat, karena daerah lain seperti Kabupaten Muna, Kendari (Kota dan Kabupaten) dan Kabupaten Kolaka menunjukkan kecenderungan meningkat dilihat dari harga berlaku dan harga konstan 2000 (BPS, 2005). Kenaikan harga sejak krisis ekonomi 1997 serta kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok lainnya, telah berdampak pada perekonomian baik ditingkat nasional maupun daerah.

Tabel 5.1. Struktur PDRB Kabupaten Buton Menurut Harga Berlaku Tahun 2004 dan 2006

No	Sektor ekonomi	2004	2006
1.	Pertanian	47.15	49.27
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.61	2.53
3.	Industri Pengolahan	6.07	4.65
4.	Listrik dan Air	0.62	0.44
5.	Bangunan	5.91	5.26
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	14.19	14.61
7.	Angkutan dan Komunikasi	2.74	2.41
8.	Keuangan	3.35	5.13
9.	Jasa	18.36	15.72
	PDRB	100	100

Sumber: BPS, Kabupaten Buton 2004 dan 2006

Struktur perekonomian menunjukkan besarnya nilai tambah sektor-sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB dan sekaligus menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap sektor ekonomi. Data pada tabel 5.1, menunjukkan sektor pertanian masih dominan terhadap PDRB Kabupaten Buton, diikuti sektor perdagangan dan jasa. Pada tahun 2006, sumbangan sektor pertanian hampir mencapai 50 persen (49,27 persen), diikuti sektor perdagangan 14,61 persen dan sektor jasa sebesar 15,72 persen. Sektor lainnya memberi sumbangan relatif kecil yaitu dibawah 10 persen. Sumbangan terkecil berasal dari sektor listrik dan air sebesar 0,44 persen. Selain dominasi sektor pertanian terhadap PDRB, pentingnya sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Buton juga dapat diketahui dari peningkatan kontribusi sektor ini selama periode 2004-2006, yaitu meningkat dari 47,15 persen menjadi 49,27 persen. Sektor lainnya yang mengalami peningkatan adalah sektor pertambangan dari 1,61 persen menjadi 2,53 persen, sektor perdagangan meningkat dari 14,19 persen menjadi 14,61 persen dan sektor keuangan yang mengalami peningkatan dari 3,15 menjadi 5,13 persen. Sektor lainnya mengalami penurunan selama periode 2004-2006.

Perkembangan ekonomi makro idealnya diikuti oleh peningkatan pendapatan perkapita, yang mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk. Selama periode 2004-2006 perekonomian Kabupaten Buton mengalami pertumbuhan sebesar 17,9 persen (menurut harga berlaku). Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti oleh pertumbuhan pendapatan perkapita atau PDRB Perkapita sebesar 15,2 persen, yaitu dari Rp. 3.232.756 (2004) menjadi Rp. 4.294.654 (2006). Hal ini mencerminkan adanya perkembangan perekonomian di Kabupaten Buton, baik secara makro maupun perkapita. Namun pertumbuhan pendapatan perkapita lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi makro. Kondisi ini mencerminkan perkembangan ekonomi makro kurang diikuti oleh peningkatan kesejahteraan penduduk. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan pendapatan perkapita perbulan yang dikategorikan sebagai penduduk miskin pada tahun 2006, sebesar Rp. 151.941 (BPS, 2007), maka pendapatan perkapita penduduk jauh lebih besar, yaitu Rp357.888 (seperduabelas dari Rp. 4.294.654). Data ini

mencerminkan bahwa penduduk Kabupaten Buton jauh berada di atas garis kemiskinan.

Mayoritas penduduk Kabupaten Buton bekerja di sektor pertanian (dalam arti luas) mencakup sub- sektor pertanian pangan, kehutanan, perkebunan dan perikanan. Sub-sektor perikanan mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian penduduk di Kabupaten Buton. Wilayah Kabupaten Buton (82%) terdiri dari lautan, dengan potensi utama wilayah ini adalah sumber daya laut (SDL) menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk. Namun berdasarkan data yang tersedia, sumbangan sektor perikanan terhadap PDRB sekitar 7 persen jauh lebih rendah dari pertanian pangan (16%) (BPS, 2001). Kemungkinan sebagai akibat potensi besar SDL belum dikelola secara maksimal di wilayah ini (baru sekitar 40-60%), atau laporan data tentang perikanan yang kurang akurat. Pelelangan ikan terbuka hampir tidak pernah dilakukan, sedangkan jumlah tempat pelelangan ikan (TPI) sangat terbatas di wilayah ini (hanya 2 buah). Hal ini semakin menyulitkan perhitungan hasil produksi ikan yang sebenarnya di masing-masing wilayah. Perhitungan hasil produksi SDL selama ini dilakukan melalui perkiraan sampel dari beberapa alat tangkap. Menyadari potensi SDL yang belum dikelola secara optimal, pengembangan sumberdaya laut menjadi salah satu dari tiga fokus utama pembangunan ekonomi ke depan.

5.2. Perubahan Pendapatan Penduduk Di Kecamatan Mawasangka Tahun 2006-2008

5.2.1. Pendapatan Penduduk

Kedua desa penelitian di Kecamatan Mawasangka yaitu Desa Terapung dan Desa Wakambangura merupakan desa pantai yang terletak di daerah pesisir barat Pulau Muna. Sebagai daerah yang berada di pinggir pantai, mayoritas penduduknya terlibat dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sektor kelautan. Pekerjaan penduduk Kecamatan Mawasangka yang berkaitan dengan kelautan adalah pada perikanan tangkap (nelayan) dan budidaya rumput laut.

Kedua jenis pekerjaan ini menjadi sumber utama pendapatan bagi mayoritas penduduk di Kecamatan Mawasangka. Kecamatan Mawasangka merupakan salah satu penghasil rumput laut terbesar di Kabupaten Buton. Hasil dari budidaya rumput laut dari daerah ini sudah dipasarkan sampai keluar negeri. Begitu juga hasil utama perikanan tangkap Mawasangka, yaitu ikan teri sudah menjadi komoditi ekspor ke Cina dan Jerman, selain mengisi permintaan dari dalam negeri, seperti Medan, Surabaya dan Jakarta. Pekerjaan lainnya yang secara tidak langsung berkaitan dengan kelautan adalah pedagang ikan, baik yang berskala kecil yang disebut 'papa lele' maupun pedagang pengumpul ikan atau rumput laut. Pekerjaan lain di luar sektor perikanan laut dan budidaya rumput laut yang menjadi sumber pendapatan penduduk adalah pertanian tanaman pangan dan tanaman keras (mete), perdagangan, industri dan jasa. Bervariasinya pekerjaan penduduk dipengaruhi antara lain oleh fluktuasi musim dalam perikanan laut, potensi SDA, peralatan tangkap yang digunakan, kesempatan kerja yang tersedia serta kebutuhan untuk mencukupi ekonomi keluarga.

Table 5.2 menyajikan data *statistik pendapatan rumah tangga* terpilih di Kecamatan Mawasangka pada tahun 2006 dan 2008. Pada tahun 2006, pendapatan per kapita rumah tangga terpilih adalah sebesar Rp. 286.286. Jumlah pendapatan jauh ini lebih besar dibandingkan dengan pendapatan perkapita yang dikategorikan sebagai penduduk miskin di Kabupaten Buton tahun 2005/2006 sebesar Rp. 151.941 (BPS, 2007). Selama periode 2006-2008, terjadi peningkatan pendapatan perkapita dan pendapatan rata-rata rumah tangga terpilih. Pendapatan perkapita meningkat sebesar Rp. 62.973 atau sekitar 10,5 persen, dari Rp. 286.286 pada tahun 2006 menjadi Rp. 349.259 pada tahun 2008. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan pendapatan rata-rata rumah tangga, sebesar Rp. 128.086 atau meningkat sekitar 4,4 persen, dari Rp. 1.440.522 menjadi Rp. 1.568.608. Kenaikan rata-rata pendapatan rumah tangga lebih kecil atau kurang dari setengah jika dibandingkan dengan peningkatan rata-rata pendapatan perkapita rumah tangga, yang mencerminkan adanya penurunan rata-rata jumlah anggota rumah tangga terpilih di Kecamatan Mawasangka.

Peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga diikuti oleh peningkatan angka median pendapatan. Selama periode 2006-2008 terjadi peningkatan angka median sebesar Rp. 332.500 atau sekitar 27,4 persen. Pada tahun 2006, lebih dari separuh rumah tangga terpilih mempunyai pendapatan sekitar Rp. 534.167, kemudian naik menjadi Rp. 866.667 pada tahun 2008. Namun dibandingkan dengan rata-rata pendapatan rumah tangga pendapatan median ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata pendapatan rumah tangga, baik pada tahun 2006 maupun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh rumah tangga mempunyai pendapatan di bawah rata-rata pendapatan dan sekaligus mencerminkan adanya kesenjangan tingkat pendapatan penduduk, meskipun kesenjangan cenderung semakin kecil. Kemudian selama periode 2006-2008 terjadi peningkatan jumlah pendapatan minimum dan maksimum, dari Rp. 6.667 menjadi Rp. 26.250, dan peningkatan pendapatan maksimum dari Rp. 7.100.000 menjadi Rp. 8.074.230. Data di atas menunjukkan bahwa secara umum tingkat pendapatan penduduk pada tahun 2008 lebih baik dibandingkan kondisi tahun 2006 dan sekaligus menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di Kecamatan Mawasangka pada tahun 2008 relatif lebih baik dibandingkan pada tahun 2006.

Selanjutnya pada masing-masing desa penelitian diketahui bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga dan pendapatan perkapita penduduk di Desa Terapung lebih besar dibandingkan Desa Wakambangura, pada tahun 2006 maupun tahun 2008. Jumlah rata-rata pendapatan rumah tangga dan pendapatan per kapita di Desa Terapung mencapai hampir tiga kali lipat dibandingkan rata-rata pendapatan penduduk Desa Wakambangura (Tabel 5.2). Berdasarkan kajian sebelumnya, ketimpangan pendapatan ini antara lain disebabkan Desa Terapung mempunyai sumber daya laut yang lebih bervariasi (teri, ikan karang, kepiting dan lain-lain), dan beberapa jenis ikan mempunyai nilai ekonomi tinggi di pasaran, sehingga jaringan pasar lebih luas, baik lokal maupun ke luar daerah.

Tabel 5.2. Statistik Pendapatan Rumah Tangga di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tahun 2006 dan 2008 (Rupiah)

Pendapatan rumah tangga (per bulan)	Desa Terapung		Desa Wakambangura		Total				
	2006	2008	r	2006	2008	r			
Per kapita	390.687	464.433	9,0	132.295	194.298	21,2	286.286	349.259	10,5
Rata-rata RT	1.924.404	2.079.014	3,9	726.795	881.880	10,2	1.440.522	1.568.608	4,4
Median	1.133.125	1.186.250	2,3	312.500	454.167	20,5	534.167	866.667	27,4
Minimum	6667	51.667		12.000	26.250		6.667	26.250	
Maksimum	7.100.000	8.074.230		4.133.333	7.900.000		7.100.000	8.074.230	
Jumlah (N)	59*	74		40	55		99	129	

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LIPI, 2006

Data Primer, Survei BME, Aspek Sosial Ekonomi, PPK-LIPI, 2008

Sedangkan jenis ikan di Desa Wakambangura umumnya untuk memenuhi kebutuhan pasaran lokal (cakalang, ikan tuna, ikan karang mati), kecuali ikan karang hidup yang mempunyai nilai ekonomi tinggi karena sebagai komoditi ekspor. Di samping itu, kedua desa mempunyai keterbatasan kesuburan tanah di pantai, yaitu hanya cocok untuk kelapa, tapi Desa Terapung mempunyai lahan darat yang lebih subur (tanah perbukitan) dibandingkan Desa Wakambangura (tanah berbatuan) sehingga produktivitas hasil produksi tanaman palawija, seperti jagung dan ubi kayu jauh lebih tinggi dibandingkan hasil produksi komoditi yang sama di Desa Wakambangura. Berdasarkan data Kecamatan Mawasangka Dalam Angka Tahun 2004, Luas tanaman jagung di Desa Terapung lebih kecil daripada Desa Wakambangura (90 dan 78 Ha), namun produktivitas jagung di Terapung jauh lebih tinggi daripada di Wakambangura (3,3 dan 13,2 Kw/Ha). Demikian pula untuk hasil produksi tanaman lainnya.(ubi kayu dan ubi jalar) (BPS Kab. Buton, 2005: 91-93)

Selanjutnya lapangan pekerjaan yang menonjol di kedua desa berbeda, yaitu perikanan tangkap dengan hasil utama ikan teri dan kepiting di Desa Terapung, sedang di Desa Wakambangura adalah budidaya rumput laut di samping perikanan tangkap. Nelayan di Desa Terapung pada umumnya tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi musim, karena sebagian nelayan mempunyai alat tangkap yang bervariasi yaitu bagan dan jaring untuk menangkap ikan teri di musim gelombang lemah (angin timur) dan bubu dan pancing untuk menangkap kepiting di musim barat dan pancaroba. Bahkan bubu untuk menangkap kepiting, dapat menjadi pekerjaan sambilan bersamaan dengan penggunaan bagan untuk penangkapan ikan teri. Sedangkan nelayan di Desa Wakambangura, hanya pergi menangkap ikan ke laut pada musim gelombang lemah, baik untuk menangkap ikan cakalang maupun ikan karang. Pada musim gelombang kuat (angin barat), banyak nelayan yang beralih usaha ke budidaya rumput laut, atau pergi merantau bagi nelayan yang tidak mempunyai usaha lain di desa. Usaha budidaya laut ini menjadi andalan nelayan di hampir semua wilayah Kecamatan Mawasangka, sebagai usaha alternatif terutama di musim sulit menangkap ikan (musim angin barat/gelombang kuat).

Berdasarkan kenaikan pendapatan perkapita dan rata-rata pendapatan rumah tangga selama periode 2006-2008, kenaikan atau pertumbuhan pendapatan di Desa Wakambangura lebih besar dibandingkan Desa Terapung. Pendapatan perkapita di Desa Wakambangura meningkat sebesar 21,2 persen selama 2006-2008 (dari Rp. 132.295 menjadi Rp. 194.298), sementara di Desa Terapung pendapatan perkapita meningkat sebesar 9 persen, (dari Rp. 390.687 menjadi Rp. 464.433). Rata-rata pendapatan rumah tangga di Desa Wakambangura meningkat sebesar 10,2 persen lebih besar dibandingkan di Desa Terapung sebesar 3,9 persen. Begitu juga pendapatan median di Desa Wakambangura meningkat sebesar 20,5 persen, lebih besar dibandingkan di Desa Terapung sebesar 2,3 persen. Data di atas mencerminkan bahwa perkembangan pendapatan rumah tangga di Desa Wakambangura lebih cepat dibandingkan di Desa Terapung. Namun pada kedua desa masih terdapat kesenjangan pendapatan antara proporsi rumah tangga yang berpendapatan tertinggi dan terendah.

Berdasarkan distribusi pendapatan rumah tangga, selama periode 2006-2008 terjadi penurunan proporsi rumah tangga yang berpendapatan pada kelompok paling rendah dan adanya peningkatan proporsi rumah tangga pada kelompok pendapatan yang lebih tinggi. Pada tahun 2006, hampir separuh rumah tangga terpilih atau sekitar 49 persen mempunyai pendapatan paling rendah (kurang dari Rp. 500.000) kemudian pada tahun 2008 jumlahnya mengalami penurunan menjadi 36 persen (Tabel 5.3). Selanjutnya proporsi rumah tangga yang memiliki pendapatan lebih besar (Rp. 500.000-Rp. 999.000) meningkat dari 11 menjadi 19 persen, begitu juga untuk kelompok pendapatan Rp. 1.000.000 – Rp. 1.499.999, meningkat dari 6 menjadi 12 persen dan kelompok pendapatan Rp. 1.500.000 – Rp. 1.999.999 meningkat dari 4 menjadi 11 persen. Selanjutnya untuk kelompok pendapatan yang paling besar, terjadi penurunan proporsi rumah tangga pada kelompok tersebut. Data di atas mencerminkan bahwa terdapat peningkatan proporsi rumah tangga yang berpendapatan lebih tinggi. Kondisi ini sangat menonjol terjadi di Desa Terapung. Selama periode 2006-2008, terjadi peningkatan yang signifikan pada proporsi rumah tangga yang berpendapatan lebih tinggi dan sebagian

besar (80%) rumah tangga pada tahun 2008 terdistribusi pada kelompok pendapatan lebih tinggi. Sementara di Desa Wakambangura mayoritas rumah tangga masih berada pada pendapatan terendah (kurang dari Rp. 500.000), yaitu 73 persen (2006) menjadi 58 persen (2008) sehingga sedikit rumah tangga yang terdistribusi pada pendapatan yang lebih tinggi.

Di Desa Terapung dalam dua tahun terakhir semakin banyak nelayan yang menggunakan bubu kepiting. Mereka adalah nelayan bagan yang sementara beralih ke alat tangkap bubu. Jenis bubu yang digunakan adalah bubu kawat yang dapat menangkap kepiting lebih banyak karena lebih rapat ke dasar laut dibandingkan bubu bambu. Penggunaan bagan cenderung semakin berkurang. Berdasarkan informasi dari Kepala Desa, jumlah bagan berkurang dari 13 buah dan menjadi 9 buah. Mahalnya biaya perbaikan bagan, seperti biaya perbaikan bodi kapal dan penggantian jaring menyebabkan sebagian nelayan menghentikan penggunaan bagan dan beralih ke bubu. Pada saat masuk *Doc* (Musim Barat) biaya perbaikan bagan berkisar antara 1 -4 juta rupiah. Selain mengganti alat tangkap, pada musim barat sebagian nelayan pergi merantau ke Irian untuk menangkap ikan .

Tabel 5.3. Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan Rumah Tangga di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tahun 2006 dan 2008 (Persen)

Pendapatan	Desa Terapung		Desa Wakambangura		Total	
	2006	2008	2006	2008	2006	2008
<Rp 500.000	34	20	73	58	49	36
Rp 500.000 - Rp 999.000	15	24	5	13	11	19
Rp 1.000.000 – Rp 1.499.000	7	14	5	9	6	12
Rp 1.500.000 – Rp 1.999.000	3	10	5	13	4	11
Rp 2.000.000 – Rp 2.499.000	5	4	5	0	5	2
Rp 2.500.000 – Rp 2.999.000	5	3	0	4	3	3
Rp 3.000.000 – Rp 3.499.000	5	1	5	0	5	0.8
Rp 3.500.000 /lebih	25	24	3	4	17	16
Total	100	100	100	100	100	100
	(n=59)	(n=74)	(n=40)	(n=55)	(n= 99)	(n=129)

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LIPI, 2006

Data Primer, Survei BME, Aspek Sosial Ekonomi, PPK-LIPI, 2008

Pendapatan menurut lapangan pekerjaan

Wilayah Kecamatan Mawasangka yang merupakan wilayah pesisir dengan potensi sumberdaya laut yang sangat besar mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Pekerjaan yang berhubungan dengan laut, seperti perikanan tangkap dan budidaya rumput laut adalah pekerjaan mayoritas penduduk di kedua desa penelitian. Pekerjaan yang secara tidak langsung berkaitan dengan kelautan adalah pedagang ikan, baik yang berskala kecil yang disebut 'papa lele' maupun pedagang pengumpul ikan atau rumput laut. Pekerjaan lain di luar sektor perikanan laut dan budidaya rumput laut yang menjadi sumber pendapatan penduduk adalah pertanian tanaman pangan dan tanaman keras (mete), perdagangan, industri dan jasa. Bervariasinya pekerjaan penduduk dipengaruhi antara lain oleh fluktuasi musim dalam perikanan laut, potensi SDA, peralatan tangkap yang digunakan, kesempatan kerja yang tersedia serta kebutuhan untuk mencukupi ekonomi keluarga.

Sektor perikanan merupakan lapangan pekerjaan utama yang menghasilkan pendapatan bagi penduduk di Kecamatan Mawasangka. Beberapa jenis ikan yang banyak diperoleh nelayan adalah ikan teri, ikan karang, ikan cakalang, tuna, dan kepiting. Ikan teri dan kepiting merupakan hasil tangkapan utama nelayan di Desa Terapung. Ikan teri sudah mempunyai pasar yang cukup bagus, yaitu ke Jakarta, Surabaya dan Medan, bahkan sebagian sudah diekspor keluar negeri. Ikan karang, ikan tongkol, tuna dan cakalang merupakan hasil tangkapan utama nelayan di Desa Wakambangura. Sebagian besar masih memenuhi pasaran lokal dan pasar setempat, hanya sebagian kecil ikan karang hidup yang diekspor melalui pedagang pengumpul. Berdasarkan hasil survei, selama periode 2006-2008, rata-rata pendapatan rumah tangga dari sektor perikanan mengalami penurunan dari Rp. 2.479.877 menjadi Rp. 2.224.906 atau turun sekitar 5,2 persen (Tabel 4.3). Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan jumlah hasil tangkapan ikan oleh nelayan, terutama nelayan pancing. Meskipun sudah banyak berkurang, namun penangkapan ikan menggunakan bius dan bom masih dilakukan oleh sebagian nelayan secara sembunyi-sembunyi dan hal ini berpengaruh pada hasil

tangkapan nelayan. Selain berdampak pada semakin berkurangnya hasil tangkapan ikan nelayan, penggunaan bius juga berdampak pada usaha budidaya rumput laut. Arus air laut yang membawa obat bius ke kawasan budidaya rumput laut dapat merusak tanaman rumput laut.

Budidaya rumput laut banyak dilakukan oleh nelayan di Desa Wakambangura dan sebagian nelayan di Desa Terapung, yaitu di Dusun Air Wajo. Pekerjaan budidaya rumput laut sangat erat kaitannya dengan kelautan sehingga sebagian besar nelayan budidaya rumput laut juga merangkap sebagai nelayan tangkap. Selama periode 2006-2008, pendapatan penduduk dari budidaya rumput laut mengalami penurunan sekitar 14,2 persen (atau turun dari Rp. 919.585 menjadi Rp. 677.556)(Tabel 4.3). Penurunan pendapatan dari budidaya rumput laut disebabkan belum optimalnya pendapatan yang diterima dari usaha rumput laut yang memerlukan proses dalam penanganannya. Penanaman bibit rumput laut dilakukan pada Musim Barat sehingga pada saat penelitian rumput laut masih dalam tahap penanaman bibit. Panen rumput laut dilakukan pada bulan November (panen puncak). Rumput laut merupakan komoditi ekspor dimana tingkat harga ditentukan oleh eksportir Surabaya. Berdasarkan prediksi harga rumput laut pada tahun 2008 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada tingkat petani 8.000 rupiah/kg, Pengumpul Bao-Bao . 9.000 rupiah /kg dan Surabaya 11.000 rupiah/kg. Sementara pada tahun 2007, harga paling tinggi adalah . 5.000 rupiah/kg di tingkat petani. Dengan adanya kenaikan harga ini maka diharapkan pendapatan petani akan mengalami kenaikan. *Sektor pertanian* merupakan sumber pendapatan yang cukup penting bagi penduduk di Kecamatan Mawasangka. Jenis tanaman yang dibudi daya adalah tanaman pangan, seperti ubi, jagung sayuran dan tanaman keras yaitu kelapa dan jambu mete. Hasil usaha tanaman pangan merupakan hasil tambahan masyarakat yang dimanfaatkan untuk konsumsi sendiri dan sebagian dijual, sedang hasil usaha tanaman keras, seperti kelapa dan jambu mete dijual untuk menambah pendapatan masyarakat. Mete merupakan komoditi yang sangat terkenal dari Buton dan Kecamatan Mawasangka merupakan salah satu daerah penghasil jambu mete. Selama periode 2006-2008, pendapatan rumah tangga yang berasal dari sektor pertanian

mengalami peningkatan, baik pertanian tanaman pangan maupun tanaman keras (Tabel 5.4).

Pendapatan dari tanaman pangan meningkat sangat tajam dari Rp. 159.476 menjadi Rp 869.974. Besarnya kenaikan pendapatan dari tanaman pangan ini kemungkinan disebabkan oleh rendahnya pendapatan rumah tangga pada tahun 2006. Berdasarkan hasil kajian sebelumnya, hasil usaha tanaman pangan merupakan hasil tambahan yang lebih dimanfaatkan untuk konsumsi sendiri daripada untuk dipasarkan. Masalahnya adalah kesulitan dalam menghitung pendapatan hasil tanaman pangan karena jenis dan masa panennya bervariasi. Pada umumnya responden juga tidak memperhitungkan hasil yang dikonsumsi sendiri sebagai pendapatan, sehingga laporan pendapatan cenderung di bawah hasil sebenarnya (*under reporting*). Berdasarkan hasil perhitungan angka median yaitu sebesar Rp. 356.833 yang jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sebesar Rp. 869.974 mencerminkan adanya ketimpangan pendapatan yang cukup besar dan lebih dari 50 persen petani berpenghasilan di bawah rata-rata pendapatan.

Kondisi yang sama juga terdapat pada pertanian tanaman keras (mete). Terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga yang cukup tajam dari Rp. 521.000 menjadi Rp. 2.238.557, yang kemungkinan disebabkan oleh besarnya fluktuasi antara pendapatan tertinggi dan terendah. Angka median pendapatan dari tanaman keras sebesar Rp. 414.167 adalah seperlima dari rata-rata pendapatan, sebesar Rp. 2.238.557, yang mencerminkan sebagian besar pendapatan dari tanaman keras jauh di bawah pendapatan rata-rata. Hasil tanaman keras seperti jambu mete, masa panennya hanya sekali musim dalam setahun, hasil produksinya lebih mudah dihitung karena merupakan komoditi pasar yang mempunyai harga pasar lebih pasti.

Tabel 5.4. Distribusi Pendapatan RT Menurut Lapangan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, Tahun 2006 dan 2008

Lapangan pekerjaan	2006					2008					N
	Rata2	Median	Minimum	Maks		Rata2	Median	Min	Maks		
Perikanan tangkap	2.479.874	2.197.250	23.833	7.100.000	44	2.224.906	1.432.083	145.833	8.016.667	64	
Pertanian Tn.	159.476	191.000	12.000	333.333	7	869.974	356.833	26.250	5.570.833	16	
pangan											
Pertanian Tn.	521.000	300.833	6.667	1.328.333	9	2.238.557	414.167	51.667	8.074.230	4	
Keras											
Budi daya rumput laut	919.585	450.000	17.500	4.150.000	23	677.556	311.458	85.000	4.431.667	22	
Industri pengolahan											
Perdagangan	212.167	212.167	212.167	212.167	1	175.000	175.000	175.000	175.000	1	
Angkutan	154.444	90.000	70.000	303.333	3	1.173.009	686.667	172.500	5.085.417	9	
Jasa	352.083	383.333	151.667	615.833	5	1.430.000	1.040.000	1.000.000	2.230.000	3	
Bangunan	787.000	390.833	366.333	2.000.000	4	335.000	335.000	180.000	490.000	2	
Lainnya											
Total	1.475.564	616.458	6.667	7.100.000	96	1.573.832	862.500	26.250	8.074.230	128	

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LIPI, 2006

Data Primer, Survei BME, Aspek Sosial Ekonomi, PPK-LIPI, 2008

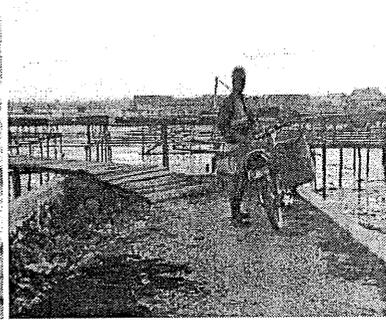
Berfluktuasinya pendapatan petani mete sangat tergantung dari luas lahan yang ditanami dan harga pasar sesuai jenis mete yang dijual. Petani yang memiliki lahan relatif kecil pada umumnya menjual jambu mete dalam bentuk gelondongan (mete kulit/belum diolah) dengan harga Rp. 5.000-Rp. 8.000/kg. Petani tidak mau repot untuk mengolah mete meskipun harga jualnya yang sudah diolah relatif tinggi. Proses pengolahan mete cukup panjang, yaitu 1) dijemur; 2) dibelah; 3) dikupas kulit ari dengan cara pengasapan dan 4) dijemur. Pengolahan mete menggunakan tenaga kerja buruh sehingga membutuhkan biaya produksi yang cukup besar. Pendapatan yang besar diperoleh oleh petani mete yang juga merangkap sebagai penampung mete dan melakukan pengolahan mete kulit menjadi mete kering yang siap dijual karena harganya cukup tinggi, yaitu Rp. 28.000 – Rp. 32.000/kg. Harga ini akan meningkat di luar musim mete.

Berdasarkan informasi dari beberapa sumber, selama dua tahun terakhir terjadi penurunan pendapatan sebagian besar petani yang berasal dari jambu mete. Salah satu penyebabnya adalah penurunan produktivitas tanaman mete karena umur tanaman mete sudah cukup tua. Meskipun umur tanaman mete sudah tua, namun tidak banyak masyarakat yang melakukan peremajaan, karena membutuhkan biaya besar. Di samping itu, tanaman mete sangat sensitif terhadap perubahan cuaca, terutama curah hujan yang terlalu banyak pada saat berbunga serta cuaca yang terlalu panas. Menurut salah seorang petani mete, pada saat cuaca kurang baik hasil turun sampai 25 persen, bahkan kadang tidak menghasilkan sama sekali. Berdasarkan observasi, banyak buah tanaman mete yang sudah hitam dan tidak berkembang. Faktor lain yang menyebabkan turunnya pendapatan petani mete adalah besarnya biaya untuk panen jambu mete, seperti biaya tenaga kerja buruh dan pengolahan jambu mete mentah menjadi mete kering yang siap dijual. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil penjualannya. Kondisi ini menyebabkan banyak petani yang membiarkan tanaman jambu mete dan hanya memungut buah mete yang jatuh.

Selama periode 2006-2008, peningkatan pendapatan penduduk dari sektor perdagangan. Pendapatan rumah tangga yang bersumber dari sektor perdagangan meningkat sebesar dari Rp. 154.444 menjadi Rp. 1.173.009. indikasinya selama dua tahun terakhir semakin banyak pedagang ikan atau biasa disebut 'papa lele', Selain itu juga semakin banyak para istri nelayan bagan yang menjual hasil tangkapan ikan para suami yang tidak dijual pada pedagang pengumpul. Biasanya selain mendapatkan ikan teri, nelayan bagan juga mendapatkan jenis ikan lainnya, seperti ikan layang dan ikan tamban. Ikan teri langsung dijual pada pedagang pengumpul (base camp) sedang ikan lainnya dijual pada pedagang ikan (papa lele) atau langsung dibawa oleh para istri nelayan ke pasar. Biasanya para pedagang ikan (papa lele) sudah menunggu nelayan pulang melaut sejak pagi hari di pinggir pantai. Semakin banyaknya ibu-ibu pedagang ikan juga disebabkan adanya dana pinjaman bergilir (UEP) yang diperoleh anggota Pokmas. Menurut salah seorang pedagang ikan, sebelum adanya dana bergilir, jumlah pedagang ikan di Desa Terapung sebanyak 10 orang, kini jumlahnya menjadi 50 orang pedagang ikan yang kebanyakan perempuan. Hal ini didukung oleh adanya fasilitas pasar di setiap desa sehingga kegiatan ekonomi dan perdagangan masyarakat semakin berjalan lancar.



Gambar 5.1. Istri nelayan sedang menunggu suami dari laut



Gambar 5.2. Papa lele sedang menunggu nelayan dari laut

Sumber pendapatan rumah tangga lainnya adalah kiriman dari keluarga yang merantau. Pada tahun 2006, pendapatan yang berasal dari kiriman belum kelihatan dari hasil survei dan pada tahun 2008 sebanyak 5 rumah tangga memperoleh pendapatan yang berasal dari kiriman keluarga, dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp.980.867. Ada dua kemungkinan, yaitu: *pertama* adanya penambahan jumlah responden sehingga dari tambahan responden sebanyak 29 rumah tangga pada tahun 2008 dapat menjaring rumah tangga yang pendapatannya berasal dari kiriman keluarga. *Kedua* adanya peningkatan jumlah penduduk yang merantau ke daerah lain selama dua tahun terakhir. Peningkatan mobilitas keluar untuk mencari pekerjaan, terutama pada musim angin barat dilakukan penduduk ke Papua (sebagai nelayan) atau ke Malaysia sebagai TKI. Menjadi TKI di Malaysia banyak dilakukan oleh generasi muda dengan tujuan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan. Biasanya bekerja di Malaysia bersifat sementara, terutama bagi nelayan yang tidak memiliki perahu atau kapal motor. Menurut salah seorang nelayan di Desa Wakambangura, jika penghasilan sudah cukup sebagai TKI, pada umumnya dimanfaatkan untuk membeli kapal motor dan kembali bekerja sebagai nelayan. Sementara mobilitas ke Papua banyak dilakukan oleh nelayan dari Desa Terapung. Pada musim Barat sebagian nelayan bagan merantau ke Papua untuk menjadi nelayan tangkap di sana selama bagan masuk dok. Memasuki musim Timur mereka pulang untuk menurunkan bagan penangkap ikan teri.

Pendapatan Nelayan

Pendapatan rumah tangga nelayan adalah pendapatan rumah tangga dengan Kepala Rumah Tangga (KRT)-nya bekerja sebagai nelayan. Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga nelayan mengalami penurunan selama periode 2006-2008, dan rata-rata penurunan pendapatan rumah tangga sebesar 19,0 persen, yaitu dari Rp. 2.479.874 menjadi Rp. 1.625.806. Berdasarkan perhitungan angka median pendapatan pada tahun 2008, angka median sebesar Rp. 900.000 jauh di bawah pendapatan rata-rata rumah tangga (Rp. 1.625.806) dibandingkan dengan angka median

pada tahun 2006. Kondisi ini menggambarkan bahwa lebih dari separuh rumah tangga nelayan mempunyai pendapatan lebih rendah dari rata-rata pendapatan karena ketimpangan antara proporsi rumah tangga berpendapatan tertinggi dan terendah semakin besar, yaitu antara Rp. 3.333 dan Rp. 7.725.000. Penurunan pendapatan yang cukup besar terdapat pada rumah tangga nelayan di Desa Wakambangura, yaitu turun sebesar 29,8 persen, dari Rp. 1.236.493 menjadi Rp. 609.601 (selama 2006-2008). Sementara di Desa Terapung pendapatan rumah tangga nelayan turun sebesar 12 persen, dari Rp. 2.894.334 menjadi Rp. 2.239.364 (selama 2006- 2008). Meskipun terjadi penurunan pendapatan rata-rata rumah tangga, tetapi pendapatan perkapita rumah tangga nelayan di Desa Terapung mengalami kenaikan sebesar 1,3 persen, yaitu dari Rp. 488.274 menjadi Rp. 501.022 selama 2006-2008. . Data ini mencerminkan adanya penurunan jumlah anggota rumah tangga nelayan di Desa Terapung selama 2 tahun terakhir. Kemungkinan mobilitas penduduk ke daerah lain menyebabkan adanya penurunan jumlah anggota rumah tangga ini.

Penurunan pendapatan rumah tangga nelayan selama dua tahun terakhir disebabkan oleh berkurangnya hasil tangkapan nelayan, terutama nelayan pancing Penangkapan ikan dengan menggunakan obat bius masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh nelayan di perairan Mawasangka. Berdasarkan hasil FGD dengan para nelayan diketahui bahwa hasil tangkapan ikan cenderung berkurang karena banyaknya nelayan luar yang menangkap ikan di perairan Mawasangka dengan menggunakan obat bius dan bom. Seperti diungkapkan oleh seorang nelayan pancing:

Hasil tangkapan ikan makin berkurang, dulu tidak ada nelayan luar, sekarang banyak nelayan dari luar seperti dari Bao-Bao karena di sini lautnya dangkal sehingga mudah dapat ikan disana lautnya dalam. Orang luar banyak melakukan bius dan bom.

Meskipun praktek yang merusak ini sudah banyak berkurang, namun penangkapan ikan menggunakan bius dan bom masih dilakukan oleh beberapa nelayan secara sembunyi-sembunyi.

Penangkapan ikan menggunakan bius banyak dilakukan oleh nelayan dari luar (Bao-Bao). Untuk mengelabui masyarakat, sebelum dijual ke pasar, nelayan singgah dahulu ke markasnya untuk menyembuyikan alat bius. Nelayan mengenal tanda-tanda penggunaan bius dalam menangkap ikan, antara lain 1) kondisi fisik ikan yang dijual tidak segar, seperti sisik ikan yang lunak; 2) antara hasil ikan yang diperoleh dengan ukuran bubu tidak cocok, sebagai contoh, ikan besar yang diperoleh dengan menggunakan bubu ukuran kecil. Bahkan ada indikasi praktek penangkapan ikan dengan menggunakan bius juga dilakukan oleh nelayan setempat di Desa Wakambangura. Meskipun tidak diakui secara terbuka oleh masyarakat dan nelayan, namun hal ini sudah menjadi isu di kalangan masyarakat nelayan. Bahkan sudah ada usaha mencegah praktek bius melalui pendekatan budaya dengan melibatkan salah seorang tokoh masyarakat dan pengurus LPSTK, namun belum berhasil karena sulit untuk pembuktiannya. Penggunaan obat bius dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga sulit k ditindak atau ditangkap. Menurut pengurus LPSTK, selama masih ada 'bos' yang menyalurkan obat bius pada nelayan maka praktek penangkapan ikan menggunakan bius masih akan terus terjadi.

Nelayan dari luar juga menangkap ikan menggunakan jala atau pukat. Dengan pemberat menggunakan besi, jaring pukat sampai ke dasar laut dan ditarik dengan kapal sehingga semua ikan dan teripang bahkan karang ikut terjaring dalam jala. Penangkapan dilakukan pada malam hari sehingga sering luput dari pengawasan nelayan setempat. Menurut salah seorang nelayan di Desa Wakambangura, meskipun tidak ada larangan menangkap ikan menggunakan pukat, tetapi dampaknya berpengaruh terhadap populasi tangkapan nelayan. Penangkapan ikan menggunakan pukat menyebabkan ikan semakin berkurang dan berpengaruh pada hasil tangkapan. Menurut salah seorang nelayan, di Desa Wakambangura masih ada 10 orang yang menangkap ikan dengan menggunakan pukat. Pukat Redi atau pukat harimau adalah jenis pukat yang dilarang karena dapat merusak terumbu karang. Kalau jaring pukat tersangkut di karang maka ikan yang tersangkut akan mati dan ikan lain akan lari, sementara jarring yang tersangkut dapat merusak terumbu karang.

Penurunan pendapatan nelayan juga dipengaruhi oleh masalah waktu pengambilan data, terutama pada pendapatan nelayan bagan (ikan teri). Mayoritas nelayan di Desa Terapung adalah nelayan bagan. Pada saat penelitian dilakukan (April), pendapatan nelayan bagan belum mencapai optimal karena baru memasuki musim ikan teri, yaitu Musim Timur (Mei-September). Padahal menurut nelayan, hasil tangkapan ikan teri pada tahun ini menunjukkan peningkatan, diindikasikan oleh perolehan ikan teri yang lebih banyak pada awal Musim Timur dibandingkan dengan awal musim Timur pada tahun sebelumnya. Pada puncak musim Timur (September) ikan teri akan berlimpah dan biasanya *Base Camp* penuh sehingga tidak menampung lagi ikan teri dari nelayan. Biasanya nelayan dan keluarga melakukan pengeringan ikan sendiri di rumah masing-masing. Peningkatan hasil ikan teri ini diungkapkan oleh salah seorang nelayan bagan di Desa Terapung:

'harga ikan teri tetap, hasil bagan meningkat, tahun lalu bulan 6 baru dapat ikan teri sekarang awal musim sudah dapat ikan padahal wilayah tangkap tetap'.

'dulu pada saat terang bulan ikan teri kurang sekarang terang bulanpun teri banyak'.

Pendapatan rumah tangga nelayan sangat tergantung pada perbedaan musim, serta jenis alat tangkap yang digunakan. Perubahan musim terutama berkaitan dengan kuat lemahnya ombak di laut, kecepatan angin laut dan bulan purnama yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari nelayan di laut. Nelayan di Mawasangka mengelompokkan musim atas tiga musim yaitu musim ombak kuat (angin barat), musim ombak lemah (angin timur) dan musim pancaroba (musim kemarau). Di Kawasan Mawasangka, musim gelombang lemah, dikenal juga sebagai musim angin timur atau musim teduh, biasanya berlangsung sekitar 7 bulan, yaitu antara bulan Mei sampai dengan Nopember. Pada musim ini, air laut jernih, angin dan ombak tenang dan banyak ikan, sehingga dianggap oleh nelayan sebagai masa musim panen ikan. Kondisi sebaliknya adalah musim gelombang kuat atau musim angin barat, yang berlangsung sekitar 4-5

bulan, yaitu pada sekitar bulan Desember- Maret. Pada musim ini, angin bertiup kencang, ombak besar, air keruh dan banyak hujan. Diantara kedua musim tersebut terdapat musim pancaroba atau musim kemarau yang berlangsung sekitar 2 bulan, yaitu bulan April dan Desember.

Perubahan musim mempengaruhi aktivitas nelayan kelaut. Pada musim ombak lemah wilayah tangkap nelayan lebih jauh dan nelayan dapat melaut setiap sehingga dapat memperoleh hasil tangkapan lebih banyak. Rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan pada musim ombak lemah lebih besar dibandingkan musim pancaroba dan ombak kuat. Begitu juga pada musim pancaroba, wilayah tangkap cukup jauh dan nelayan tidak setiap hari pergi melaut tergantung besar atau kecilnya ombak. Pada musim gelombang kuat nelayan tidak melaut setiap hari dan sebagian melaut dengan wilayah tangkap dekat pantai sehingga pendapatan nelayan turun pada musim ombak kuat.

Jika ditelusuri lebih lanjut berdasarkan distribusi pendapatan, pendapatan rumah tangga nelayan bervariasi menurut musim antara tahun 2006 dan 2008 (Tabel 5.7). Dari table diketahui bahwa mayoritas rumah tangga nelayan berpendapatan rendah, yaitu termasuk dalam kelompok berpendapatan paling rendah (kurang dari Rp. 500.000). Kondisi ini terjadi pada semua musim dalam dua tahun terakhir dimana proporsi terbesar terjadi pada musim ombak kuat dan terkecil pada musim ombak lemah. Pada table juga dapat diketahui bahwa rumah tangga nelayan yang berpendapatan tinggi (lebih dari 3,5 juta) proporsinya cukup tinggi pada musim ombak lemah meskipun mengalami penurunan selama dua tahun terakhir.

Pada kelompok pendapatan paling rendah (kurang dari Rp. 500.000 per bulan), proporsi rumah tangga mengalami penurunan pada musim ombak lemah, dari 59 persen menjadi 51 persen. Sebaliknya terjadi peningkatan pada musim pancaroba dan ombak kuat. Pada musim pancaroba proporsi rumah tangga yang berpendapatan terendah naik dari 67 persen menjadi 69 persen, sedang pada musim ombak kuat naik dari 86 persen menjadi 92,2 persen.

Tabel 5.5. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Nelayan di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, Tahun 2006 dan 2008 (Rupiah)

Pendapatan rumah tangga (per bulan)	Desa Terapung		Desa Wakambangura		Total				
	2006	2008	2006	2008	2006	2008			
Per kapita	488.274	501.022	1,3	179.936	118.716	-18,8	412.902	357.095	-7,0
Rata-rata RT	2.894.334	2.239.364	-12,0	1.236.493	609.601	-29,8	2.479.874	1.625.806	-19,0
Median	2.862.500	1.229.167	-34,5	534.167	443.750	-8,9	2.197.250	900.000	-35,9
Minimum	23.833	103.730	108,6	86.667	3.333	-80,4	23.833	3.333	-62,6
Maksimum	7.100.000	7.725.000	4,3	4.133.333	1.845.000	-33,2	7.100.000	7.725.000	4,3
Jumlah (N)	33	53		11	32		44	85	

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LIPI, 2006

Data Primer, Survei BME, Aspek Sosial Ekonomi, PPK-LIPI, 2008

Tabel 5.6. Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim

Pendapatan	Musim								
	Ombak Lemah				Pancaroba				
	2006	2008	%	2006	2008	%	2006	2008	
Rata-rata rumah tangga	3.746.221	2.498.510	-18,3	2.195.086	1.080.827	-29,8	612.578	445.937	-14,7
Median	2.800.000	1.485.000		875.000	530.000		300.000	250.000	
Minimum rumah tangga	18.000	84.000		8.000	20.000		18.000	20.000	
Maksimum rumah tangga	12.500.000	12.500.000		9.900.000	5.700.000		4.950.000	3.000.000	

Sumber: Data Primer, Survei BME, Aspek Sosial Ekonomi, PPK-LIPI, 2008

Kemudian untuk kelompok pendapatan yang lebih tinggi, terjadi peningkatan proporsi rumah tangga selama dua tahun terakhir pada musim ombak lemah, kecuali pada kelompok pendapatan diatas Rp. 3.500.000 yang mengalami penurunan dari 25 persen menjadi 14,7 persen. Pada musim gelombang lemah, kondisi ekonomi rumah tangga nelayan lebih baik karena hampir tiap hari nelayan turun kelaut. Pada musim pancaroba, proporsi rumah tangga meningkat 4 persen menjadi 11,6 persen untuk kelompok pendapatan (Rp. 500.000-Rp 999.999), 6 persen menjadi 7,8 persen (Rp. 1.000.000 – Rp. 1.499.999) dan 0 persen menjadi 3,1 persen (Rp. 1.500.000 – Rp. 1.999.999), selanjutnya untuk pendapatan yang lebih tinggi mengalami penurunan. Musim Pancaroba yang merupakan peralihan antara gelombang kuat dan lemah, pada umumnya berlangsung singkat sekitar 2 bulan. Angin dan gelombang laut mulai melemah, sehingga nelayan sudah mulai berani melaut kembali meskipun belum penuh. Sementara untuk musim gelombang kuat terjadi penurunan proporsi rumah tangga pada semua kelompok pendapatan Rp. 500.000 keatas.

Pada musim ombak lemah, rumah tangga nelayan lebih terdistribusi pada kelompok pendapatan diatas Rp. 500.000. Pada tahun 2006 sebanyak 59 persen rumah tangga nelayan berpendapatan pada kelompok pendapatan paling rendah, dibawah Rp. 500.000. Pada tahun 2008, proporsi rumah tangga berpendapatan rendah ini turun menjadi 51,2 persen. Dengan demikian, hampir separo rumah tangga nelayan berpendapatan lebih tinggi. Selama dua tahun terakhir terjadi peningkatan proporsi rumah tangga yang berada pada kelompok pendapatan diatas Rp. 500.000 dan kenaikan tertinggi terdapat pada kelompok pendapatan Rp. 1.000.000 – Rp. 1.499.999, yaitu naik dari 2 persen menjadi 10,1 persen. Rumah tangga nelayan yang berpendapatan paling tinggi Rp. 3.500.000 keatas turun dari 25 persen menjadi 14,7 persen.

Tabel 5.7. Distribusi Rumah Tangga Nelayan Menurut Kelompok Pendapatan dan Musim

Pendapatan	Musim					
	Ombak Lemah		Pancaroba		Ombak kuat	
	2006	2008	2006	2008	2006	2008
< 500.000	59,0	51,2	67,0	69,0	86,0	92,2
500.000 – 999.999	1,0	7,0	4,0	11,6	7,0	4,7
1.000.000 – 1.499.999	2,0	10,1	6,0	7,8	3,0	-
1.500.000 – 1.999.999	5,0	7,8	-	3,1	1,0	-
2.000.000 – 2.499.999	3,0	3,9	4,0	0,8	1,0	1,6
2.500.000 – 2.999.999	2,0	4,7	1,0	0,8	1,0	0,8
3.000.000 – 3.499.999	3,0	0,8	1,0	0,8	-	0,8
>/ 3.500.000	25,0	14,7	17,0	6,2	1,0	-

Sumber: Data Primer, Survei BME, Aspek Sosial Ekonomi, PPK-LIPI, 2008

Pada musim pancaroba, terjadi penumpukan proporsi rumah tangga pada kelompok pendapatan paling rendah (kurang dari Rp. 500.000). Selama dua tahun terakhir terjadi kenaikan rumah tangga yang berpendapatan terendah, yaitu dari 67 persen (2006) menjadi 69 persen (2008) dan proporsi rumah tangga yang berpendapatan lebih tinggi sedikit menurun. Pada kelompok pendapatan di atasnya Rp. 500.000-Rp. 999.999 sampai Rp. 1.500.000-Rp.1.999.999 terjadi peningkatan proporsi rumah tangga. Kondisi pada musim pancaroba relatif lebih baik dibandingkan pada musim ombak kuat, dimana terjadi peningkatan proporsi rumah tangga pada kelompok pendapatan terendah, dari 86 persen menjadi 92,2. Kemudian untuk pendapatan yang lebih tinggi terjadi penurunan proporsi rumah tangga. Pada musim gelombang kuat, banyak nelayan yang tidak berani melaut karena beresiko tinggi terhadap keselamatan sehingga pendapatan nelayan menjadi berkurang. Nelayan pada umumnya istirahat dari kegiatan kenelayannya sambil memanfaatkan waktu untuk memperbaiki sarana tangkapnya. Bagan yang banyak dimiliki nelayan di Desa Terapung, pada musim gelombang kuat masuk dok untuk diservis bagian-bagian yang rusak Sebagian nelayan yang memiliki sarana tangkap lain seperti bubu, jaring atau pancing di Desa

Terapung beralih melakukan aktivitas nelayan lainnya yaitu menangkap kepiting, yang potensinya cukup besar di musim gelombang kuat. Sebagian nelayan lainnya melakukan kegiatan non nelayan, seperti budi daya rumput laut atau merantau ke luar daerah bahkan sampai ke Malaysia. Sedangkan di Desa Wakambangura, kebanyakan nelayan beralih melakukan kegiatan non nelayan yaitu budi daya rumput laut atau merantau ke luar daerah atau luar negeri, terutama ke Balikpapan, Ambon, Papua dan juga ke Malaysia.

Pendapatan anggota Pokmas

Pokmas atau Kelompok Masyarakat adalah kelompok yang anggotanya terdiri dari individu masyarakat. Pembentukan Pokmas bertujuan untuk melakukan pembinaan pada masyarakat dalam usaha meningkatkan pendapatan anggota Pokmas dan melakukan konservasi sumber daya terumbu karang. Ada 3 macam Pokmas, yaitu Pokmas UEP (Unit Ekonomi Produktif), Pokmas Gender dan Pokmas Konservasi. Masing-masing Pokmas terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Pokmas UEP dan Gender pada prinsipnya bertujuan sama yaitu meningkatkan pendapatan kelompok melalui beberapa kegiatan, antara lain simpan pinjam, pelatihan dsb. Kegiatan Pokmas di Kecamatan Mawasangka adalah pemberian bantuan atau pinjaman dana (Seed Fund) pada anggota Pokmas. Di Desa Terapung dana sebesar Rp. 50 juta yang turun pada bulan Januari 2008. Dana tersebut dipinjamkan pada anggota secara bergilir dan pada saat penelitian dana tersebut sudah dipinjamkan pada 26 anggota Pokmas. Jumlah pinjaman bervariasi mulai dari Rp. 500.000 sampai Rp. 2.500.000. Di desa Wakambangura jumlah anggota Pokmas yang sudah menerima dana bergilir sebanyak 15 orang. Pinjaman dana bergilir ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan usaha yang dilakukan. Jenis usaha anggota Pokmas bervariasi, yaitu pertukangan, nelayan, perdagangan (papa lele), budi daya rumput laut.

Dalam pedoman wawancara terstruktur pertanyaan ‘apakah ada anggota rumah tangga yang terlibat dalam anggota Pokmas’, bertujuan untuk mengetahui jumlah anggota Pokmas dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil survey, diketahui bahwa jumlah anggota Pokmas adalah sebanyak 54 orang, yaitu 29 orang di Desa Terapung dan 25 orang di Desa Wakambangura. Apabila dibandingkan dengan jumlah anggota Pokmas yang sudah menerima dana bergulir maka dapat diketahui bahwa tidak semua anggota Pokmas dari hasil survey sudah menerima dana bergulir atau sebagian belum menerima dana bergulir. Pada bagian ini akan melihat pendapatan rumah tangga anggota Pokmas. Pendapatan rumah tangga anggota Pokmas dapat bersumber dari semua anggota rumah tangga Pokmas, salah satunya adalah dari anggota Pokmas tersebut.

Table 5.8 menyajikan statistik pendapatan rumah tangga anggota Pokmas. Rata-rata pendapatan rumah tangga anggota Pokmas di Desa Terapung sebesar Rp. 2.735.442, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pendapatan di Desa Wakambangura sebesar Rp. 1.300.746. Data ini mencerminkan bahwa kondisi ekonomi rumah tangga anggota Pokmas di Desa Terapung lebih baik dibandingkan di Desa Wakambangura. Besarnya pendapatan anggota Pokmas di Desa Terapung salah satunya disebabkan usaha yang dilakukan oleh rumah tangga penerima dana bergulir lebih dari satu jenis usaha, seperti usaha bagan dan dagang ikan. Bahkan seorang penerima dana bergulir memiliki tiga jenis usaha, yaitu bagan, dagang ikan dan usaha tambak. Sementara di Desa Wakambangura, banyak penerima dana bergulir hanya memiliki jenis usaha, seperti dagang atau nelayan.

Selanjutnya jika ditelusuri angka mediannya, di Desa Terapung terdapat perbedaan yang cukup besar antara pendapatan rata-rata dengan angka median, yaitu sebesar Rp. 818.775, antara rata-rata pendapatan sebesar Rp. 2.735.442 dan pendapatan median sebesar Rp. 1.916.667. Sementara di Desa Wakambangura selisihnya lebih kecil, yaitu Rp. 112.121 antara rata-rata pendapatan sebesar Rp. 1.300.746 dan pendapatan median sebesar Rp. 1.188.625. Data ini mencerminkan proporsi rumah tangga anggota Pokmas yang berpendapatan dibawah rata-rata pendapatan di Desa Terapung jauh lebih besar dibandingkan di Desa Wakambangura. Disamping itu, hal tersebut juga menunjukkan terdapat kesenjangan yang cukup besar antara rumah tangga yang berpendapatan terendah dan tertinggi di

Desa Terapung di bandingkan di Desa Wakambangura. Memiliki usaha yang sudah stabil merupakan salah satu persyaratan bagi mereka yang akan mendapatkan dana bergulir disamping persyaratan lainnya sehingga diharapkan pengembalian cicilan dana berjalan dengan lancar.

Tabel 5.8. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Anggota Pokmas Tahun 2008.

	Terapung	Wakambangura	Total
Rata-Rata RT	2.735.442	1.300.746	2.171.231
Median	1.916.667	1.188.625	1.188.625
Minimum	325.333	105.000	105.000
Maksimum	8.016.667	7.900.000	8.016.667
N	29	25	54

Sumber: Data Primer, Survei BME, Aspek Sosial Ekonomi, PPK-LIPI, 2008

Perubahan pendapatan rumah tangga anggota Pokmas belum dapat dilihat karena pertama, pemberian dana bergulir pada anggota Pokmas baru dilakukan pada bulan Januari 2008 sehingga belum ada data survei pembandingan yang menunjukkan perubahan pendapatan rumah tangga Pokmas tersebut mengingat rumah tangga Pokmas secara spesifik baru dilihat pada survei tahun sekarang (2008). Kedua, relatif dekatnya jarak waktu antara pemberian dana bergulir dengan survei menyebabkan belum kelihatan adanya pengaruh perubahan pendapatan sebagai dampak dari penerimaan dana bergulir. Ketiga, disamping waktu yang terlalu dekat, jumlah dana bergulir yang diterima anggota Pokmas relatif kecil, yaitu antara Rp. 500.000 sampai Rp. 2.500.000, sehingga dampak kenaikan pendapatan sangat kecil. Ada kemungkinan dana yang sangat kecil tersebut tidak semuanya digunakan untuk penambahan modal, sebagian digunakan untuk keperluan lainnya.

5.2.2. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, hasil survei terhadap rumah tangga terpilih menunjukkan selama periode 2006-2008, terjadi

peningkatan pendapatan rata-rata perkapita dan pendapatan rumah tangga di Kecamatan Mawasangka. Peningkatan ini juga terlihat dari meningkatnya pendapatan median selama dua tahun terakhir. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kondisi ekonomi rumah tangga di Mawasangka. Namun peningkatan pendapatan ini tidak terlihat pada rumah tangga nelayan. Selama periode 2006-2008, terjadi penurunan pendapatan rumah tangga nelayan. Penurunan yang cukup tajam terjadi pada rumah tangga di Desa Wakambangura, yaitu turun sebesar 29,8 persen, sedang di Dea Terapung turun sebesar 12 persen. Perbedaan musim juga berpengaruh pada pendapatan rumah tangga nelayan. Pada musim pancaroba terjadi penurunan cukup tajam rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan. Sementara pada musim pancaroba dan ombak kuat terjadi peningkatan proporsi rumah tangga yang berpendapatan rendah, kurang dari Rp. 500.000 dan pada musim ombak lemah terjadi peningkatan proporsi rumah tangga nelayan yang berpendapatan lebih tinggi.

Perubahan tingkat pendapatan masyarakat selama periode 2006-2008 dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal, eksternal maupun faktor struktural. Faktor internal yang dapat mempengaruhi, antara lain adalah sumber pendapatan, teknologi/produksi dan wilayah tangkap, biaya produksi dan kualitas SDM. Faktor eksternal adalah pemasaran, permintaan terhadap hasil tangkap/produksi, musim/iklim dan degradasi sumber daya pesisir dan laut. Sedangkan faktor struktural yang dapat mempengaruhi perubahan jumlah pendapatan masyarakat antara lain adalah keberadaan Program COREMAP dan program pembangunan lainnya. Pada bagian ini akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan masyarakat di Kecamatan Mawasangka.

Program COREMAP

Program COREMAP merupakan program yang bertujuan untuk melestarikan terumbu karang. Ketergantungan masyarakat pada sumber daya laut sebagai sumber mata pencaharian seringkali menyebabkan adanya kegiatan eksploitasi sumber daya laut yang dapat merusak terumbu karang, seperti penangkapan ikan

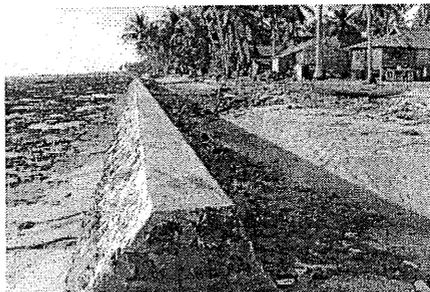
menggunakan alat tangkap yang dapat merusak terumbu karang atau pengambilan terumbu karang secara besar-besaran. Kerusakan terumbu karang berdampak pada semakin berkurangnya keberadaan ikan yang hidup di sekitar karang dan selanjutnya akan mengurangi hasil tangkapan nelayan. Dalam usaha menjaga kelestarian terumbu karang dan meningkatkan pendapatan masyarakat, Program COREMAP memiliki kegiatan, yaitu: 1) Usaha Ekonomi Produktif (UEP), yaitu pemberian dana bergulir pada Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; 2) Program bantuan pembangunan fisik, yaitu Bak penampungan air di Desa Terapung dan Talud (tanggul) di Desa Wakambangura dan; Program berkaitan dengan pelestarian terumbu karang, seperti DPL (Daerah Pengelolaan Laut) dan kegiatan Patroli laut.

Pelaksanaan Program COREMAP di Kecamatan Mawasangka telah dimulai pada tahun 2005. Kegiatan ini telah berdampak pada pelestarian terumbu karang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebelum ada Program COREMAP banyak praktek penangkapan ikan menggunakan bom dan bus. Setelah Program COREMAP dilakukan, upaya penurunan jumlah pembus dan pengebom ikan menunjukkan keberhasilan. Penangkapan ikan menggunakan bom dan bus mengalami penurunan secara signifikan bahkan sudah hampir tidak ada lagi. Sosialisasi mengenai manfaat terumbu karang dan dampak kerusakan terumbu karang dapat menyadarkan masyarakat untuk tidak melakukan pengrusakan terumbu karang. Dampak ini sangat dirasakan oleh para nelayan maupun masyarakat di Kecamatan Mawasangka, khususnya Desa Terapung dan Wakambangura. Namun selama dua tahun terakhir, masih ada sebagian kecil nelayan yang menggunakan bus secara sembunyi-sembunyi dan hal ini cukup berpengaruh pada hasil tangkapan ikan nelayan maupun hasil budi daya rumput laut.

Berbeda dengan kegiatan perusakan terumbu karang, kegiatan COREMAP yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat pelaksanaannya baru dilakukan pada awal tahun 2008 sehingga dampaknya pada peningkatan pendapatan belum kelihatan dengan pasti. Kegiatan Unit Ekonomi Produktif (UEP), yaitu

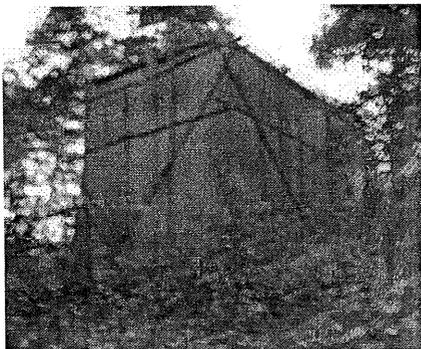
pemberian dana bergulir mulai dilakukan pada bulan Januari 2008. Jumlah dana yang digulirkan sebesar Rp. 50 juta untuk masing-masing desa (Terapung dan Wakambangura) dan sampai saat penelitian dilakukan sebanyak 41 orang anggota Pokmas telah menerima dana bergulir pada kedua desa. Dana yang diterima anggota Pokmas sebagian digunakan sebagai tambahan modal, seperti usaha dagang ikan dan sebagian menggunakan dana bergulir untuk memperbaiki alat tangkap. Salah satu dampak yang cukup menyolok adalah semakin banyaknya pedagang ikan, terutama perempuan di Desa Terapung. Para ibu di Desa Terapung menggunakan dana bergulir untuk membeli ikan dari nelayan kemudian dijual ke pasar dan sebagian membeli ikan teri untuk selanjutnya melakukan proses pengeringan sendiri di rumah. Kegiatan pembelian ikan teri banyak dilakukan para ibu-ibu pada bulan Agustus-September karena pada saat itu nelayan bagan banyak mendapat ikan dan ikan yang diperoleh berukuran besar sementara base-camp hanya menerima ikan teri yang berukuran kecil (super). Pengaruh dana bergulir terhadap peningkatan pendapatan belum kelihatan mengingat jumlah dana yang dipinjamkan relatif kecil antara Rp. 500.000-Rp. 2.500.000. Dana yang dipinjam tidak semuanya digunakan untuk modal usaha, sebagian menggunakan untuk perbaikan kapal atau bagan atau untuk keperluan lainnya.

Talut atau pembatas pantai adalah bantuan fisik dari Program COREMAP di Desa Wakambangura (Dusun Lambesi). Talut dibangun sepanjang 124 meter dengan biaya Rp. 50 juta bertujuan untuk mencegah banjir atau melaupnya air laut ke daratan. Pemukiman penduduk di Dusun Lambesi terletak di pinggir laut sering mengalami kebanjiran pada saat air pasang dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Setelah adanya bantuan pembangunan talud dari COREMAP diharapkan tidak terjadi



Gambar 4.3. Talut atau Pembatas Pantai Yang Dibangun dari Village Grant

lagi luapan air laut ke daratan. Pembangunan melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja yang diupah.



Gambar 4.4. Bak Penampungan Air Yang Dibangun dari Village Grant

Bak penampungan air adalah bantuan fisik dari Program COREMAP di Desa Terapung. Air bersih adalah salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Terapung. Program PPK telah membuat pipa saluran air sampai ke pemukiman penduduk tetapi lokasi sumber mata air namuan kurang memungkinkan untuk mengalirkan air ke pemukiman penduduk. Program COREMAP membuat bak

penampungan air dilengkapi mesin pompa untuk memasukkan air dari sumber mata air ke dalam bak penampungan air. Penampung air ini dibangun di tempat yang berada di lokasi yang lebih tinggi sehingga lebih mudah untuk dialirkan ke pemukiman penduduk menggunakan pipa air yang sudah ada. Pada saat penelitian bak penampungan baru selesai dibangun dan pompa belum terpasang.

Program Pemerintah Lainnya

Program pemerintah selain Program COREMAP yang dilakukan di desa penelitian adalah Program PPK. Program PPK mulai dilakukan pada tahun 2001 yang menfokuskan pada pembangunan infrastruktur desa. Di Desa Wakambangura kegiatan Program PPK terdiri dari:

- Rehabilitasi SD pada tahun 2001
- Pembuatan pipa air bersih (2002)
- Pembuatan Posyandu (2004)

- Pembuatan sekolah Taman Kanak-Kanak (2006)
- Pada tahun 2008 rencana akan dilengkapi peralatan untuk sekolah TK dan pembuatan talud sepanjang 15 meter di Desa Wakambangura

Program PPK merupakan program bantuan fisik sehingga tidak berpengaruh langsung pada pendapatan masyarakat. Namun proses pembangunan bantuan fisik tersebut memberdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja yang diupah, seperti pada saat pembuatan Talud di Desa Lambesi (Desa Wakambangura) sehingga meskipun kecil dapat menambah pendapatan sebagian masyarakat.

Faktor internal dan external

- ***Faktor Internal***

Sumber pendapatan penduduk di daerah penelitian tidak terlepas dari potensi sumber daya di laut dan di darat. Pekerjaan sebagai nelayan perikanan tangkap dan budi daya rumput laut merupakan mata pencaharian utama penduduk, disamping pekerjaan sebagai petani. Kondisi ini tidak banyak mengalami perubahan selama dua tahun terakhir.

Penggunaan teknologi alat tangkap kearah yang lebih canggih dapat berpengaruh pada peningkatan pendapatan nelayan. Selama dua tahun terakhir peralatan tangkap yang digunakan nelayan tidak banyak mengalami perubahan, yaitu armada tangkap berupa perahu motor (ketingting) dan perahu tanpa motor (sampan) dengan alat tangkap pancing, bagan, jaring dan bubu. Dalam hal penggemukan ikan karang, selama ini nelayan memelihara ikan karang di karamba gantung menggunakan jaring, namun sekarang seorang nelayan di Desa Terapung membuat karamba gali dipinggir pantai. Batu karang di pinggir pantai dibuat lubang dengan ukuran 0,5 m x 1,5 meter tempat ikan pada saat air surut. Di sekeliling keramba diberi jaring supaya ikan tidak lari keluar pada saat air pasang.

Penangkapan ikan menggunakan bius masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh sebagian kecil nelayan. Meskipun dilakukan

oleh beberapa orang saja namun bius dapat mematikan ikan yang masih kecil dan merusak terumbu karang. Disamping berpengaruh pada keberadaan ikan, obat bius yang terbawa arus laut juga dapat merusak rumput laut yang dibudi dayakan masyarakat.

Pukat atau jaring adalah salah satu alat tangkap yang digunakan oleh nelayan. Di Desa Wakambangura ada 10 orang nelayan yang menggunakan alat tangkap pukat/jaring. Meskipun tidak dilarang, penggunaan jaring dapat mempengaruhi potensi ikan di laut karena ikan yang masih kecil ikut terjaring. Berdasarkan kesepakatan masyarakat, ukuran jaring yang boleh digunakan adalah 2,5 inci. Permasalahannya adalah apabila jaring tersangkut di karang maka dapat merusak terumbu karang dan ikan yang tersangkut di karang akan mati dan menyebabkan ikan lain akan lari. Redi atau Pukat Harimau adalah jenis pukat yang dilarang penggunaannya untuk menangkap ikan. Penggunaan Redi banyak dilakukan oleh nelayan dari luar. Masyarakat/nelayan akan mengusir apabila ada nelayan luar yang menggunakan Redi. Menurut salah seorang nelayan di Desa Wakambangura, COREMAP adalah senjata bagi nelayan untuk mengusir pelaut dari luar 'ini wilayah coremap jadi tidak boleh menangkap kan secara illegal'. Sementara untuk melarang orang setempat digunakan pendekatan keluarga atau dengan cara halus. Meskipun ada sedikit perubahannya, namun penggunaan bius masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada bukti. Selama masih ada pemasok obt bius maka susah menghentikan penggunaan bius.

Secara umum, jangkauan wilayah tangkap sangat tergantung pada jenis armada dan alat tangkap. Armada tangkap kapal motor dengan kekuatan mesin cukup besar dapat menjangkau wilayah tangkap yang cukup jauh ke tengah laut, sebaliknya kapal motor berkekuatan mesin kecil memiliki wilayah tangkap yang lebih dekat. Selama 2 tahun terakhir, wilayah tangkap nelayan tidak banyak mengalami perubahan. Wilayah tangkap nelayan bagan berada sekitar 4 mil dari pantai. Wilayah tangkap nelayan pancing ikan karang berada disekitar 2 mil paling dekat sampai 10 mil.

Biaya produksi yang dikeluarkan nelayan adalah biaya melaut, seperti biaya bahan bakar (solar) dan ransom. Besarnya biaya melaut mempengaruhi pendapatan nelayan. Kenaikan harga BBM cukup menambah biaya melaut, namun kenaikan harga ikan dapat meminimalisir kenaikan biaya produksi melaut.

- ***Faktor Eksternal***

Pada bagian ini akan membahas faktor eksternal yang berpengaruh pada pendapatan nelayan. Faktor eksternal yang diduga berpengaruh pada besarnya pendapatan nelayan adalah pemasaran dan harga, permintaan terhadap hasil tangkap, musim dan degradasi sumber daya pesisir dan laut.

Pemasaran hasil tangkapan nelayan merupakan ujung tombak kegiatan kenelayan yang menghasilkan pendapatan. Pemasaran dan harga berpengaruh pada jumlah pendapatan nelayan. Hasil tangkapan nelayan Kecamatan Mawasangka terdiri dari ikan teri, ikan karang, ikan tongkol, tuna, kepiting, rumput laut dan sebagainya.

Ikan teri dipasarkan langsung pada pedagang pengumpul atau Base Camp yang ada di desa. Rantai pemasaran ikan teri dilakukan dari nelayan ke pedagang pengumpul yang ada di Desa Terapung. Pedagang pengumpul melakukan pengolahan ikan segar yang diperoleh dari nelayan menjadi ikan teri olahan dalam bentuk ikan teri asin dan kering. Tahap selanjutnya, pedagang pengumpul menjual ikan teri pada agen besar di kota Jakarta dan Ujung Pandang. Penentuan harga dilakukan oleh pedagang pengumpul, biasanya harga ikan teri sudah standar di tingkat pengumpul.

Ikan karang (kerapu dan sunu) dijual dalam keadaan hidup dan mati. Ikan karang hidup dijual pada pedagang pengumpul yang ada di kota kecamatan. Sebelum dijual, ikan dipelihara di keramba sampai memenuhi ukuran dan berat ikan untuk dijual. Ikan hidup yang dihasilkan relatif sedikit sehingga hanya ada satu orang pengumpul yang membeli ikan hidup dari nelayan di Kecamatan Mawasangka. Nelayan yang akan menjual ikan memberitahu pengumpul melalui telepon bahwa ada ikan yang akan dijual. Kemudian ikan dijemput oleh

pengumpul dengan perahu motor langsung mengambil ikan dari keramba. Penjualan ikan karang hidup hanya dilakukan oleh nelayan di Desa Wakambangura. Ikan karang mati dan jenis ikan lainnya, seperti ikan krisi, tongkol, kakap, tenggiri, gurita dsb dijual pada pedagang penampung dan papa lele yang mendatangi nelayan dari laut. Selama ini pemasaran ikan karang hidup dan ikan mati tidak menemui permasalahan karena pedagang pengumpul yang ada selalu siap penampung ikan dari nelayan. Berapapun ikan yang diperoleh nelayan dapat dijual pada pengumpul dengan tingkat harga yang sudah ditetapkan oleh pengumpul. Bahkan kapasitas ikan karang hidup yang dapat dikumpulkan oleh pedagang pengumpul masih rendah.

Pemasaran *kepiting* hampir sama dengan pemasaran ikan lainnya. Nelayan menjual kepiting pada pedagang pengumpul di desa. Selanjutnya pedagang pengumpul menjual kepiting pada industri pengolahan yang ada di desa. Biasanya sepulang dari mengambil kepiting dari bubu pagi hari, nelayan langsung menjual ke *base camp* dimana pengumpul sudah menunggu nelayan dari laut. Setelah ditimbang dan ditentukan harganya maka pedagang pengumpul langsung menjual kepiting ke pabrik pengolahan kepiting yang berada *base camp* tersebut.

Rumput laut merupakan hasil utama nelayan di Desa Wakambangura. Pemasaran rumput laut dilakukan pada pedagang pengumpul di tingkat desa. Di Desa Wakambangura ada 2 orang penampung rumput laut. Selanjutnya pedagang pengumpul menjual rumput laut ke agen besar di Bao-Bao dan Surabaya. Rumput laut merupakan komoditi ekspor. Rumput laut diekspor ke Cina dan Jerman oleh pengumpul di Surabaya. Harga rumput laut ditentukan oleh pedagang pengumpul yang berasal dari eksportir di Surabaya. Harga rumput laut diprediksi mengalami kenaikan pada tahun 2008. Pada tahun ini diprediksi harga di tingkat petani adalah Rp. 8.000/kg, di tingkat pengumpul di Bao-Bao adalah Rp. 9.000/kg dan di Surabaya sebesar Rp. 11.000/kg. Pada tahun 2007, harga di tingkat petani adalah Rp. 5.000/kg.

Selama dua tahun terakhir terjadi peningkatan kegiatan kenelayan di Kecamatan Mawasangka. Hal ini dapat diindikasikan dari peningkatan pemasaran hasil tangkapan nelayan. Pemasaran hasil tangkapan nelayan tergantung pada pedagang pengumpul yang ada di desa. Ada beberapa pedagang pengumpul yang menampung ikan hasil tangkapan nelayan, baik pengumpul ikan karang hidup, ikan mati, rumput laut dan jenis ikan lainnya. Selama dua tahun terakhir pemasaran hasil laut tidak mengalami permasalahan yang berarti karena semakin banyak pedagang yang mengambil ikan dari nelayan. Di Desa Wakambangura terjadi peningkatan jumlah pedagang pengumpul ikan, yaitu dari 2 orang (2006) menjadi 8 orang (2008). Sekarang setiap hari papa lele mengambil ikan pada pedagang pengumpul, dimana sebelumnya adalah sekali dalam seminggu. Disamping itu, jumlah papa lele juga meningkat, baik dari desa setempat maupun dari luar desa yang membeli ikan pada nelayan atau pedagang pengumpul untuk dijual lagi ke pasar-pasar di desa maupun di tempat lain. Sementara di Desa Terapung terjadi pengurangan jumlah base camp kepiting, dari 3 menjadi 2, namun hal ini tidak menjadi kendala bagi nelayan dalam memasarkan kepitingnya.

Perbedaan musim berpengaruh pada besarnya jumlah pendapatan nelayan. Pada musim gelombang kuat pendapatan nelayan menjadi berkurang karena kegiatan melaut menjadi berkurang. Nelayan banyak yang tidak berani melaut karena armada tangkap yang dimiliki berukuran kecil dengan alat tangkap yang masih sederhana. Nelayan yang turun kelaut hanya menangkap ikan disekitar pantai. Kondisi ini berdampak pada kecilnya pendapatan nelayan pada musim ombak kuat. Sementara pada musim teduh jumlah pendapatan nelayan relatif besar karena frekuensi nelayan menangkap ikan cukup tinggi. Kondisi laut yang tenang dan tidak bergelombang memungkinkan nelayan untuk turun kelaut menangkap ikan sampai pada wilayah tangkap yang cukup jauh.

Kecamatan Mawasangka memiliki potensi sumber daya laut yang cukup besar. Kekayaan Sumber Daya Laut (SDL) yang sangat besar di wilayah ini didukung oleh adanya gugusan batu karang sehingga disamping jenis ikan laut dalam, di wilayah perairan

Mawasangka juga banyak terdapat bermacam-macam jenis ikan karang. Sebelum adanya Program COREMAP yang bertujuan untuk melestarikan terumbu karang, penangkapan ikan menggunakan bom dan bus yang dapat merusak terumbu karang banyak dilakukan oleh nelayan setempat. Akibatnya terumbu karang yang berada di sekitar perairan perairan Mawasangka banyak mengalami kerusakan. Sosialisasi pelestarian terumbu karang yang dilakukan oleh COREMAP telah mampu menyadarkan nelayan untuk tidak menggunakan bom dan bus. Setelah adanya program COREMAP kegiatan ini sudah banyak berkurang, bahkan sudah hampir tidak ada lagi. Namun demikian, penggunaan bus secara sembunyi-sembunyi masih dilakukan oleh sebagian kecil nelayan. Hal ini dapat berpengaruh pada penurunan hasil tangkapan nelayan dan kerusakan rumput laut yang dibudidayakan oleh masyarakat, disamping kerusakan terumbu karang. Terumbu karang yang sudah terlanjur rusak emmerlukan pemulihan yang cukup lama.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Kajian tentang Program COREMAP di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomii, merupakan lanjutan dari kajian Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang tahun 2006, dengan lokasi kajian dan responden yang sama. Laporan ini merupakan hasil kajian tahun 2008, terutama membahas tentang pelaksanaan COREMAP di Kabupaten Buton umumnya dan lokasi kajian pada khususnya, serta kendala yang dihadapinya. Kajian kali ini juga membahas kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya pendapatan rumah tangga, baik dari kegiatan kenelayanan maupun kegiatan ekonomi lainnya. Dengan membandingkan pendapatan masyarakat selama dua tahun terakhir (2006-2008), serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, diharapkan dapat digunakan untuk memantau dampak Program COREMAP terhadap kesejahteraan masyarakat di kedua lokasi kajian yaitu Kecamatan Mawasangka dan Kadatua.

Implementasi dan Kendala COREMAP

- Pelaksanaan COREMAP II diawali dengan pembentukan kelembagaan pengelola di tingkat desa seperti LPSTK, Pokmas, LKM dan MD dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses pembentukannya. Kegiatan-kegiatan COREMAP juga direncanakan oleh masyarakat yang tertuang dalam RPTK di desa binaan. Kelembagaan yang menjadi syarat formal pelaksanaan COREMAP di tingkat desa binaan sudah terbentuk dan sebagian sudah berjalan sesuai dengan RPTK masing-masing. Meskipun demikian ada kecenderungan pembentukan

lembaga dan pemilihan pengurus lain (seperti LKM, Pokmas), tidak dilakukan secara prosedural karena tuntutan waktu pelaksanaan program, sehingga cenderung bersifat formalitas yaitu sekedar memenuhi syarat turunnya dana bantuan COREMAP (UEP). Pengurus LKM dan Pokmas kurang berfungsi karena menurut ketua LPSTK banyaknya jumlah pengurus COREMAP tidak sebanding dengan beban kerja. Ketua LPSTK beranggapan bahwa jumlah pengurus Pokmas yang relatif banyak, tidak sebanding dengan beban COREMAP dalam penggalangan dana yang jumlahnya relatif masih kecil.

- Pemilihan pengurus kelembagaan (selain ketua) cenderung dipilih orang-orang dekat tim pengelola (LPSTK, kepala desa dan MD). Keterbatasan SDM di lokasi binaan, juga menyulitkan seleksi pengurus untuk berbagai kelembagaan COREMAP. Dampaknya pengelolaan COREMAP cenderung didominasi beberapa pengurus, bahkan di satu lokasi binaan hanya didominasi ketua LPSTK dan keluarga dekatnya. Kondisi ini berpotensi melemahkan peran pengurus Pokmas lainnya, dan cenderung menjadi tidak peduli dengan aktivitas COREMAP, karena kurang diikutsertakan dalam pengelolaan sesuai dengan fungsinya. Apabila kondisi ini berkelanjutan, partisipasi masyarakat yang menjadi sasaran penting COREMAP, kurang tercapai.
- Sebelum cairnya dana bergulir UEP (akhir tahun 2007), kegiatan COREMAP di kedua lokasi cenderung lebih menonjol untuk penyadaran masyarakat (*awareness*) terutama untuk konservasi terumbu karang. Sosialisasi banyak dilakukan pada kelompok masyarakat secara formal maupun informal, di tempat pertemuan maupun di *gote-gote* (tempat berbincang antar tetangga di depan rumah tinggal). Hasil kegiatan sosialisasi yang dilakukan Pokmas Konservasi dan Pokwasmas, dirasakan oleh masyarakat setelah berjalan setahun, yakni masyarakat menyadari arti penting konservasi terumbu karang untuk kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Banyak pihak mengakui bahwa program COREMAP di desa binaan telah berdampak pada berkurangnya

praktek penangkapan ikan yang merusak terutama pemakaian bom, obat bius dan alat tangkap lain yang merusak (redy dan pukat). Bahkan karena dana untuk konservasi sangat minim, masyarakat nelayan rela berswadaya untuk 'menjaga' DPL dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat adalah makin banyaknya populasi ikan (termasuk ikan karang) dan kembalinya jenis ikan yang pernah hilang (antara lain ikan biji nangka). Indikasi semakin banyaknya ikan dapat dilihat dari jumlah pengumpul ikan di lokasi kajian yang semakin banyak, frekuensi kapal ekport yang makin sering datang (dulu 3 bulan sekali sekarang setiap bulan).

- Isu masih maraknya praktek merusak karang melalui pembiusan, terutama dilakukan oleh beberapa orang lokal yang diketahui masyarakat nelayan, namun sulit pembuktiannya. Namun demikian ketua LPSTK dan masyarakat tidak berdaya terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, terutama praktek pembiusan, meskipun merugikan banyak nelayan. Hal ini disebabkan kurang seriusnya pihak yang berwajib dalam menindak lanjuti pelaku, meskipun dukungan untuk konservasi cukup kuat dari semua unsur masyarakat (pemerintah, tua adat dan tokoh masyarakat). Hal ini dikuatirkan menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan program konservasi, karena adanya pelaku yang diduga mendapat *back up* dari pihak berwajib, sehingga tidak tersentuh hukum. Indikasi praktek yang merugikan nelayan hanya dapat dilihat dari hasil tangkapan yang tidak sebanding dengan alat tangkap yang dimiliki nelayan pada umumnya. Di Wakambangura banyak rumput laut yang menjadi gosong karena diduga terkena dampak pembiusan tersebut.
- Pembentukan DPL di lokasi binaan dilakukan atas dasar musyawarah, sehingga cenderung dijaga pelaksanaannya oleh masyarakat. Namun dengan berjalannya waktu banyak batas DPL yang hilang terkena ombak dan masyarakat tidak berdaya untuk menggantinya, karena tidak tersedia dana untuk penggantian sarana DPL. Akibatnya DPL tanpa batas yang jelas, hanya diketahui oleh nelayan lokal, karena pemilihan lokasi DPL

sudah mempertimbangkan tempat strategis yang juga 'dikeramatkan' masyarakat. Namun nelayan dari luar sulit mengetahuinya, sehingga pelanggaran mudah dilakukan apabila tidak dijaga. Penjagaan ini dilakukan secara spontan oleh masyarakat nelayan sekaligus sambil melakukan pekerjaan kenelayanan di laut.

- Antusias masyarakat dan pengurus Pokmas bertambah dengan mulai cairnya dana bergulir dari program COREMAP (UEP), meskipun realisasinya lambat dan belum memenuhi target. Dalam hal pengelolaan dana bergulir, peran dominan LPSTK di suatu desa binaan, berpotensi 'jalan sendiri' terutama dalam mengambil kebijakan mengelola dana Pokmas (UEP). Tanpa transparansi dalam pengelolaan dana dengan pengurus kelembagaan terkait, berpotensi menimbulkan kecurigaan adanya benturan kepentingan dengan kegiatan ekonomi pengurus dan orang-orang dekatnya. Antusias masyarakat akan berkurang manakala penyaluran dana bergulir tidak menyentuh kepentingan langsung masyarakat yang menjadi sasaran program.
- Pergantian pimpinan COREMAP di tingkat kabupaten pada tahun 2007, menimbulkan dualisme kepemimpinan antara pejabat lama dan baru yang dianggap mencerminkan dualisme kepentingan pimpinan eksekutif (bupati) dan legeslatif (DPRD). Hal ini berdampak pada ketidakpastian yang dirasakan oleh banyak fungsionaris COREMAP di tingkat daerah binaan, sehingga mengurangi aktivitas pengurus di daerah binaan (tanpa surat keputusan dan honor selama berbulan-bulan).
- Kesepakatan yang sudah dibuat antara PMU di tingkat kabupaten dengan Dinas Pendidikan dalam masalah memasukkan mata pelajaran terumbu karang melalui muatan local (Mulok), dalam implementasinya kurang didukung oleh program Diknas Kabupaten yang tetap memberlakukan Mulok Bahasa Daerah, karena menjadi bagian dari mata pelajaran untuk UAS. Sementara mata pelajaran terumbu karang memerlukan waktu /jam pelajaran yang berebut dengan bahasa daerah, dan tidak termasuk dalam UAS. Agar benturan antara program COREMAP

dan budaya tidak terjadi, diperlukan kebijakan di tingkat Diknas, sehingga dapat mencapai sasaran tanpa mengorbankan salah satu pihak.

- Selain dana COREMAP, lokasi binaan COREMAP juga menerima bantuan dari pihak lain (antara lain Provinsi, Kabupaten, Program PPK, dan DKP). Meskipun demikian koordinasi dilakukan antarpihak terkait sehingga tumpang tindih dapat dihindarkan seoptimal mungkin. Pada umumnya dana bantuan diluar COREMAP lebih untuk pembangunan fisik seperti infrastruktur, sekolah, Posyandu, jaringan listrik dan jaringan air bersih (PDAM). Tampaknya dalam praktek bantuan-bantuan dana tersebut saling melengkapi, karena program COREMAP dapat diarahkan oleh masyarakat untuk melengkapi program yang dibutuhkan. Misal di Desa Wakambangura program bantuan fisik COREMAP diarahkan ke pembuatan talut (pemecah ombak) di sepanjang pantai (baru 100 m) dan di Desa Terapung lebih diarahkan untuk perlengkapan air bersih (bak air).
- Pondok informasi sudah tersedia di lokasi, biasanya lahan disediakan masyarakat dan bangunan oleh program COREMAP. Namun belum berfungsi penuh, cenderung lebih banyak terkunci dari pada difungsikan. Demikian pula belum banyak berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan berbagai informasi COREMAP karena keterbatasan sarana dan bahan untuk maksud tersebut. Di Terapung karena lokasinya strategis di sebelah kantor desa, maka pondok ini sering dimanfaatkan untuk pengelolaan dana bergulir oleh pengurus LKM.
- Adanya program COREMAP tampaknya telah berhasil meningkatkan pengetahuan tentang COREMAP dan konservasi, terutama pada responden yang terlibat kepengurusan atau sasaran program Pokmas. Meskipun demikian tanpa pengetahuan COREMAP, keterlibatan masyarakat nelayan dalam konservasi cukup besar, karena menyangkut kepentingan ekonomi mereka yang didominasi aktivitas di laut.

- Dasar pemberian insentif untuk pengurus COREMAP di tingkat desa binaan tidak jelas, sehingga sering menimbulkan perasaan tidak adil antarpengurus. Pengurus MD dapat insentif bulanan, sementara ketua LPSTK dan pengurus lain tidak memperolehnya, sehingga insentif diperoleh dari uang jasa pengelolaan dana bergulir. Perlu pengawasan yang intensif, agar dana bergulir yang sudah terkumpul, tidak salah sasaran dan benar-benar dimanfaatkan untuk pihak-pihak yang lebih membutuhkan. Dana tersebut cenderung rawan penyalahgunaan apabila tidak ada transparansi diantara para pengelola.
- Kesejahteraan masyarakat dilihat dari pemilikan aset produksi dan non produksi cenderung meningkat dalam 2 tahun terakhir (2006-2008), baik karena pengaruh konservasi COREMAP maupun faktor lainnya. Beberapa peningkatan aset produksi dan non-produksi juga dipengaruhi oleh kiriman dari perantau yang bisanya untuk modal (sarana penangkapan ikan), rumah maupun kendaraan bermotor. Sedangkan peningkatan kesejahteraan dilihat dari kondisi permukiman dan sanitasi lingkungan juga dipengaruhi oleh dukungan banyak program yang masuk ke lokasi desa binaan COREMAP.

Perubahan Pendapatan dan Faktor yang Berpengaruh

- Selama kurun waktu 2006-2008 terjadi peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga dan pendapatan perkapita di Kecamatan Mawasangka. Pendapatan rumah tangga meningkat sekitar 4,4 persen, yaitu dari Rp. 1.440.522 menjadi Rp. 1.568.608 per bulan dan pendapatan perkapita meningkat sebesar 10,5 persen (dari Rp. 286.286 menjadi Rp. 349.259). Peningkatan ini berkaitan dengan kenaikan pendapatan masyarakat di sektor pertanian, baik pertanian pangan maupun tanaman keras. Selain itu, peningkatan pendapatan rumah tangga dari sektor perdagangan meningkat secara signifikan, karena semakin meningkatnya kegiatan perdagangan masyarakat, terutama perdagangan hasil tangkapan ikan. Sementara

pendapatan rumah tangga dari sektor perikanan mengalami penurunan karena menurunnya hasil tangkapan ikan.

- Pendapatan rumah tangga nelayan mengalami penurunan, baik pendapatan perkapita maupun rata-rata pendapatan. Pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan turun sebesar 19 persen (dari Rp. 2.479.874 menjadi Rp. 1.625.806), sedang pendapatan rata-rata turun sebesar 7 persen (dari Rp. 4.12.902 menjadi Rp. 357.095). Penurunan ini disebabkan berkurangnya hasil tangkapan ikan oleh nelayan. Hal ini berkaitan dengan belum maksimalnya hasil tangkapan nelayan, terutama dari hasil ikan teri. Hasil tangkapan ikan teri pada tahun ini diprediksi mengalami peningkatan, diindikasikan oleh perolehan ikan teri yang lebih banyak pada awal Musim Timur dibandingkan dengan awal musim Timur pada tahun sebelumnya. Pada puncak musim Timur (September) ikan teri akan berlimpah dan biasanya Base Camp penuh sehingga tidak menampung lagi ikan teri dari nelayan. Biasanya nelayan dan keluarga melakukan pengeringan ikan sendiri di rumah masing-masing. Masih adanya penangkapan ikan menggunakan obat bius yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh sebagian kecil nelayan yang berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan pancing.
- Pendapatan nelayan bervariasi menurut musim, rata-rata pendapatan nelayan pada musim ombak lemah lebih tinggi dibandingkan musim pancaroba dan musim ombak kuat. Hal ini disebabkan sebagian besar nelayan tidak melaut pada musim gelombang kuat karena keterbatasan armada tangkap.
- Kegiatan COREMAP belum memperlihatkan dampak yang signifikan pada pendapatan masyarakat karena program UEP baru dilaksanakan pada awal tahun 2008 sehingga dampaknya pada kenaikan pendapatan masyarakat belum kelihatan. Selain itu, relatif kecilnya dana yang digulirkan pada anggota pokmas berkisar antara . 500.000 sampai . 2,5 juta rupiah. sehingga kurang berpengaruh pada kenaikan pendapatan penerima dana.

6.2. Rekomendasi

- Di sebagian lokasi binaan, partisipasi masyarakat dalam program COREMAP cenderung bukanlah partisipasi murni (non responsible participation), akan tetapi lebih dipengaruhi oleh kebutuhan akan bantuan dana, sehingga pemberdayaan bersifat semu dan temporer. Program yang lebih berhasil adalah program awareness yang menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan penduduk tentang pentingnya melestarikan sumberdaya laut, khususnya terumbu karang.
- Program UEP yang menyalurkan sejumlah dana bergulir, paling banyak diminati penduduk. Namun demikian jumlah dana yang sudah disalurkan relatif masih kecil dibandingkan kebutuhan masyarakat akan modal usaha dan cakupan sasaran juga masih terbatas. Perlu diperhitungkan secara matang kebutuhan dana sesuai dengan jumlah sasaran yang benar-benar membutuhkan dan jenis kegiatan di lokasi kajian, sehingga tepat guna dan tepat sasaran.
- Di Mawasangka, untuk memulai usaha budidaya rumput laut diperlukan modal yang relatif besar, biasanya modal diperoleh dari pedagang penampung dengan imbalan penjualan hasil yang sering merugikan petani. Apabila mereka memperoleh pinjaman modal yang tidak mengikat, penghasilan mereka diharapkan akan lebih baik, karena tidak terikat pada pemilik modal (taoke).
- Perlunya monitoring penggunaan anggaran, karena rentannya penyelewengan yang disebabkan rendahnya pengawasan. Kurang lancarnya gaji para pengurus COREMAP di daerah sasaran serta lambatnya pencairan dana untuk kegiatan pokmas, dapat menimbulkan kecurigaan diantara pengurus, karena dianggap sebagai kelemahan dalam pengelolaan anggaran. Kelancaran program COREMAP di daerah binaan sangat tergantung pada pengelolaan anggaran baik di tingkat kabupaten maupun di lokasi binaan.

- Keterbatasan SDM dalam pengelolaan COREMAP perlu diatasi dengan memperbanyak pelatihan dan memperluas partisipasi masyarakat. Pelatihan yang ada biasanya hanya terbatas untuk para pengurus inti, sehingga menimbulkan kecemburuan pada pengurus lain yang tidak pernah mendapat kesempatan berlatih. Sementara pengurus lain dengan kemampuan terbatas, kurang dapat dimanfaatkan, sehingga kepengurusannya hanya bersifat formalitas.
- Pembentukan pengurus selama ini cenderung formalitas dan kurang mempertimbangkan realitas di daerah binaan. Untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif, jumlah pengurus perlu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan (bukan standar formal), dan secara bertahap jumlahnya ditingkatkan sesuai kebutuhan. Kondisi ini untuk menghindarkan kesan mubazir dan tidak dilibatkan. Di sisi lain untuk menghindarkan tuntutan insentif (dari jasa dana bergulir) oleh para pengurus yang hanya bersifat formalitas.
- Kurang ditindaklanjutinya pelaku pengrusakan di laut, dapat berdampak negatif terhadap masyarakat yang mulai menyadari arti penting konservasi, dan akan kembali meragukannya, apabila pelaku pengrusakan dibiarkan lolos karena tidak tersentuh hukum. Keseriusan pihak berwajib dalam menindaklanjuti pelaku pelanggaran konservasi perlu ditingkatkan, tanpa pandang bulu, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga. Apabila kesan diskriminatif terus berlanjut, keberhasilan program COREMAP dalam menjaga dan memulihkan terumbu karang semakin sulit tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I.R (2003)
Pemberdayaan, pembangunan masyarakat dan intervensi komunitas, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Burke, L *et al.*(2002)
Terumbu Karang yang Terancam di Asia Tenggara.
Terjemahan. Jakarta : World Resources Institute.
- Bartle, F.(2005)
Mengukur pemberdayaan. <http://www.scn.org/mpfc/modules/mea-ovin.htm>
- BPS Kabupaten Buton (2007)
Kabupaten Buton Dalam Angka Tahun 2006, Kab. Buton 2007.
- Chambers, R. (1984)
Metode pintas dalam pengumpulan data sosial untuk proyek-proyek pembangunan pedesaan. Balitbang Pertanian dan The Ford Foundation, Jakarta
- Crawford, B *et al.* (2000)
Community-Based Marine Sanctuaries in the Phillippines : A Report on Focus Group Discussions. PCAMRD, Los Banos
- CRITC-COREMAP II-LIPI (2007)
Monitoring Ekologi Buton, CRITC-COREMAP II-LIPI, Jakarta
- Departemen Kelautan dan Perikanan-DKP (2007)
Pedoman Umum Pengelolaan Berbasis Masyarakat COREMAP II' Jakarta DKI – Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- Forsyth, T.(2003)
Critical political ecology, The Politics of environmental science, Routledge, London and New York
- Hardin, G. (1968)
Tragedy of the Common. Science 162 : 1243-1248
- Hasbullah, J. (2005)
Social Capital, menuju keunggulan budaya manusia Indonesia, MR United Press, Jakarta
- Ife, J.(1995)
Community development: Creating community alternatives-vision, analysis and practice, Longman Pty Ltd, Australia
- Nagib, Laila, dkk (2006)
Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi COREMAP II: Kasus Kabupaten Buton, COREMAP-LIPI.
- Oliver, ed. (2002)
Sustainable Fishery Management in Asia. Asian Productivity Organization, Tokyo.
- Program Management Unit (PMU) dan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pesisir (LP2SP) (2007)
Laporan Hasil Kegiatan Workshop Guru Untuk Pengembangan Pembelajaran Mulok Terumbu Karang, PMU & LP2SP, Bau-Bau
- Zaelany, A. (2003)
 “Becoming the Fish Bomb Fisherman as an Adaptation Strategy in Economic Crisis : Case Study of Pulau Karang, Indonesia ” . In : *The Role of Dialogue and Networking : From A Transitional to an Industrialized Country*, Proceeding of an International Symposium Cum Workshop in Hanoi, Vietnam

Zaelany, A dkk. (2007)

“Persepsi Tiga Stakeholder terhadap Pekerjaan Nelayan Bom Ikan di Pulau Barrang Lompo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam : *Jurnal Pesisir dan Lautan. Volume 7, no.2.* Bogor : PKSPL - IPB



